



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

**GERAKAN PENUMPASAN TERHADAP PKI DI  
SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG, SUMATERA BARAT  
1965-1966**

**SKRIPSI**



**EDMOND DANTES  
06 181 036**

**JURUSAN SEJARAH  
FAKULTAS ILMU BUDAYA  
UNIVERSITAS ANDALAS  
PADANG 2012**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas berkat rahmat dan hidayah-Nya akhirnya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul “*Gerakan Penumpasan Terhadap PKI di Sawahlunto/Sijunjung, Sumatera Barat 1965-1966*”. Kemudian tidak lupa shalawat dan salam kepada Rasulullah, Muhammad SAW yang telah memperjuangkan syariat Islam dan mengantarkan umatnya ke zaman yang berilmu pengetahuan. Skripsi ini penulis susun untuk melengkapi syarat dalam menyelesaikan tugas akhir dalam mencapai gelar sarjana Jurusan Sejarah pada Fakultas Ilmu Budaya Universitas Andalas Padang.

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis telah banyak mendapatkan bantuan, bimbingan dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tidak terhingga dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada Bapak Prof. Dr. Phil. Gusti Asnan sebagai pembimbing I dan Bapak Drs. Syafrizal, M.Hum sebagai pembimbing II, yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan, dan petunjuk kepada penulis.

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada kepada Bapak Prof. Dr. Herwandi, M.Hum sebagai Dekan dan Dr. Anatona, M.Hum sebagai Pembantu Dekan III Fakultas Ilmu Budaya. Bapak Drs. Sabar, M.Hum selaku Ketua Jurusan Sejarah, Ibu Dra. Eny May, M.Si, sebagai Sekretaris Jurusan Sejarah. Selanjutnya terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Prof. Dr. Phil. Gusti Asnan sebagai Penasehat Akademik. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada seluruh staf pengajar Jurusan Sejarah, Bapak Dr. Mhd. Nur, M.S, Ibu Dr. Lindayanti,

M.Hum, Bapak Dr. Nopriyasman, M.Hum, Ibu Dra. Midawati, M.Hum, Bapak Drs. Zaiyardam Zubir, M.Hum, Bapak Drs. Syafrizal, M.Hum, Bapak Drs. Purwohusodo, M.Hum, Bapak Drs. Armansyah, Bapak Drs. Wannofri Samry, M.Hum, Bapak Drs. M. Djuir, Bapak Israr Iskandar, S.S, M.Si, Bapak Witrianto, S.S, M.Hum; M.Si, Ibu Dra. Iriana, Ibu Yenny Narny, S.S, M.A, Bapak Harry Efendy, S.S, M.A, dan Bapak Yudhi Andoni, S.S. yang telah berkenan mendidik dan mentransfer ilmunya kepada penulis. Adanya ilmu yang diperoleh selama berada di Jurusan Sejarahlah yang memungkinkan penulisan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini penulis juga banyak mendapat bantuan dari Bapak dan Ibu Karyawan Perpustakaan Jurusan Sejarah, Perpustakaan Fakultas Ilmu Budaya, Perpustakaan Pusat Universitas Andalas, Perpustakaan Universitas Negeri Padang, Perpustakaan, Arsip dan Dokumentasi Kabupaten Sijunjung, dan Kodim wilayah Sawahlunto/Sijunjung, penulis ucapan terima kasih atas bantuan yang telah diberikan kepada penulis selama ini.

Terima kasih dan penghargaan yang setulusnya buat keluarga penulis tercinta Papa (Markias Gagar Marajo) serta Mama (Marnis) yang selalu melimpahkan kasih sayang yang tidak terhingga, kesejukan dan kesabaran dalam menghadapi kerasnya hati ini, bekerja keras membanting tulang demi memenuhi kebutuhan penulis, samapai kapanpun penulis tidak akan bisa membalas kasih sayang yang mereka berikan, semoga ini menjadi amal ibadah bagi mereka amin. Buat adik-adikku tersayang Dini Happy Yani (*capek tamat dih*), Maidy Satria (*Jan baleha-leha mode daed lo*), Titi Rahmayanti, Ceri Aulia dan Fadza Fauzan Azima (*Elok-elok sakolah*

*dan jago diri kalian elok2).* Maaf gara-gara daed lambat dalam menyelesaikan kuliah kalian jadi sedikit teraniaya, terima kasih juga atas kesabarannya.

Seterusnya buat keluarga besar dari pihak Papa, Jasir Dt. Rangkayo Bungsu alm. (Kakek) dan Mita alm. (Nenek), *Ibu Godang* (Nursima) dan *Mak Datuak* (B. Dt. Rangkayo Bungsu, *Pak Dang* (Marsian) dan *Ibu Biaro* (Lita), *Makngah* (Nurbaya) dan *Pakngah* (Syamsuar Syam Dt. Gampo Alam), *Pak Nda* (M. Kotik Dubalang) dan *Etek* (Siju), *Bu Kenek* (Iyok) dan *Pak Etek* (Jun), *Oncu* (Upik) dan *Pak Oncu* (Maspuri), *Etek* (Afrinur Yanti) dan *Pak Cik* (Khaibi), *ni Meli* dan *da Yai*, *da Son* dan Istri, *da Topit jo ni Mel*, *da Poni jo Buk Dokter*, *unang Ria jo da Deri*, *bang Eka jo ni Rina*, *ni Wis jo Suami*, *da Sol jo ni Nayla*, *da Jup*, Ises, Iil, Uswah dan keluarga yang tidak dapat sebutkan namanya satu persatu. Penulis mengucapkan terima kasih atas doa, bantuan moril dan materil, canda-tawa, motivasi dan hal-hal yang membuat penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada kelurga besar dari pihak Mama, Ayek Lobak alm. (Kakek) dan Nidar (Nenek), *Mak Tuo* (Dinar) dan *Pak Tuo* (Yul), *Etek Farida* dan *Pak Etek* (Dt. Inyiek Rajo Lelo), *Etek Puro* dan *Pak Etek* (Dt. Mantiko), *Etek Titik* dan *Pak Etek* Siril, serta adik-adik Iyon, Igip, Ari, Iqbal, Inef, Wiwi, Yora, dan sanak saudara yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih juga atas doa, motivasi dan bantuan moril maupun materil yang telah diberikan.

Untuk B&W Community, Bunda Yenny Narny dan Bapak Zairi Waldani (terima kasih untuk semuanya Buk/Pak atas semua bentuk bantuan yang telah diberikan, semua itu tidak akan bisa penulis lupakan dan mudah-mudahan Allah balas

dengan balasan yang berlipat ganda, terkhusus buat Bapak (*klo ado permintaan KOA, bisa pak sms ka nomor HP wak pak, huahaha*). Buat Dede, Juju, Saidiman (Us), Keken, Ade, terima kasih atas semua kelapangan, canda-tawa yang pernah kalian berikan, walaupun B&W sudah hancur lebur, kenangan-kenangan itu tidak akan pernah terlupakan. (Lebay).

Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada teman-teman seperjuangan yang telah mendapat gelar S.S dan S.Hum lebih dahulu: Ermayulis, Erita, Risa, Lola, Lira, Sarjulis, Andre, Andi, Afrizal, Cici, Dede, Helma Fitri, Ria, Siska, dan Anik (semoga kita menjadi orang-orang yang berguna bagi Nusa dan Bangsa). Dan untuk teman-teman yang masih berjuang untuk menyelesaikan skripsi, penulis ucapan selamat berjuang dan *jan maengak-engak juo lai* : Abrar, Adhi Marsekal, Ade, Ayu, Eko, Erlin, Erik, Gilang, Haolongan, Hendra, Karto, Novi, Obert, Oksa, Riko, Satria, Tya, Wahyu, Winda. Terkhusus buat Riko (Singo), Eko (Gambuang/Babi Impor I), Abrar (Babi Impor II), Ade (Gawuik), Wahyu (tangkurak), *yo ndak mangecek den dek kalian lai do, samantang pun baitu den ndak akan malupoan jaso2 kalian nan lah maminjam kan motor, piti dan barang2 yang lain. Nan sado alah nyo tu sangat membantu denai dalam menjalani hidup di Kota Padang yang metropolis ini.*

Tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih juga pada para senior angkatan 98 (om Buser), angkatan 2001, 2002, 2003 (bg Adek sebagai BP wajib, bg Riki, bg Topik, bg Kusasi, bg Kari dan akak serta abg yang tidak bisa disebutkan satu persatu), untuk angkatan 2004 (*bg eko pusek, Ulil, Riki dan abg2 serta uni2 yang tidak dapat penulis sebutkan satu-satu*). Untuk angkatan 2005 (bg Raden, Ronal, Toyib,

dan Abg2 serta uni2 yang tidak bisa penulis sebutkan juga satu persatu). Seterusnya buat Teman-teman angkatan 2007, 2008 (Hengki, Widi, Dila, Buya, Paul dkk), 2009 (Liza, Cici, Adel, Resti, Sarah (Maaf kalau dalam pergaulan sehari-hari penulis sering menyakiti dan menyinggung hati kalian), Satria, Romi, Abrar, Baim dkk), buat teman-teman 2010 (Frans I, Frans II, Petak, Amaik, Deded,dkk), dan untuk angkatan 2011 (Dila, Ivan, Depi dkk). Dan untuk abang/teman yang biasa nongkrong di Mabes, Bang Abenk, Bang On, Bang Babay, Arif, Riki Bading, Proyo, Pekki, Yori dan teman/abang lainnya yang tidak dapat sebutkan satu-persatu.

Buat teman-teman kost *ni* Yanti, Ade, Edo, Gian, Dedi, Igles, Buluk, (*baraja banal ah main KOA dulu dih, bisuak baru main wak*), Didik, Pak Jala (alm.) *Bang Eka Uni* Yanti, *Uni* Roni, *Uni* Nita dan Masyarakat Binuang Kmpng. Dalam yang pernah bergaul dengan penulis selama penulis tinggal di sanan. Dan untuk teman-teman kost Buk Sas, Dede Hikto Feri, S.Hum (Pakenk) dan Ardiansyah, S.Hum (Terima kasih karena telah banyak memberikan bantuan moril dan materil serta telah dengan senang hati berbagi ruang di kamar yang sempit ini), Oki, Arif, Rido, Amit dan Pentoel. Terkhusus buat Kawasaki Ninja (Supra X) terima kasih banyak karena telah mempermudah urusan kami.

Terima kasih juga penulis ucapkan pada Mona Dwi Salfitri (yang telah mau menjadi teman curhat), Dini Aulia (yang telah mengajarkan penulis tentang dalamnya arti cinta dan sayang), dan teristimewa buat Taira (yang telah mau menunggu penulis ujian, mudah-mudah semuanya indah sebagaimana yang kita harapkan, amin). Tentunya masih banyak pihak-pihak lain yang membantu penulis dalam

menyelesaikan skripsi ini, terutama buat nara sumber penulis yang sengaja tidak penulis tulis namanya satu persatu dengan tujuan dan maksud yang tertentu. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas informasi dan keterangan yang sangat berharga, terima kasih juga atas hidangan yang pernah diberikan saat penulis melakukan wawancara. Mudah-muhan Allah membalaas dengan balasan yang berlipat ganda amin.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Namun penulis selalu berusaha untuk menjadi baik dari yang terbaik, walaupun penulis sadari dalam diri ini banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritikan yang membangun dari para pembaca dami perbaikan dimasa yang akan datang. Akhirnya, penulis mengucapkan kata terima kasih.

Padang, 14 April 2012

Penulis

## **ABSTRAK**

### **Gerakan Penumpasan Terhadap PKI di Sawahlunto/Sijunjung, Sumatera Barat 1965-1966**

Penelitian ini berjudul "*Gerakan Penumpasan Terhadap PKI di Sawahlunto/Sijunjung, Sumatera Barat 1965-1966*". Studi ini memberikan gambaran tentang bagaimana proses perkembangan, kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh PKI dan ormasnya, memberikan gambaran tentang penumpasan terhadap PKI dan ormasnya, serta dampak yang ditimbulkan setelah penumpasan terjadi.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian sejarah yang terdiri dari heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi. Sebagai penulisan sejarah, penulisan ini tidak hanya menggunakan sumber tertulis akan tetapi juga didukung oleh sumber lisan. Sumber lisan ini didapat melalui wawancara dengan orang-orang yang terlibat PKI atau masyarakat umum yang mengetahui kejadian tersebut.

Penumpasan terhadap PKI di Sawahlunto/Sijunjung menarik dikaji karena daerah tersebut merupakan salah satu basis PKI di Sumatera Barat, selain itu menariknya kajian ini juga karena minimnya penulisan mengenai penumpasan PKI tingkat lokalitas. Terdapat ± 15000 orang anggota ataupun simpatisan PKI di Sawahlunto/Sijunjung, keadaan ini dipengaruhi oleh kondisi sosial masyarakat Sawahlunto/Sijunjung yang terdiri dari buruh tambang dan buruh tani yang menjadi salah satu orientasi dari aliran komunis. Selain itu, juga karena latar belakang sejarah pemberontakan komunis yang terjadi di Silungkang pada 1926/1927, faktor ini menyebabkan komunisme bukanlah hal baru bagi masyarakat Sawahlunto/Sijunjung, sehingga PKI tidak sulit berkembang di daerah ini.

Dari penelitian yang dilakukan ini, didapatkan kesimpulan : Pertama, PKI mulai lebih eksis dipanggung sejarah Sumatera Barat umumnya dan Sawahlunto/Sijunjung khususnya setelah terjadinya penumpasan PRRI. Kedua, dalam penumpasan terhadap PKI yang terjadi di Sawahlunto/Sijunjung terdapat beberapa tindak kekerasan dan pembunuhan. Ketiga, tindak kekerasan tersebut dilakukan oleh polisi dan sebagian kecil tentara sebagai aparat pengamanan sipil, dalam proses penangkapan polisi dibantu oleh hansip yang merupakan aparat keamanan nagari. Keempat, satu hal yang membedakan pola penumpasan terhadap PKI di Sawahlunto/Sijunjung, yaitu penumpasan tidak dibarengi oleh aksi massa berupa pembakaran kantor dan atribut PKI, penggeroyokan dan pembunuhan massal, seperti yang terjadi di Pariaman, Pesisir Selatan dan daerah-daerah lain di Jawa dan Bali.

## DAFTAR ISTILAH

Administratif	: segala sesuatu mengenai administrasi.
Agresif	: bersifat atau bernafsu menyerang.
Akademis	: bersifat ilmiah.
<i>Atheis</i>	: tidak bertuhan.
Birokrasi	: aturan administrasi.
Diskriminasi	: pembedaan perlakuan terhadap sesama warga negara.
<i>Distrik</i>	: daerah bagian dari kabupaten yang pemerintahannya dipimpin oleh wedana pada masa Kolonial Belanda .
<i>Ethnic Cleansing</i>	: pengusiran massal dan pembunuhan satu kelompok etnis atau agama di suatu daerah oleh kelompok lain etnis atau agama di daerah itu.
<i>Feminisme</i>	: gerakan wanita yang menuntut persamaan hak sepenuhnya antara kaum wanita dan pria.
<i>Feodalisme</i>	: paham atau aliran yang menggunakan sistem sosial atau politik yang memberikan kekuasaan yang besar kepada golongan bangsawan.
<i>Genocide</i>	: pembunuhan sistematis terhadap seorang kelompok ras atau budaya tertentu.
<i>Holocaust</i>	: tindakan pemusnahan massal dan kehilangan kehidupan yang ditujukan untuk menghancurkan golongan tertentu.
Ideologi	: pandangan hidup, cara berpikir seseorang atau suatu golongan/kelompok masyarakat.
<i>Imperialisme</i>	: paham atau aliran yang menggunakan sistem penjajahan (penguasaan) dari suatu negara terhadap negara lain, yang bertujuan untuk kepentingan negara penjajah.
Intensif	: secara sungguh-sungguh dan terus menerus dalam mengerjakan sesuatu hingga memperoleh hasil yang optimal.
Instruksi	: perintah.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Sejak tanggal 30 September 1965 sampai pertengahan tahun 1966 terjadi pertumpahan darah di Indonesia yang diaktori oleh PKI (Partai Komunis Indonesia), militer dan kelompok-kelompok Islam.<sup>1</sup> Ujung dari peristiwa tersebut adalah munculnya aksi penghancuran terhadap PKI sampai ke akar-akarnya. Orang-orang PKI yang aktif maupun tidak aktif dibunuh, dianiaya, dan ditahan tanpa proses persidangan. Mereka dianggap sebagai penghianat negara dan pancasila.<sup>2</sup>

Soeharto dengan dukungan rakyat yang anti PKI mengambil tindakan membubarkan PKI dan ormas-ormasnya. Pembersihan dilakukan dengan menangkap, menahan, dan membunuh siapa saja yang dianggap PKI dan simpatisan PKI.<sup>3</sup> Penumpasan juga dilakukan di Sawahlunto/Sijunjung, semua yang berbau PKI diberantas. Penumpasan yang dilakukan oleh militer, bermula dengan pengejaran, penangkapan dan tindak kekerasan terhadap tokoh-tokoh PKI ataupun terhadap orang yang hanya ikut-ikutan. Daerah ini merupakan salah satu dari basis PKI di Sumatera Barat, selain Pariaman.

Pengalaman masa lalu Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung memperlihatkan adanya kegiatan radikal yang terkait dengan pemberontakan PKI melawan

<sup>1</sup> Robert Cribb, *Pembantaian PKI di Jawa dan Bali 1965-1966* (Yogyakarta : Mata Bangsa, 2000), hlm. 38-39.

<sup>2</sup> I. G. Krisnadi, *Tahanan Politik Pulau Buru 1969-1979* (Jakarta : PT LP3ES Indonesia, 2000), hlm. 10.

<sup>3</sup> Untuk lebih jelas lihat J. Pohan , *Siapa Kudeta?* (Tanpa kota : Indonesia Baru, 1998), hlm. 4.

Belanda pada tahun 1926/1927, sehingga paham komunis masih mempengaruhi pola pikir masyarakat yang diwarisi turun-temurun.<sup>4</sup> Selain itu disaat penumpasan PRRI di Sumatera Barat oleh aparat militer dari Teritorium Diponegoro, digunakan sebagai kesempatan untuk menyebarkan pengaruh komunis di Sawahlunto/Sijunjung.<sup>5</sup>

Selama Rezim Suharto sangat tabu membicarakan tema tentang PKI. Pasca runtuhnya rezim Orde Baru dan Indonesia memasuki era reformasi yang membolehkannya adanya kebebasan berpendapat, berbicara dan berkarya, sehingga membuka peluang untuk mengkaji hal-hal yang dianggap tabu selama ini, termasuk permasalahan yang berhubungan dengan aktivitas dan penumpasan PKI yang telah disebarluaskan oleh TNI pada masyarakat umum. Fenomena ini menjadi salah satu alasan menariknya kajian ini dilakukan.

Keberadaan PKI oleh rezim Orde Baru diberi label sebagai sesuatu yang bersifat *atheis* (tidak bertuhan), jahat, biadab dan tidak bermoral. Penulisannya dalam bentuk apapun selalu dibatasi oleh rezim Orde Baru. Keadaannya berbeda dengan saat sekarang, yang tidak lagi melarang penelitian tentang pemberontakan PKI, aksi penumpasan, sejauhmana dan siapa yang melakukan tindak kekerasan terhadap PKI.<sup>6</sup>

Banyak karya atau tulisan yang dibuat pada masa Orde Baru mengenai PKI, terdapat aroma pendiskriminasi yang menyolok. Pemerintah sebagai

<sup>4</sup> Audrey Kahin, *Dari Pemberontakan ke Integrasi, Sumatera Barat dan Politik Indonesia 1926-1998* (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2005), hlm. 314.

<sup>5</sup> Rika Wahyuni, "Zainar : Biografi Seorang Aktifis Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani) di Sungai Sariak Kabupaten Padang Pariaman Pada Tahun 1958-2008", *Skripsi* (Padang : Fakultas Sastra Universitas Andalas, 2010), hlm. 31.

<sup>6</sup> Jhon Roosa, *Dalah Pembunuhan Massal : Gerakan 30 September dan Kudeta Suharto* (Jakarta : Hasta Mitra, 2008), hlm. 1-4.

pengendali negara, mencoba untuk mempengaruhi masyarakat dengan melahirkan karya yang menyatakan bahwa PKI adalah suatu yang harus dimusnahkan, suatu yang harus dibenci. Tulisan yang berimbang tentang PKI di Sumatera Barat ditulis oleh Audrey Kahin dalam tulisannya yang berjudul *Dari Pemberontakan ke Integrasi, Sumatera Barat dan Politik Indonesia 1926-1998*.<sup>7</sup> Kahin menulis bahwa PKI adalah salah satu organisasi politik yang tumbuh dalam perdebatan hangat antar berbagai golongan di Sumatera Barat, namun mampu memberikan gerakan yang signifikan bagi kemajuan gerakan nasionalisme di Sumatera Barat. Hal ini terlihat melalui peristiwa Pemberontakan Silungkang yang dimotori PKI dalam melawan Pemerintah Kolonial Belanda.

Tulisan lain adalah yang ditulis oleh Saafrudin Bahar dalam disertasinya yang berjudul “Peranan Elit Sipil dan Militer dalam Dinamika Integrasi Nasional di Indonesia (Kasus Etnik Minangkabau di Daerah Sumatera Barat 1945-1984)”. Saafrudin Bahar membahas bahwa penumpasan PKI di Sumatera Barat lebih didorong oleh gerakan massa yang tidak lagi menginginkan PKI tumbuh di Sumatera Barat.<sup>8</sup> Analisis ini banyak digunakan dalam banyak penulisan atas penumpasan PKI di Indonesia pada masa tersebut, yang membedakannya hanya daerah penelitian saja.

Selain itu Mestika Zed, Eddy Utama dan Hasril Chaniago melihat ada indikasi pembalasan dendam oleh orang-orang yang selamat pada peristiwa PRRI dalam pemberantasan PKI di Sumatera Barat, alasannya adalah di saat PRRI

<sup>7</sup> Audrey Kahin, *op.cit.*, hlm. 314.

<sup>8</sup> Saafrudin Bahar, “Peranan Elit Sipil dan Militer dalam Dinamika Integrasi Nasional di Indonesia (Kasus Etnik Minangkabau di Daerah Sumatera Barat 1945-1984)”, *Disertasi* (Yogyakarta : Universitas Gadjah Mada, 1996), hlm. 410-510.

terjadi, yang menentang pada umumnya adalah orang-orang yang beraliran komunis.<sup>9</sup> Saat situasi berbalik, orang-orang PRRI menggunakan kesempatan tersebut. Asvi Warman Adam menerangkan bahwa kalau ada pemuda atau rakyat lain yang melakukan pembunuhan dalam rangka pembasmian PKI itu adalah setelah kedatangan militer dari pusat ke daerah.<sup>10</sup>

Pasca runtuhnya rezim Orde Baru banyak lahir tulisan yang lebih bersifat PKI sentris, karena sumber-sumber yang umum mereka pakai adalah dari korban-korban “penindasan”. Tulisan itu lahir dari korban itu sendiri, seperti yang terungkap dalam memoar-memoar dari para korban penindasan Orde Baru. Hersri Setyawan dalam *Memoar Pulau Buru* memberikan gambaran tidak manusiawinya perlakuan pemerintah terhadap orang-orang yang dituduh PKI, mereka disiksa dan tenaga mereka dikuras.<sup>11</sup> Tulisan tersebut juga membahas bahwa mereka yang menjadi tahanan tidak mendapatkan tempat atau makanan yang layak sebagai seorang manusia, saat mereka melakukan kesalahan maka mereka akan disiksa tanpa ampun, di saat sakit pun mereka tidak diberi obat, melainkan disiksa, sepertinya itulah obat bagi seorang tahanan politik. Suatu tindakan yang nyata-nyata melanggar hak asasi manusia.<sup>12</sup>

Tulisan lain adalah yang ditulis oleh Hasan Raid yang berjudul *Pergulatan Muslim Komunis : Otobiografi Hasan Raid*, memaparkan panjang lebar mengenai

<sup>9</sup> Mestika Zed (dkk), *Sumatera Barat di Panggung Sejarah 1945-1995* (Sumatera Barat : Bidang Penerbitan Khusus Panitia Peringatan 50 Tahun RI Sumatera Barat, 1992), hlm. 310-412.

<sup>10</sup> Asvi Warman Adam, “1965: Tahun yang Tak Pernah Berakhir” dalam Dewi Fortuna Anwar (ed), *Konflik Kekerasan Internal; Tinjauan Sejarah, Ekonomi-Politik, dan Kebijakan di Asia Pasifik* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, LIPI, LASEMA-CNRS dan KITLV-Jakarta, 2005), hlm. 34.

<sup>11</sup> Hersri Setyawan, *Memoar Pulau Buru* (Magelang : Indonesiatera, 2004), hlm. 20-201.

<sup>12</sup> *Ibid.*,

PKI pada masa pemberontakan 1926-1927, menjelaskan bagaimana terjadinya pemberontakan, dan menggambarkan bagaimana jatuh bangunnya PKI menjelang terjadinya peristiwa 1965, dan perlakuan yang dialami setelah peristiwa tersebut.<sup>13</sup> Terlihat bahwa karya tulis ini merupakan reaksi dari tulisan-tulisan yang dibuat masa Orde Baru. Sangat menarik mengkaji hal yang selama Rezim Suharto disembunyikan, seiring dengan kebebasan yang didapat, tentunya akan melahirkan fenomena baru yang selama ini belum terpahami oleh masyarakat luas.

Hermawan Sulistyo dalam bukunya yang berjudul *Palu Arit di Ladang Tebu*. Ia telah menguraikan panjang lebar mengenai tindak kekerasan terhadap PKI yang terjadi di Jawa Timur. Pemuda Ansor menjadi titik sentral dalam pembunuhan yang terjadi di Jawa Timur. Motif penguasaan atas industri gula menjadi bagian yang tidak terpisahkan atas konflik politik yang terjadi dan hal ini memberikan peluang pada terjadinya tindak pembunuhan ketika pemerintah memberi ruang pada adanya akses bagi terjadinya tindak kekerasan.<sup>14</sup>

I. G. Krisnadi dalam bukunya *Tahanan Politik Pulau Buru 1966-1979*, yang menjelaskan situasi sebelum penumpasan PKI terjadi sampai pada suasana yang dialami oleh para anggota PKI pada masa-masa rehabilitasi yang sarat dengan pelanggaran hak azazi manusia. Orang-orang yang dituduh PKI dibagi menjadi menjadi beberapa golongan, yaitu golongan A, B, dan C, dan hukuman yang mereka alami pun disesuaikan dengan golongan yang diberikan terhadap mereka. Menurut Krisnadi biasanya yang paling berat dihukum adalah orang-

<sup>13</sup> Hasan Raid, *Pergulatan Muslim Komunis : Otobiografi Hasan Raid* (Yogyakarta : LKPSM-Syarikat, 2001), hlm. 1-525.

<sup>14</sup> Hermawan Sulistyo, *Palu Arit di Ladang Tebu* (Jakarta : KPG, 2000), hlm. 12-143.

orang yang digolongkan menjadi golongan A, dalam hal ini mereka biasanya dibunuh di tempat atau dieksekusi di dalam penjara tanpa mendapatkan pengadilan atas tuduhan yang diberikan. Suatu tindak ketidakadilan yang didapatkan oleh orang-orang yang dituduh sebagai PKI yang disahkan oleh pemerintah saat itu.<sup>15</sup>

Baskara T. Wardana dkk, dalam bukunya *Menguak Misteri Kekuasaan Suharto*, menjelaskan kekejaman rezim Orde Baru dalam melakukan kekerasan terhadap orang-orang yang dianggap bertanggung jawab terhadap peristiwa 1 Oktober 1965. Pemerintah memberikan hukuman mati, bahkan ikut dalam aksi pembunuhan massal, pelecehan, kekerasan baik fisik maupun mental yang dialami oleh orang-orang PKI selama tahanan. Setelah mereka dibebaskan pun, pelanggaran HAM belum berhenti dilakukan oleh pemerintah dengan mendiskriminasi dan menstigmatisasikan mereka, dengan memberikan tanda “ET” terhadap bekas tahanan politik Orde Baru itu, yang bertujuan untuk mempersulit hidup dan mempersempit ruang gerak dari orang-orang PKI.<sup>16</sup>

Tulisan lain mengenai penangkapan dan pemberantasan PKI yang terkait dengan daerah Sumatera Barat adalah tulisan Rika Wahyuni yang berjudul “Zainar : Biografi Seorang Aktivis Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani) di Sungai Sariak Kabupaten Padang Pariaman Pada Tahun 1958-2008. Tulisan ini memberikan gambaran tentang kegiatan Gerwani sebagai salah satu ormas PKI,

---

<sup>15</sup> I. G Krisnadi. *Tahanan Politik Pulau Buru 1969-1979* (Jakarta : PT. LP3ES Indonesia, 2000.), hlm. 5.

<sup>16</sup> Baskara T. Wardana (dkk), *Menguak Misteri Kekuasaan Suharto* (Yogyakarta : Galang Press, 2007), hlm. 5-100.

menjelaskan bagaimana proses penumpasan terhadap PKI, dan tindakan apa saja yang dialami mereka selama masa penahanan.<sup>17</sup>

Semua karya tulis tentang penumpasan PKI yang lahir sebagian besar berbicara dalam skop nasional, dan sedikit yang membahas pada tingkat lokalitas. Hal ini menyebabkan kesulitan dalam melihat sejauh mana kekerasan terhadap PKI terjadi di seluruh wilayah di Indonesia. Dalam konteks itulah penulisan ini mencoba untuk membicarakan proses penumpasan terhadap PKI pada tingkat lokalitas. Tulisan ini diberi judul “**Gerakan Penumpasan Terhadap PKI di Sawahlunto/Sijunjung, Sumatera Barat 1965-1966**”.

## B. Pembatasan dan Perumusan Masalah

Batasan spasial yang diambil adalah wilayah Sawahlunto/Sijunjung, yang merupakan salah satu basis PKI di Sumatera Barat selain Pariaman. Batasan waktu yang diambil adalah dari tahun 1965-1966, hal ini dilakukan karena penulis merasa bahwa pada tahun 1965-1966 adalah masa-masa dilakukannya penumpasan PKI di Sawahlunto/Sijunjung.

Untuk lebih memperjelas permasalahan dalam penulisan ini maka dikemukakan beberapa pertanyaan yaitu :

1. Bagaimanakah situasi politik di Sumatera Barat umumnya dan di Sawahlunto/Sijunjung khususnya sebelum peristiwa 30 September 1965 dan gerakan apa sajakah yang dilakukan oleh anggota PKI di Sawahlunto/Sijunjung?

---

<sup>17</sup> Rika Wahyuni, *op,cit.*, hlm. 50-77.

2. Tindakan apa saja yang dilakukan terhadap orang-orang PKI di Sawahlunto/Sijunjung setelah gagalnya Gerakan 30 September 1965?
3. Dari kalangan manakah pelaku penumpasan terhadap PKI di Sawahlunto/Sijunjung?

### C. Tujuan Penulisan

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk melihat situasi politik di Sumatera Barat dan di Sawahlunto/Sijunjung pada kurun waktu 1950 sampai 1960-an. Dalam konteks itu pulalah dipelajari gerakan yang dilakukan oleh PKI di Sawahlunto/Sijunjung guna meluaskan pengaruhnya.
2. Melihat proses penumpasan dan tindakan apa saja yang dialami oleh orang-orang PKI pada saat penumpasan pasca gagalnya kudeta 1965.
3. Untuk mengetahui latar belakang sosial dari pelaku-pelaku yang melakukan penumpasan terhadap PKI di Sawahlunto/Sijunjung.

### D. Kerangka Analisis

Penumpasan adalah sebuah tindakan pemusnahan secara fisik maupun pikiran yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap pihak yang lain. Biasanya penumpasan ini dilakukan dengan cara kekerasan. Kekerasan dalam arti sempit adalah suatu tindakan yang keras atau dengan pemaksaan untuk membubarkan dan memusnahkan sesuatu, sedangkan dalam artian luas adalah sesuatu tindak penganiayaan baik fisik maupun psikis terhadap seseorang ataupun kelompok. Menurut Galtung sebagai mana yang dikutip oleh Thomas Santoso kekerasan

adalah suatu tindakan menyakiti dan penekanan. Ia membagi kekerasan itu pada dua bagian, yang pertama kekerasan fisik, dalam kekerasan fisik ini tubuh manusia disakiti secara jasmani dan sampai pada pembunuhan, dan yang kedua adalah kekerasan psikologis, yaitu merupakan suatu tekanan yang meredusir kemampuan mental atau otak.<sup>18</sup>

Peristiwa yang terjadi di Indonesia lebih berlatarbelakang politik dan tidak adanya sebuah ideologi formal dunia yang mempengaruhi peristiwa tersebut. Kalau pun ada ideologi yang mempengaruhi, maka pengaruh tersebut dibarengi dengan rasa balas dendam, pertualangan, dan lain-lain, sehingga sangat sulit untuk mencari konsep penumpasan yang tepat untuk kasus Indonesia.<sup>19</sup> Colombijn mengatakan bahwa dalam kasus yang terjadi di Indonesia komunis diposisikan sebagai musuh bersama. Konsep ini disebut *the construction of the outsider* yaitu : identifikasi sosial dengan prasangka terhadap orang lain dan identifikasi ekstrim yang mereka lakukan untuk mengevaluasi kelompok mereka dan kelompok lain.<sup>20</sup>

Kasus penumpasan atau tindak kekerasan yang terjadi pada sebuah negara, akan mengindikasikan bahwa negara tersebut ikut ambil bagian dan melegitimasi proses pembantaian tersebut. Fenomena itu oleh Colombijn disebut dengan *the legitimacy of violence*, yang dimaksud dengan konsep ini adalah : kontrol negara terhadap suatu kekerasan yang bertujuan untuk mengatasi gangguan yang

---

<sup>18</sup> Thomas Santoso, *Kekuasaan dan Kekerasan* , Dalam *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik* ( Surabaya : Fisipunair, 2001), hlm. 89-102.

<sup>19</sup> Robert Cribb, *Pembantaian PKI di Jawa dan Bali 1965-1966*, op.chit., hlm. 28-30.

<sup>20</sup> Freek Colombijn, "Explaining the Violent Solution in Indonesia", *The Brown Journal of World Affairs, Volume IX, Issue 1. 2002*, hal. 52, lihat juga Susan T. Fiske, "Stereotyping, prejudice, and discrimination", di Daniel T. Gilbert (eds.) *The Handbook of Social Psychology 2* (Boston : McGraw-hill, 1998), hlm. 357-411.

mengancam posisi mereka.<sup>21</sup> Dalam hal ini negara berdiri pada satu posisi yang sangat memungkinkan untuk memberikan legitimasi atas pembantaian yang terjadi.

Selain konsep kekerasan, konsep yang tepat digunakan untuk mengkaji kasus yang terjadi di Sawahlunto/Sijunjung adalah konsep yang dipaparkan oleh Colombijn yaitu *the construction of the outsider* dan *the legitimacy of violence*, karena tidak banyaknya terjadi pembunuhan dalam penumpasan yang terjadi di Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung.<sup>22</sup> Kedua konsep ini digunakan untuk melihat siapa dan bagaimana konsep *the construction of the outsider* diarahkan untuk menjadikan PKI sebagai musuh bersama dan *the legitimacy of violence* untuk melihat di mana posisi negara dalam peristiwa tersebut.

Dalam proses penumpasan PKI di Indonesia terjadi beberapa tindak kekerasan, yang terjadi tidak hanya kekerasan fisik yang menimbulkan korban jiwa, tetapi juga kekerasan psikologis. Begitupun dengan proses penumpasan terhadap PKI di Sawahlunto/Sijunjung. Terdapat tindak kekerasan, baik kekerasan fisik maupun kekerasan psikologis, dan juga terjadi beberapa pembunuhan.

## E. Metode Penelitian dan bahan Sumber

Dalam penelitian sejarah ada suatu metode yang digunakan. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah. Ada beberapa langkah yang terdapat dalam metode sejarah.<sup>23</sup> Tahap pertama adalah kegiatan pengumpulan sumber, dengan melakukan studi pustaka dan studi lapangan. Studi

<sup>21</sup> Freek Colombijn *op.cit.*, hlm. 51.

<sup>22</sup> Wawancara dengan Tan Malaka tanggal 10 Mei 2010.

<sup>23</sup> Louis Gootschalk, *Mengerti Sejarah* (terj. Nugroho Notosusanto) (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 33-35.

kepustakaan ini dilakukan untuk mendapatkan literatur tentang permasalahan yang diteliti. Literatur yang merupakan sumber sekunder, yang tertuang dalam buku-buku, karya ilmiah, artikel koran, majalah, skripsi dan *thesis* yang menulis tentang proses pemberantasan PKI di Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung, dan informasi tentang situasi Sawahlunto/Sijunjung sebelum PRRI meliputi 1948-1965.

Studi pustaka ini telah dilakukan di Perpustakaan Pusat Universitas Andalas, Fakultas Ilmu Budaya Unand, Perpustakaan Nasional Provinsi Sumatera Barat, Perpustakaan Jurusan Ilmu Sejarah Unand, Perpustakaan Universitas Negeri Padang, dan Perpustakaan, Dokumentasi dan Arsip Kabupaten Sijunjung. Selain itu juga dilakukan pencarian arsip pada instansi pemerintah Kabupaten Sijunjung, Kodim (Komando Distrik Militer) Sijunjung, Koramil (Komando Rayon Militer) setiap kecamatan yang ada di Sijunjung, serta arsip-arsip pribadi yang dimiliki oleh anggota PKI atau pihak yang ikut dalam proses pemberantasan PKI. Selain itu studi pustaka telah dilakukan ke pustaka pribadi dosen-dosen ilmu sejarah terkait dengan topik yang dibicarakan.

Di samping data tertulis, juga dilengkapi dengan data lisan yaitu data yang diperoleh dengan cara wawancara. Wawancara dilakukan terhadap pelaku sejarah yang memiliki pengalaman terkait dengan permasalahan yang dibicarakan, seperti dengan para pejabat pemerintahan saat itu mulai dari tingkat kabupaten sampai pada pemerintahan nagari. Beberapa anggota PKI yang masih hidup, seperti Johar H. S dan Harun, yang pernah merasakan proses penangkapan dan kemudian dipenjarakan, serta orang-orang yang berkaitan dengan proses pemberantasan PKI

seperti dari kalangan militer dan lapisan masyarakat lain juga diwawancara. Terkait dengan masalah sumber sejarah, maka sumber yang digunakan sejarah itu ada dua, sumber primer dan sumber sekunder.

Setelah mengumpulkan sumber dan data, dilakukan kritik sumber, kritik ini ada dua, yaitu kritik ekstern dan kritik intern. Kritik ekstern adalah menyangkutkritik yang dilakukan diluar isi sumber, sedangkan kritik intern adalah kritik menyangkut isi sumber. Data yang telah dikritik ini kemudian diinterpretasikan, dan dari hasil interpretasi ini akan muncul fakta. Setelah itu dilakukan langkah terakhir yaitu historigrafi atau penulisan ilmiah.

#### **F. Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi ini terdiri dari lima bab. Bab I yaitu pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan penulisan, kerangka analisis, metode penelitian dan bahan sumber serta sistematika penulisan.

Bab II berisi tentang gambaran umum tentang daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung meliputi pembentukan Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung, Sawahlunto/Sijunjung masa reevolusi kemerdekaan dan perkembangan politik Sumatera Barat dan politik Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung tahun 1950-1960-an.

Bab III membahas tentang pergolakan daerah dan perkembangan PKI. Pembahasan meliputi Sawahlunto/Sijunjung dan pergolakan PRRI, koalisi militer dan PKI di Sawahlunto/Sijunjung, dan perkembangan, gerakan, struktur kepartaian dan organisasi massa PKI di Sawahlunto/Sijunjung.

Bab IV membahas soal penumpasan terhadap PKI di Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung, bentuk tindak kekerasan yang dilakukan, dan juga dibahas tentang pelaku penumpasan. Bab V adalah kesimpulan, dalam bab ini penulis merangkum seluruh pembahasan dalam penulisan ini menjadi satu kesimpulan.



## BAB II

### SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG SEBELUM PRRI

#### A. Pembentukan Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung

Pada masa pemerintahan Hindia Belanda, berdasarkan reorganisasi yang dilakukan oleh pemerintahan kolonial Belanda pada tahun 1913, Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung adalah bagian dari wilayah *Afdeeling* Tanah Datar. Wilayah Sawahlunto/Sijunjung masih dibagi menjadi *Onderafdeeling* Sawahlunto dan *Onderafdeeling* Sijunjung<sup>1</sup>, dan pada tahun 1929 pemerintah kolonial Belanda kembali melakukan perombakan daerah administratif *Residentie Sumatera's Westkust*. Perombakan ini memisahkan wilayah Sawahlunto/Sijunjung kedalam 2 *Afdeeling*, yaitu *Onderafdeeling* Sijunjung masuk *Afdeeling* Tanah Datar dan *Onderafdeeling* Sawahlunto berada dalam *Afdeeling* Solok. Dalam perkembangan selanjutnya dilakukan lagi reorganisasi pemerintahan tahun 1935 menempatkan Sawahlunto/Sijunjung dalam *Afdeeling* Solok<sup>2</sup>, keadaan ini sampai masa pemerintahan Jepang. Pusat pemerintahan Kabupaten (*Bunsyu cho*) Solok berkedudukan di Sawahlunto.

Setelah kemerdekaan berdasarkan *Besluit* No. R.I/I tertanggal 8 Oktober 1945, Kepala Pemerintah Republik Indonesia Daerah Sumatera Barat memutuskan bahwa keresidenan ini dibagi menjadi 8 Luhak. Salah satunya adalah Luhak Solok, dan Sawahlunto/Sijunjung menjadi kewedanaan yang merupakan

<sup>1</sup> Gusti Asnan, *Pemerintahan Sumatera Barat Dari VOC hingga Reformasi* (Yogyakarta: Citra Pustaka, 2006), hlm. 72.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 74-79.

unit administratif di bawah Luhak, yaitu Kewedanaan Sawahlunto dan Kewedanaan Sijunjung.<sup>3</sup>

Pada tanggal 16-17 April 1946 disepakati untuk membagi Provinsi Sumatera menjadi tiga Sub-Provinsi, salah satunya adalah Sumatera Tengah yang mencakup Keresidenan Sumatera Barat, Riau, dan Jambi. Tiga bulan setelah pembentukan Provinsi Sumatera Tengah, pemerintah pusat mengeluarkan UU No. 22 tentang Pemerintahan Daerah, dengan keputusan ini wilayah Sawahlunto/Sijunjung masuk kedalam Kabupaten Talang yang sebelumnya merupakan Luhak Solok dan Luhak Tanah Datar.<sup>4</sup>

Akibat Agresi Militer Belanda II, rancangan daerah otonomi berdasarkan Undang-Undang No. 22/1948 Kabupaten Talang tidak sempat direalisasikan. Dalam peristiwa ini, Belanda berhasil menangkap Bupati Jamalus Yahya. Dengan ditangkapnya bupati Kabupaten Talang saat itu, berarti administrasi pemerintahan agak sedikit macet. Untuk melanjutkan perjuangan rakyat, Gubernur Militer daerah Sumatera Barat dengan Surat Keputusan No. 49/GM/Inst.tanggal 18 Februari 1949 dan berdasarkan pertimbangan strategi perjuangan, Kewedanaan Sijunjung dan Kewedanaan Sawahlunto disatukan untuk menguatkan pemerintahan dalam masa perang.<sup>5</sup>

Dari penyatuan tersebut terbentuklah satu Kabupaten Militer Sawahlunto/Sijunjung dengan Tan Tuah Gelar Bagindo Ratu yang menjadi Bupati Militer pertama yang berpangkat Mayor Tituler, diangkat pada tanggal 18

<sup>3</sup> *Ibid.*, hlm. 126-128.

<sup>4</sup> *Ibid.*, hlm. 129-131.

<sup>5</sup> Armyin An (dkk), *Sejarah Perjuangan Rakyat Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung 1833-1950* (Sijunjung : Inforkom, 2004), hlm. 6-9.

Februari 1949. Semenjak itu Wilayah Sawahlunto/Sijunjung telah menjadi kabupaten tersendiri. Pada tanggal 3 Maret 1949 bertempat di rumah M. Jamil Dt. Anta Dirajo di Tanjung Bonai Aur diadakan rapat dengan acara pembagian daerah administratif, menentukan Staf Bupati Militer, dan pejabat-pejabat kabupaten serta pejabat untuk masing-masing daerah.<sup>6</sup>

Hasil keputusan rapat tanggal 3 Maret 1949 adalah membentuk empat daerah kewedanaan di Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung yaitu:<sup>7</sup>

1. Kewedanaan Sawahlunto berkedudukan di Sawahlunto.
2. Kewedanaan Tanjung Ampalu berkedudukan di Tanjung Ampalu.
3. Kewedanaan Sijunjung berkedudukan di Sijunjung.
4. Kewedanaan Batanghari berkedudukan di Sungai Dareh.

Luas daerah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung pada tahun 1966 sekitar 609.153 Km<sup>2</sup>, kabupaten ini merupakan daerah nomor tiga terluas setelah Kabupaten Pasaman (7.835,40 Km<sup>2</sup>) dan Kabupaten Solok (7.084,20 Km<sup>2</sup>) atau 14,43 % dari luas Provinsi Sumatera Barat. Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung terletak antara : 0. 40' 30" – 1. 7' 8" Lintang Selatan dan 100. 42' 30" – 101. 44' 20" Bujur Timur. Struktur daerah membujur dari utara ke selatan, bagian utara berbatasan dengan Kabupaten Tanah Datar, sebelah selatan berbatasan dengan Bungo Tebo Provinsi Jambi, sebelah timur berbatasan dengan Indragiri Hilir

<sup>6</sup> Nasution, "Pemekaran Wilayah Di Sumatera Barat :Studi Tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya (1999-2005)", Skripsi (Padang : Fakultas Sastra Unand, 2009), hlm. 27.

<sup>7</sup> Ibid., hlm. 156.

Provinsi Riau, sedangkan sebelah barat berbatasan dengan Kodya Sawahlunto dan Kabupaten Solok.<sup>8</sup>

Daerah ini berada lebih kurang 100 – 1200 M permukaan laut, sehingga suhunya antara 25° – 32° C. Yang terdiri dari daerah perbukitan yang terletak pada bagian barat dan barat laut Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung, sebelah utara dan timur laut dilalui oleh bukit barisan, sedangkan sebelah selatan dan timur merupakan daerah datar dan dataran rendah yang merupakan daerah aliran sungai.<sup>9</sup>

Secara administratif sejak tahun 1949-1970 wilayah ini di bagi menjadi 9 Kecamatan, yaitu Kecamatan Talawi, Sawahlunto, IV Nagari, Koto VII, Sumpur Kudus, Sijunjung, Tanjung Gadang, Pulau Punjung, dan Kecamatan Koto Baru. Ada 4 kecamatan perwakilan yang terdiri dari Kecamatan Perwakilan Koto Baru yang berkedudukan di Sungai Rumbai yang meliputi 19 desa, Kecamatan Perwakilan Pulau Punjung yang berkedudukan di Koto Agung meliputi 17 desa, Kecamatan Perwakilan Tanjung Gadang yang berkedudukan di Kamang meliputi 25 desa, dan Kecamatan Perwakilan Sijunjung yang berkedudukan di Sungai Jodi Lubuk Tarok meliputi 11 buah desa.<sup>10</sup>

Sampai tahun 1970 hampir tidak terjadi perubahan daerah administrasi di Sumatera Barat. Sepinya pembentukan daerah administratif baru banyak ditentukan oleh kegaduhan politik yang terjadi di daerah ini khususnya dan Indonesia pada umumnya selama dekade 1960-an. Kalaupun ada perubahan maka

<sup>8</sup> Bappeda Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung, *Sawahlunto/Sijunjung Dalam Angka 2002* (Sawahlunto/Sijunjung : Bappeda Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung 2004), hlm. 2.

<sup>9</sup> Armyin An (dkk), *op.cit.*, hlm. 1-6.

<sup>10</sup> *Ibid.*

itu hanya merupakan pengukuhan atas perubahan status Kota Besar dan Kota Kecil (Kotapraja) menjadi Kotamadya. Perubahan itu dilakukan pada tahun 1966.<sup>11</sup>

### B. Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Pada Masa Revolusi Kemerdekaan

Selama abad ke-20 telah terjadi banyak pemberontakan di Minangkabau terhadap rezim yang berkuasa, 3 diantaranya yaitu pemberontakan pajak terjadi tahun 1908. Pemberontakan lain terjadi di Silungkang yang dimotori oleh PKI yang terjadi pada tahun 1926/1927 dalam, dan pemberontakan PRRI yang terjadi tahun 1958-1961.<sup>12</sup> Semua pemberontakan yang terjadi ini merupakan dampak dari rasa ketidakpuasan terhadap penguasa yang bertindak semena-mena.

Selain itu juga disebabkan oleh sifat kritis yang telah terpatri dalam sanubari masyarakat Minangkabau. Hal ini juga dilatar belakangi oleh pengaruh yang datang dari luar, yaitu ideologi. Dalam pemberontakan Silungkang misalnya dimotori oleh ideologi komunis, yang memberikan gagasan bahwa kesengsaraan yang menimpa rakyat datang dari penguasa kolonial, sehingga membangunkan masyarakat untuk melawan dan menghancurkan kolonialisme.<sup>13</sup>

Perjuangan dalam menentang penjajahan berlanjut pada masa pendudukan Jepang. Penyerangan ini berguna untuk menghambat laju tentara Jepang untuk memasuki wilayah Sawahlunto/Sijunjung. Setelah Jepang mencoba untuk mendekati rakyat untuk mendukung mereka. Kesempatan ini digunakan rakyat

---

<sup>11</sup> Gusti Asnan, *op.cit.*, hlm.141.

<sup>12</sup> Mestika zed, *Pemberontakan Komunis Silungkang 1927 : Studi Gerakan Sosial di Sumatera Barat* (Yogyakarta : Syarikat Indonesia, 2004), hlm. 10-30.

<sup>13</sup> Armyin An (dkk), *op.cit.*, hlm. 105.

untuk membina kekuatan sendiri melalui Tyosan, Syusankai, Gyugun, Koenkai dan Koenbu.<sup>14</sup>

Proklamasi Kemerdekaan oleh Sukarno-Hatta pada tanggal 17 Agustus 1945 di Jakarta disambut secara positif oleh penduduk Sawahlunto/Sijunjung. Mereka mengibarkan Bendera Merah Putih pertama kali di Kewedanaan Sawahlunto pada tanggal 20 Agustus 1945, kemudian dilakukan pula di Sijunjung pada hari berikutnya. Pengibaran itu dilakukan oleh pemimpin-pemimpin pemuda Sijunjung, seperti Ramli Marzuki dan Ibrahim. Kegiatan mereka pada awalnya ditolak Yoenus selaku Demang Sijunjung,<sup>15</sup> namun antusiasme masyarakat Sawahlunto/Sijunjung dalam menyambut kemerdekaan tidak dapat dihalangi.<sup>16</sup>

Pada awal kemerdekaan di Kewedanaan Sawahlunto dibentuk organisasi Pemuda Republik Indonesia (PRI) pada setiap nagari. Anggota PRI terdiri dari para pemuda nagari yang semasa pendudukan Jepang menjadi anggota Bogoran.<sup>17</sup> Anggota PRI ini hampir setiap sore mengadakan latihan kemiliteran di samping melakukan pengawalan nagari, dan sesekali berkumpul di nagari atau ke Sawahlunto untuk mendengarkan wejangan dan penjelasan mengenai kemerdekaan. Sehubungan dengan Maklumat pemerintah Republik Indonesia (RI) tertanggal 3 November 1945 tentang pembentukan partai-partai politik. Partai politik atau organisasi boleh membentuk lasykar atau barisan rakyat guna berjuang mempertahankan kemerdekaan.<sup>18</sup>

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, hlm. 19.

<sup>15</sup> *Ibid.*,

<sup>16</sup> *Ibid.*,

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 89-96.

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 108.

Partai-partai politik dan organisasi yang ada di Sumatera Barat beserta barisan yang dimilikinya adalah Majelis Syura Muslimin Indonesia (MASYUMI)/Barisan Sabilillah, Partai Komunis Indonesia (PKI)/Tentara Merah Indonesia (TEMI), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSII), Partai Politik Tarikat Islam (PPTI)/Barisan Tentara Allah (BATA) dan Barisan Janggut, Partai Tarbiyah Islamiyah (PERTI)/Laskar Muslimin dan Muslimat Indonesia, Partai Nasional Indonesia (PNI), Majelis Tinggi Kerapatan Adat Alam Minangkabau (MTKAAM)/Barisan Hulu Balang Indonesia (BHBI), Muhammadiyah/Barisan Hizbulullah.<sup>19</sup>

Kehadiran partai-partai dan organisasi itu memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk aktif dalam kegiatan memperkuat perjuangan mempertahankan kemerdekaan dan memberikan keamanan terhadap masyarakat. Pada bulan Maret 1946 setiap barisan ini mengadakan latihan kemiliteran di nagari masing-masing dan untuk komandan-komandannya dilatih di Bukittinggi, Padang Panjang dan Batusangkar, sehingga saat itu terlihat latihan-latihan ala Jepang yang dilakukan di bawah terik matahari.<sup>20</sup>

Perjuangan pada masyarakat Sawahlunto/Sijunjung pasca kemerdekaan dibagi pada dua wilayah, yaitu wilayah Kewedanaan Sawahlunto dan Kewedanaan Sijunjung.<sup>21</sup> Pada agresi militer I yang terjadi antara 21 Juli 1947-4 Agustus 1947 di Kewedaaan Sawahlunto tidak begitu merasakannya, karena

<sup>19</sup> Armyin An (dkk), *op,cit.*, hlm. 112-113. Lihat juga Audrey Kahin, *Dari Pemberontakan ke Integrasi : Sumatera Barat dan Politik Indonesia 1926-1998* (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2005), hlm. 171. Akan tetapi tidak ada keterangan lebih lanjut mengenai berapa jumlah anggota dari setiap partai politik dan organisasi yang ada saat itu.

<sup>20</sup> Armyin An (dkk), *op,cit.*, hlm. 115-119.

<sup>21</sup> Pembagian pembahasan ini dilakukan karena dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan terjadi pada 2 wilayah, sebelum kabupaten Sawahlunto/Sijunjung terbentuk.

penyerangan yang dilakukan oleh tentara Belanda berhasil ditahan oleh Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Padang. Hal ini menyebabkan pada penyerangan Belanda pascakemerdekaan belum merambah ke Sawahlunto/Sijunjung.<sup>22</sup>

TKR yang merupakan perubahan nama dari Badan Keamanan Rakyat (BKR) terbentuk tanggal 23 Agustus 1945 yang sebagian anggotanya adalah dari bekas Gyugun, Heiho, Seinandan dan Bogodan berdiri pula di Kewedanaan Sijunjung. Dengan TKR ini dibentuk, terjadi penarikan terhadap anggota TKR ke Batusangkar, yang menyebabkan kekosongan tentara di Kewedanaan Sijunjung. Penarikan ini dilakukan untuk mengawasi pergerakan tentara Belanda menuju Bukittinggi.<sup>23</sup> Dengan demikian yang tersisa hanya Polisi Tentara (PT) yang pada saat itu dipimpin oleh Mayor M. Yanis. Pada tanggal 31 Agustus 1945 di Kewedaaan Sijunjung dibentuk Komite Nasional Indonesia (KNI), anggota KNI ini terdiri dari anggota partai-partai politik seperti : MASYUMI, Partai Sosialis, PKI, MTKAAM, PPTI, PEMSI dan cerdik pandai.<sup>24</sup>

Seperti halnya di Kewedanaan Sawahlunto, di Sijunjung juga terdapat barisan atau organisasi yang berafiliasi dengan partai politik seperti : Barisan Hizbulah, Tentara Merah Indonesia (TEMI), Barisan Hulubalang, dan Barisan Tentara Allah (BATA). Semua barisan ini dikoordinir oleh *Volk Front* yang kemudian menjadi dewan perjuangan. Dewan perjuangan ini bertugas mengatur dan memenuhi permintaan tenaga bersama logistik serta senjata yang dikirim ke medan pertempuran Padang area. Barisan-barisan ini dikirim secara bergantian.<sup>25</sup>

---

<sup>22</sup> Armyin An (dkk), *op.cit.*, hlm. 115-119.

<sup>23</sup> *Ibid.*,

<sup>24</sup> *Ibid.*, hlm. 115.

<sup>25</sup> *Ibid.*, hlm. 117-118.

Dalam perjuangan menghadapi Agresi Militer Belanda I, masyarakat banyak membantu, baik bantuan fisik maupun logistik, khususnya masyarakat Sawahlunto/Sijunjung dikumpulkan sumbangan-sumbangan baik berupa natura/makanan untuk dikirim ke Medan Padang Area. Pengumpulan dan pengiriman ini dikoordinir oleh kewedanaan-kewedanaan masing-masing. Selain itu, di Sawahlunto/Sijunjung juga sering dilakukan latihan-latihan militer yang bertujuan untuk berjaga-jaga menghadapi kemungkinan penyerangan Belanda pada gelombang berikutnya.<sup>26</sup>

Tidak lama berselang, setelah perjanjian Renville dilanggar, kembali Belanda melakukan penyerangan yang lebih dikenal dengan Agresi Militer II. Agresi militer yang diadakan pada tanggal 19 Desember 1948 ini berhasil memasuki daerah Sawahlunto/Sijunjung. Keesokan harinya Belanda membom Solok dengan kapal-kapal terbang, sasaran utama dari penyerangan itu adalah Danau Singkarak, karena Belanda bermaksud untuk menguasai daerah tersebut untuk mendaratkan pesawatnya.<sup>27</sup>

Serangan Belanda semakin gencar, akhirnya Belanda berhasil menguasai Solok. Kemungkinan Belanda akan semakin meluaskan serangannya, untuk itu diadakan konsolidasi pasukan pada tanggal 24 Desember 1948. Konsolidasi ini menghasilkan keputusan untuk mempersiapkan pertahanan di daerah Setangkai, yang bertujuan untuk menjadikan Lintau sebagai basis perbekalan.<sup>28</sup>

Tanggal 28 Desember 1948 Komandan Resimen III Kuranji Mayor Ahmad Husein melakukan pengecekan ke daerah Tanjung Ampalu dalam usaha

<sup>26</sup> *Ibid.*, hlm. 120.

<sup>27</sup> *Ibid.*,

<sup>28</sup> *Ibid.*,

untuk menyusun siasat dan pertahanan. Dalam usaha pertahanan ini, jembatan Sungai Lasi dihancurkan guna menghalangi penyerangan pasukan tentara Belanda sampai ke Sawahlunto. Dengan dikuasainya Solok, pasukan Belanda mendapatkan keuntungan dalam melakukan penyerangan ke Sawahlunto.<sup>29</sup>

Pada tanggal 30 Desember Belanda bergerak menuju Sawahlunto dengan menelusuri rel kereta api, yang didahului pasukan infanteri baret hijaunya. Belanda berhasil menembus Sawahlunto setelah terjadi pertempuran di Guguk Sarai. Belanda mendapatkan perlawanan yang sengit, sehingga terpaksa mendatangkan bala bantuan dari solok dengan mendatangkan pasukan lapis baja, selain itu mereka juga dilindungi oleh pesawat-pesawat tempur.<sup>30</sup>

Dengan menduduki Sawahlunto, Belanda mendapatkan akses yang mudah menuju Sijunjung, walaupun dalam perjalannya Belanda mendapatkan perlawanan yang kuat. Perang gerilya yang diterapkan pejuang lokal yang mengandalkan senjata tradisional membuat Belanda kocar kacir. Di kewedanaan Sijunjung reaksi yang dilakukan seiring dengan kedatangan Belanda adalah dengan diadakannya rapat Badan Pengawal Negeri dan Kota (BPNK) di Surau Batu Pahat, Aur Gading. Kapten Zainuddin membentuk front-front pertempuran, yaitu Batu Arang yang dikomandoi oleh Letnan Salim Halimi yang daerahnya meliputi aliran Sungai Ombilin Talawi-Sawahlunto-Palangki-Muaro Bodi dan Tanjung Ampalu.<sup>31</sup>

Selain itu, pemerintahan daerah juga membentuk angkatan pemuda. Pemuda tersebut diasramakan di nagari-nagari masing-masing dan kapan saja

<sup>29</sup> *Ibid.*

<sup>30</sup> *Ibid.*, hlm. 126.

<sup>31</sup> *Ibid.*

mereka bisa dikerahkan ke medan pertempuran yang terdiri dari 2 kelompok, yaitu kelompok pemuda yang tergabung ke dalam BPNK dan pemuda ekstrimis atau gerilya. Kelompok pemuda ekstrimis ini dikirim ke medan pertempuran dan kelompok pemuda yang tergabung ke dalam BPNK yang bertugas mengadakan penjagaan dan sewaktu-waktu menghadapi kegiatan musuh yang masuk. Mereka adalah pasukan anti spionase, yang akan memata-matai penyusupan mata-mata Belanda yang tergabung dalam *Intelejen Dienste* (ID).<sup>32</sup>

Agresi militer kedua yang dilakukan Belanda, berhasil menguasai pusat pemerintahan RI di Yogyakarta. Untuk menyelamatkan pemerintahan RI terpaksa pemerintahan dipindahkan ke daerah Sumatera Barat yang dikenal dengan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI).<sup>33</sup> Dalam perjalannya staf PDRI dibawah pimpinan Syafrudin Prawiranegara sampai di Sumpur Kudus, yaitu sebuah nagari yang terletak di pedalaman. Selama melakukan tugasnya, pemerintahan darurat dikawal oleh semua tentara lokal di Sumatera Barat dan daerah Sawahlunto/Sijunjung. Mereka melakukan penjagaan yang ketat kepada PDRI. Laskar, barisan dan front pemuda bersama tentara nasional, melakukan perlawanan terhadap Belanda.<sup>34</sup>

Pada tanggal 16 Februari 1949 tentara Belanda mengadakan patroli ke Padang Lawas dan langsung membakar rumah-rumah rakyat. Kegiatan ini tercium oleh staf PDRI di Sisawah, sehingga lewat radio pasukan yang dipimpin oleh A . Wahid meninjau ke Padang Lawas. Peninjauan tersebut juga tercium oleh pasukan

---

<sup>32</sup> Audrey Kahin, *op,cit.*, hlm. 213-215.

<sup>33</sup> *Ibid.*,

<sup>34</sup> Muhammad Rasjid, *Di Sekitar Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDR)* (Jakarta : Penerbit Bulan Bintang, 1982), hlm. 42-45.

Belanda, sehingga Belanda melakukan patroli ke Tanjung Ampalu pada tanggal 25 Februari 1949. PDRI tidak lama berada di Sawahlunto/Sijunjung, karena khawatir diketahui Belanda.<sup>35</sup>

PDRI selalu berjalan menelusuri semak dan hutan belantara demi menyelamatkan pemerintahan dan kemerdekaan. Perjuangan dari hutan ke hutan ini berakhir setelah Sukarno mengumumkan gencatan senjata tertanggal 17 Agustus 1949. Di Sumatera Barat sendiri dilakukan perundingan antara pejabat-pejabat Republik dan Belanda untuk mengatur keberangkatan pasukan Belanda dan pergantian kedudukannya oleh tentara dan pasukan keamanan RI.<sup>36</sup>

### C. Peta Politik Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung Sebelum PRRI

Sumatera Barat memasuki tahun 1950-an dengan berbagai respon, daerah yang secara etnis relatif homogen ini, terpecah ke dalam berbagai kelompok sosial dan aliran politik. Perpecahan tersebut meruncing seiring dengan perbedaan yang sangat tajam antara satu aliran dengan aliran lainnya. Hal ini menyebabkan terbelahnya masyarakat ke dalam berbagai kelompok sosial, berbagai organisasi masyarakat dan partai politik yang pada masa perjuangan juga telah terbentuk.<sup>37</sup> Respon masyarakat dalam menyambut era baru tersebut juga terimplementasikan ke dalam kebebasan dalam mengutarakan pendapat, terutama yang terkait dengan aktifitas politik, dibuktikan dengan pembentukan partai politik dan lembaga legislatif daerah (tingkat provinsi) dan juga tingkat nagari.<sup>38</sup>

<sup>35</sup> Audrey Kahin, *op.cit.*, hlm. 215.

<sup>36</sup> *Ibid.*

<sup>37</sup> Gusti Asnan, *Memikir Ulang Regionalisme Sumatera Barat Tahun 1950-an* (Jakarta : Yayasan Obor Indonesia dan KITLV, 2007), hlm. 15-16.

<sup>38</sup> *Ibid.*,

Masyarakat Sumatera Barat umumnya dan masyarakat Sawahlunto/Sijunjung khususnya terbagi ke dalam beberapa kelompok sosial dan politik. Pertama adalah kelompok alim ulama, dalam tatanan masyarakat Minangkabau, ulama merupakan salah satu kelompok yang penting dalam masyarakat. Kaum ulama ini telah membantu terbentuknya perubahan politik, sosial, ekonomi dan budaya daerah, mulai dari masa perjuangan sampai pada era 1950-an.<sup>39</sup>

Seluruh masyarakat menaruh hormat dan mengagungkan kelompok sosial yang pertama ini, karena di satu sisi mereka beranggapan bahwa ulama adalah perpanjangan tangan nabi dan rasul dalam berdakwah. Tentunya masyarakat selalu mendengarkan apa yang dikatakan para ulama, karena dalam garis primordialisme ulama adalah penentu dari hukum agama (Islam). Hal ini digunakan oleh alim ulama sebagai jalan berpolitik dengan adanya Masyumi, Perti dan partai atau organisasi Islam lainnya.<sup>40</sup>

Kedua adalah kaum penghulu, sama halnya dengan kaum ulama, kaum penghulu juga merupakan lapisan terpenting dalam tatanan masyarakat Minangkabau, yang memiliki nuansa adat yang kental. Masyarakat Sumatera Barat pada umumnya dan masyarakat Sawahlunto/Sijunjung khususnya menempatkan kaum penghulu sebagai orang-orang yang berpengaruh dalam urusan adat dan kemasyarakatan. Untuk menanamkan pengaruhnya kaum

---

<sup>39</sup> *Ibid.*, hlm. 35-36.

<sup>40</sup> *Ibid.*, hlm. 35-36.

penghulu membentuk Majelis Tinggi Kerapatan Adat Alam Minangkabau (MTKAAM), sebagai wadah resmi dalam memperjuangkan aspirasi rakyat.<sup>41</sup>

Pada perkembangannya MTKAAM ini terbagi menjadi 2 bagian, yaitu kelompok tua (konvensional) dan kelompok baru (modernis). Akan tetapi, pada dasarnya kedua kelompok adat ini memiliki tujuan yang sama yaitu untuk mempertahankan adat dan tradisi masyarakat, yang kemudian secara sengaja atau tidak sengaja berubah arah dari organisasi sosial kepada organisasi politik dalam menyampaikan aspirasi masyarakat.<sup>42</sup>

Ketiga adalah pemuda pelajar dan mahasiswa adalah lapisan masyarakat yang lahir semenjak Belanda melakukan politik etis dengan mengadakan pendidikan bagi masyarakat pribumi. Pendidikan yang pada awalnya ditujukan untuk membantu Belanda dalam urusan administrasi, ternyata pada perkembangannya selanjutnya mengalami pergeseran-pergeseran yang merugikan Belanda. Pemuda terpelajar tersebut dalam masa perjuangan memberikan kontribusi positif dalam membangun kebisuan masyarakat atas sistem kolonial yang diterapkan oleh penjajah.<sup>43</sup>

Mereka ikut ambil bagian dalam perlawanan fisik melawan Belanda dalam Agresi Militer Belanda II dalam wadah BPNK. BPNK inilah yang menjadi tulang punggung alat-alat pemerintahan dan menjadi kekuatan utama dalam memelihara ketertiban dan keamanan nagari. Pasca masa revolusi fisik pemuda Sumatera

<sup>41</sup> Untuk lebih jelasnya lihat Gusti Asnan, *ibid.*, hlm. 26-27.

<sup>42</sup> *Ibid.*,

<sup>43</sup> *Ibid.*, hlm. 35-39. Adapun organisasi pemuda yang menjadi wadah bagi para pemuda dan pelajar dalam menggabungkan diri dalam organisasi masyarakat antara lain adalah Ikatan Pemuda Pelajar Indonesia Sumatera Tengah (IPPI-ST), Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Persatuan Pemuda Islam Seluruh Indonesia (Porposi), Front Pemuda Indonesia (FPI), Sekretariat Pemuda Pejuang, Pemuda Rakyat dan Pemuda Demokrat.

Barat lebih banyak mengarahkan pandangan mereka pada soal-soal politik dan banyak terlibat dalam kegiatan-kegiatan politik.<sup>44</sup>

Keempat adalah kaum perempuan, merupakan salah satu masyarakat yang yang memiliki perhatian yang tinggi terhadap soal-soal dan permasalahan politik. Mereka tidak bisa dilepaskan dari kejadian historis daerah, dan peran mereka pun tidak kalah jika dibandingkan dengan peran pemuda, ulama dan kaum adat. Kaum perempuan berperan besar dalam meningkatkan peran serta perempuan dalam lapisan sosial, ekonomi, budaya dan politik.<sup>45</sup>

Dalam masalah sosial perempuan merupakan tonggak kuat dalam memobilisasi anak-anak dan menjaga rumah tangga, dalam ekonomi perempuan menjadi penetral dalam keutuhan ekonomi keluarga, dalam sistem budaya perempuan menjadi sosok bunda kandung yang menjadi tolak ukur dan penjaga keseimbangan adat, dan dalam masalah politik perempuan memperjuangkan hak-hak perempuan dalam berpartisipasi politik. Pada masa 1950-an sebagai lanjutan dari masa sebelumnya banyak organisasi perempuan seperti Bundo Kanduang, Aisyiyah, dan Perti Puteri.<sup>46</sup>

Dalam era baru ini selain organisasi masyarakat juga tersebar partai politik sebagai wadah murni dalam berpolitik. Ada partai yang lahir di zaman pergerakan dan revolusi fisik, semua partai politik tersebut merupakan tempat yang sah bagi

---

<sup>44</sup> *Ibid.*

<sup>45</sup> *Ibid.*, hlm. 43-46. Antara lain organisasi perempuan yang terbesar kurun 1950-an adalah Aisyiyah, Bundo kandung, Gerakan Pemuda Pelajar Islam Indonesia (GPII) Wanita, Naisiyatul Aisyah, Pelajar Puteri Islam Indonesia, Perpindo Puteri, Perti Puteri, Perwari, Wanita Muslimat, puteri dan Wanita Sedar/Gerakan Wanita Sedar (Gerwis) yang pada akhirnya menjadi Gerwani.

<sup>46</sup> Tidak diketahui tokoh-tokoh dari organisasi perempuan tersebut, karena minimnya arsip dan terbatasnya sumber lisan. Wawancara dengan Suryanis pada tanggal 24 Juli 2011.

masyarakat dalam menyampaikan aspirasi. Sebagian besar partai politik adalah cabang dari pusat, hanya ada sebagian kecil dari partai politik yang terdapat di daerah (Sumatera Barat). Partai yang berskala nasional adalah Masyumi, Murba, PKI, Partai Sosialis, PSII, Perti dan PNI.<sup>47</sup>

Semua partai ini senantiasa berebut pengaruh di tingkat daerah, yang kadangkala berbenturan dengan partai lokal seperti MTKAAM dan lain sebagainya. Persaingan partai politik di tingkat daerah seperti di Sawahlunto/Sijunjung tidak terlalu kentara, perjalanan politik berjalan dengan biasa saja. Hal ini disebabkan karena masyarakat tidak memiliki pengetahuan yang banyak tentang politik atau juga disebabkan karena kekurang-percayaan terhadap partai dan organisasi massa yang tersebar saat itu. Riak-riak politik tidak terlalu terasa di tingkat Sawahlunto/Sijunjung, hal ini dibuktikan dengan hanya 21 orang anggota DPRDS tahun 1951 di Sawahlunto/Sijunjung, yang diketuai oleh Syafii Idris.<sup>48</sup>

Persaingan partai politik menjelang Pemilu 1955 di Sumatera Barat terasa sangat kental, konferensi-konferensi dan aktifitas politik telah dilakukan saat memasuki akhir tahun 1952-1953, konferensi itu dilakukan untuk membicarakan berbagai permasalahan yang dialami dan berbagai rancangan program yang akan dilakukan oleh partai politik. Partai yang sering melakukan konferensi adalah partai Masyumi, pertama kali dilakukan pada 7 April 1950 dan konferensi berturut-turut diadakan tahun 1953, 1954 dan 1957.<sup>49</sup>

---

<sup>47</sup> Untuk lebih jelas lihat Lampiran I.

<sup>48</sup> Lihat lampiran II.

<sup>49</sup> Gusti Asnan, *op.cit.*, hlm. 76-79.

Masyumi sering melakukan pertemuan mengingat Masyumi merupakan partai besar di daerah Sumatera Barat. Kebesaran partai ini dibuktikan dengan 3 orang wakil yang ditempatkan di DPRST, demikian juga sebaliknya dari hasil pembentukan DPRDS untuk seluruh kabupaten yang terdapat di Sumatera Barat pada tahun 1951, Masyumi sangat dominan dan hampir menempatkan wakilnya di semua kabupaten di Sumatera Barat.<sup>50</sup>

Masyumi memiliki 6 orang wakilnya dari 21 anggota DPRD di Sawahlunto/Sijunjung. Selain itu, wakil golongan masyarakat yang berafiliasi dengan Masyumi seperti GPII, Muhammadiyah dan Aisyah juga memiliki wakil yang lumayan besar di DPRDS seluruh kabupaten di Sumatera Barat, adapun jumlah suara yang diperoleh oleh kelompok-kelompok ini adalah sebanyak 28 orang, total suara yang diperoleh Masyumi diperkirakan sebanyak 171 orang, yang artinya wakil Masyumi menguasai lebih dari separuh anggota legislatif kabupaten di Sumatera Barat. Wakil dari organisasi massa PKI pada tahun 1951 di DPRDS kabupaten se-Sumatera Barat hanyalah 16 orang, PSI 16 orang, PNI 9 orang dan MTKAAM 4 orang.<sup>51</sup>

Peta politik menjelang pemilu dan sesudah Pemilu 1955 di daerah Sumatera Barat dikuasai oleh Masyumi. Di Sawahlunto/Sijunjungpun, pada tahun ini didominasi oleh Masyumi dan partai islam lainnya. Berbeda dengan PKI, di Sumatera Barat belum banyak pengaruh PKI dan wakil PKI di DPRDS kabupaten juga belum ada, yang ada hanya PKI-Lokal Islami dan pengaruhnya minim. Hal

---

<sup>50</sup> *Ibid.*,

<sup>51</sup> *Ibid.*, hlm. 79.

ini terjadi karena pada saat itu PKI melemah karena melakukan pemberontakan Madiun 1948.<sup>52</sup>

Selain konferensi-konferensi untuk menyongsong Pemilu 1955 semua partai politik melakukan kampanye dan pendidikan politik terhadap masyarakat dengan berbagai cara, salah satunya dengan melakukan propaganda politik yang dilakukan oleh organisasi massa yang berafiliasi dengan partai politik. Seperti yang dilakukan oleh Masyumi dengan ormas kepemudaannya Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII) dan Aisyiyah. Mereka melakukan kampanye menegakkan Islam dengan melakukan pengajian-pengajian di surau-surau.<sup>53</sup> Partai-partai politik juga melakukan pendekatan dan propaganda politik ke surau-surau. Selain itu, juga dilakukan dengan mengadakan perkumpulan-perkumpulan dengan metode diskusi, sebagaimana yang dilakukan oleh PKI.<sup>54</sup>

Di Sawahlunto/Sijunjung selain melakukan kampanye secara terbuka layaknya dilakukan oleh partai-partai lain, PKI juga melakukan perkumpulan-perkumpulan di nagari-nagari yang tujuannya adalah untuk mengajak masyarakat berdiskusi dan propaganda politik untuk mencari dukungan. Di dalam acara tersebut biasanya diselingi dengan acara-acara tradisional seperti rabab, randai dan saluang. Tujuannya adalah untuk membuat masyarakat berkumpul dengan acara hiburan, dan dengan itu baru dilakukan kampanye politik.<sup>55</sup>

---

<sup>52</sup> Markas Besar ABRI, *Bahaya Laten Komunisme di Indonesia Jilid II : Penumpasan Pemberontakan PKI 1948* (Jakarta : Pusat Sejarah dan Tradisi ABRI, 1998).

<sup>53</sup> Reni Nuryanti, *Perempuan Berselimut Konflik : Perempuan Minangkabau di Masa Dewan Banteng dan PRRI* (Yogyakarta : Penerbit Tiara Wacana, 2011), hlm. 53-59.

<sup>54</sup> Wawancara dengan Jahar tanggal 29 Juli 2011.

<sup>55</sup> Wawancara dengan Amirudin tanggal 21 April 2010.

Pemilu 1955 di Sumatera Tengah diikuti oleh 44 peserta (termasuk 20 kontestan non-partai), dari 1.624.316 suara sah.<sup>56</sup> Dalam Pemilu 1955 tersebut muncul empat partai besar yaitu Masyumi, Perti, PKI dan PSII. Sistem Pemilu yang digunakan adalah sistem perwakilan berimbang atau proporsional. Tujuan yang hendak dicapai pada Pemilu 1955 adalah hendak mewujudkan keinginan rakyat yang akan menjadi dasar kekuasaan penguasa dan juga untuk membentuk konstituante yang akan menetapkan suatu UUD bagi negara Indonesia.<sup>57</sup>

Pada saat pemilu, masyarakat berbondong-bondong ke TPS, namun sebagian masyarakat mengaku bahwa mereka hanya memilih berdasarkan kedekatan pribadi (kenal) tanpa mengerti akan arti sebuah ideologi. Begitu juga halnya dengan memilih partai Masyumi, Perti dan partai Islam lainnya. Kemenangan ini diraih karena kampanye politik yang dilakukan oleh partai peserta pemilu juga memberikan hasil yang signifikan, selain itu banyaknya dukungan suara yang diberikan ormas yang berhubungan dengan partai politik tersebut.<sup>58</sup>

<sup>56</sup> Mestika Zed (dkk), *Sumatera Barat di Panggung Sejarah, 1945-1995* (Padang: Panitia Peringatan 50 Tahun RI Sumatera Barat, 1995), hlm. 126.

<sup>57</sup> Alfian Yusra, "Pemilihan Umum 1955 di Sumatera Barat : Studi Kasus Tentang Kemenangan Masyumi di Kanagarian Guguk VIII Koto, Kecamatan Guguk, Kabupaten 50 Kota", *Skripsi* (Padang : Universitas Andalas, 1998), hlm. 42.

<sup>58</sup> Salah satu partai yang memiliki ormas terbanyak dan sekaligus menjadi partai pemenang adalah Masyumi. Untuk lebih jelas lihat Alfian Yusra, *ibid.*, hlm. 33.

Tabel 1. Hasil Pemilu 1955 Kab. Sawahlunto/Sijunjung

No	Partai Politik	Perolehan Suara
1	PSII	3.077
2	NU	398
3	Masyumi/Parmusi	22.926
4	Perti	18.44
5	PNI	140
6	PKI	4.057

Sumber : Dikutip dari Alfian Yusra.<sup>59</sup>

Suatu hasil yang sangat berbeda tampak di daerah Sumatera Barat dan Sawahlunto/Sijunjung dalam hasil Pemilu 1955, partai Masyumi dan Perti menjadi pemenang, suatu hal yang wajar, karena Masyumi dan Perti merupakan partai Islam, dan mayoritas penduduk Sumatera Barat dan Sawahlunto/Sijunjung memeluk agama Islam. Hal ini menyebabkan partai-partai Islam mendapatkan kemenangan yang mudah.<sup>60</sup>

Fenomena yang menarik adalah PKI yang merupakan partai berideologi komunis yang tentunya bertentangan dengan Islam ternyata menduduki peringkat ke-3, padahal PKI sempat menurun pamornya setelah pemberontakan Madiun 1948. Karena PKI merupakan aktor utama dalam terjadinya peristiwa tersebut.<sup>61</sup> Posisi ini diraih PKI karena dukungan besar yang berasal dari organisasi buruh seperti Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI) dan organisasi yang bernaung dibawah SOBSI.<sup>62</sup>

Hal ini juga karena kondisi sosial masyarakat Sawahlunto/Sijunjung yang sebagian besar merupakan buruh pertanian/perkebunan dan buruh tani. Untuk pertanian dan perkebunan terdapat sekitar 16,71% dan tambang sekitar 5,23% dari

<sup>59</sup> *Ibid.*, hlm. 33-60.

<sup>60</sup> Wawancara dengan Mansur tanggal 2 Mei 2010.

<sup>61</sup> Markas Besar ABRI, *Bahaya Laten Komunis di Indonesia Jilid II : Penumpasan Pemberontakan PKI 1948* (Jakarta : Pusat Sejarah dan Tradisi ABRI, 1998), hlm. 21-143.

<sup>62</sup> Mestika Zed (dkk), *op.cit.*, hlm. 95.

± 630.019 Ha luas Sawahlunto/Sijunjung. Keadaan ini sebagian besar masyarakat Sawahlunto/Sijunjung bertani dan menjadi buruh tambang. Dengan ini kaum buruh sangat dominan dan PKI merupakan partai yang lebih memperhatikan buruh.<sup>63</sup>

Keadaan Negara tidak jauh berubah, dalam rangka mempersiapkan UUD baru pengganti UUD Sementara tahun 1950, secara ideologis bangsa Indonesia telah terpecah ke dalam 2 kubu, yaitu kubu Pancasila dan kubu Islam. Dalam kubu Pancasila bergabung partai-partai seperti PNI, PKI, Partai Katolik, Parkindo dan seluruh partai lain. Dalam kubu Islam bergabung partai-partai seperti partai Masyumi, NU, Perti, PSII dan seluruh tokoh perorangan terpilih yang berorientasi Islam.<sup>64</sup>

Pasca Pemilu 1955 iklim politik Indonesia berubah, seiring dengan tuntutan otonomi daerah di Sumatera Tengah (Sumatera Barat, Riau dan Jambi), juga karena berkembangnya isu komunis.<sup>65</sup> Pengaruh PKI menyebar dengan cepat di Sumatera Tengah dan Sawahlunto/Sijunjung yang notabene adalah wilayah Masyumi. Pada saat bersamaan, Masyumi makin menguatkan barisan untuk menghadapi pengaruh PKI dan pertentangan PKI-Masyumi sebenarnya sudah dimulai sebelum pemilu.<sup>66</sup>

Sebagaimana yang disinggung sebelumnya seusai pemilu terjadi perubahan drastis dalam pola kerja sama antar partai politik. Masyumi dan Perti

<sup>63</sup> Armyin An (dkk), *op.cit.*, hlm. 3. Lihat juga Zaiyardam Zubir, Pertempuran Nan Tak Kunjung Usai : Eksplorasi Buruh Tambang Batubara Ombilin Oleh Kolonial Belanda 1891-1927 (Padang : Andalas University Press, 2006), hlm. 68-92.

<sup>64</sup> Ahmad Syafi'i Ma'arif, *Studi tentang pencalonan dalam Konstituante, Islam dan masalah kenegaraan* (Jakarta: LP3ES, 1985). hlm. 453.

<sup>65</sup> Reni Nuryanti, *op.cit.*, hlm. 59.

<sup>66</sup> *Ibid.*,

sebagai pemenang 1 dan 2, hal ini menyebabkan Masyumi dan Perti bergandengan tangan dalam merumuskan beberapa kebijakan di daerah. Kerjasama tersebut diimplementasikan ke dalam kesepakatan membagi jatah kursi untuk DPRD provinsi yang akan dibentuk. Masyumi dan Perti merancang pembagian kursi di DPRD, dalam rancangan tersebut Masyumi memperoleh 16 kursi, Perti 8 kursi, PKI 4 kursi, NU 3 kursi, PSII 2 kursi, PSI 1 kursi, PPTI 1 kursi dan PII 1 kursi. Dengan rancangan ini seluruh partai selain Masyumi dan Perti menolak pembagian tersebut.<sup>67</sup>

Ketidaksetujuan PNI, NU dan PKI merupakan refleksi dari keadaaan yang terjadi di pusat. Dan ketegangan ini terwariskan ke DPRD tk II, termasuk di Sawahlunto/Sijunjung. Mau tidak mau warisan politik tersebut merembet ke daerah paling rendah. Kejadian ini berlanjut sampai Dewan banteng mengambil alih pemerintahan daerah. Pada mulanya semua partai politik di derah Sumatera Barat kecuali PKI mendukung Dewan Banteng. Keadaan ini mulai berubah setelah pergerakan Dewan Banteng dilanjutkan ke PRRI, dukungan hanya tersisa dari Masyumi dan PSI.<sup>68</sup>

Partai-partai lain yang sebelumnya mendukung, ketika pemerintah pusat melancarkan operasi militer mereka berbalik mendukung pusat. Partai-partai tersebut antara lain : Perti, PKI, NU, PNI, Murba, Partai Adat Rakyat, dan PSII. Pada awalnya situasi panas hanya terjadi di lembaga legislatif di daerah Sumatera

---

<sup>67</sup> Gusti Asnan. *Memikir Ulang Regionalisme op,cit.*, hlm. 88-89.

<sup>68</sup> *Ibid.*,

Barat, akan tetapi dengan pecahnya PRRI dan tanggapan ofensif dari pemerintah pusat menyebabkan keresahan berlanjut ke tengah-tengah masyarakat.<sup>69</sup>



---

<sup>69</sup> *Ibid.*,

## BAB III

### PERGOLAKAN DAERAH DAN PERKEMBANGAN PKI

#### A. Sawahlunto/Sijunjung dan Pergolakan PRRI

Terdapat kekecewaan di kalangan perwira bekas Divisi Banteng setelah banyak dari para perwira yang dikeluarkan dari dinas tentara dan ada yang dipindahugaskan ke tempat lain. Pada dasarnya tentara merupakan salah satu kelompok sosial yang menjadi aktor penting dalam sejarah Sumatera Barat sejak kemerdekaan sampai 1958. Cikal bakal tentara atau organisasi ketentaraan di Sumatera Barat bisa dikatakan berasal dari pembentukan Balai Penerangan Pemuda Indonesia (BPPI) Padang yang didirikan pada 25 Agustus 1945. BPPI merupakan organisasi yang menghimpun para pemuda yang mendapatkan latihan kemiliteran oleh Jepang dan juga pemuda-pemuda dari organisasi Islam dan nasionalis. Setelah itu terbentuk Badan Keamanan Rakyat (BKR).<sup>1</sup>

Pada tanggal 5 Oktober 1945 berdasarkan perintah Presiden RI, BKR diganti menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR), dengan ini merata di semua daerah Sumatera Barat didirikan TKR. Selain itu, juga lahir kesatuan tentara (milisi) yang memiliki hubungan dengan partai politik seperti Hizbullah, Lasykar Muslimin, Lasykar Muslimat, Tentara Merah Indonesia (TEMI) dan lain sebagainya.<sup>2</sup> Laskar-

<sup>1</sup> Gusti Asnan, *Mimikir Ulang Regionalisme : Sumatera Barat Tahun 1950-an* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007), hlm. 77-103.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 159-167

laskar ini berperan aktif dalam mengusir penjajahan Belanda pada masa revolusi sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya.<sup>3</sup>

Setelah mereka mengorbankan jiwa dan raga dalam mempertahankan kemerdekaan, mereka menerima kenyataan pahit dengan adanya rasionalisasi. Rasionalisasi ini merupakan pencuitan pada tingkat divisi menjadi brigade, dengan hal ini terjadi pengurangan personil yang menyebabkan ribuan personil prajurit, bintara dan perwira yang dikembalikan ke masyarakat, baik secara sukarela maupun terpaksa. Keputusan ini melahirkan ketidakpuasaan yang akan membawa militer dalam lembah perpecahan, antara militer pusat dan daerah.<sup>4</sup>

Setelah perang usai, militer di daerah merasa dikesampingkan. Selain itu, banyaknya kekecewaan publik sampai pada kemacetan sistem politik pasca-revolusi, faktor Sukarno dan agitasi komunis serta ketidaksabaran lokal untuk mengambil inisiatif sendiri. Persoalan semakin rumit, tatkala masyarakat belum merasakan kesejahteraan pasca-perang, di satu sisi pemerintah masih sibuk dengan politik, tanpa memperhatikan pembangunan ekonomi yang pada dasarnya lebih dibutuhkan rakyat.<sup>5</sup>

Sisa kepedihan masa Agresi Militer Belanda II yang memporak-porandakan keadaan fisik maupun psikologis daerah, sehingga sebagian besar orang Minangkabau belum dapat merasakan nikmatnya merdeka.<sup>6</sup> Di samping itu

<sup>3</sup> Armyin An (dkk), *Sejarah Perjuangan Rakyat Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung 1833 – 1950* (Sijunjung: Inforkom, 2004), hlm. 112-145.

<sup>4</sup> Gusti Asnan, *op.cit.*, hlm. 159-167.

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 132.

<sup>6</sup> Saafrudin Bahar, "Peranan Elit Sipil dan Militer dalam Dinamika Integrasi Nasional di Indonesia (Kasus Etnik Minangkabau di Daerah Sumatera Barat 1945-1984)", *Disertasi* (Yogyakarta : Universitas Gadjah Mada, 1996), hlm. 442-478.

pembangunan infrastruktur belum dilakukan, jalanum umum sebagai sarana transportasi masih belum bagus, yang menyebabkan sistem perekonomian mandek. Beda halnya dengan keadaan di pusat yang telah banyak dilakukan pembangunan fisik.<sup>7</sup>

Gencarnya Dewan Banteng melakukan perlawanan terhadap pusat, memberikan suasana yang tegang di tengah-tengah masyarakat Sumatera Barat umumnya dan masyarakat Sawahlunto/Sijunjung khususnya. Sebagian masyarakat bingung untuk mengambil sikap, apakah ikut menentang pusat bersama Dewan Banteng atau harus tetap berpihak pada pemerintah pusat dengan keadaan yang serba sulit, terutama dalam masalah ekonomi.<sup>8</sup>

Hampir semua partai-partai mendukung Dewan Banteng, bahkan ada yang bersedia meninggalkan partai dan bergabung dalam PRRI. PKI jelas-jelas menentang aksi Dewan Banteng dan menjadi musuh utama Dewan Banteng, yang akibatnya terjadi konflik. Pihak yang menentang aksi Dewan Banteng ini adalah orang-orang komunis, sebagaimana yang diungkapkan oleh PKI di Sumatera Tengah dalam rapat 3 Januari 1957 yang ditanda tangani oleh Djambur Hamzah.<sup>9</sup>

Komite PKI tersebut menyerukan agar seluruh masyarakat dan rakyat Sumatera Tengah untuk bersatu menjaga keamanan dan kepentingan daerah serta

---

<sup>7</sup> Wawancara dengan Mansur Sami tanggal 21 Januari 2012.

<sup>8</sup> Wawancara dengan Mansur Sami tanggal 21 Januari 2012. Dalam wawancara ini Mansur Sami menjelaskan bahwa, ada sebagian masyarakat Sawahlunto/Sijunjung yang tidak simpati dengan Dewan Banteng, diantaranya adalah sebagian masyarakat Koto VII, masyarakat Kecamatan Sawahlunto dan sebagian masyarakat Sumpur Kudus.

<sup>9</sup> Mestika Zed dkk, *Ahmad Husein : Perlawanan Seorang Pejuang* (Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 2001), hlm. 250.

NKRI tanpa memberikan dukungan terhadap Dewan Banteng.<sup>10</sup> Sebagian masyarakat Sawahlunto/Sijunjung menjadi pendukung PRRI terutama orang-orang yang ada di perangkat nagari dan kecamatan yang mengetahui isu-isu politik dan sebagian dari anggota PKI cabang Sawahlunto/Sijunjung.<sup>11</sup>

Ada beberapa diantara orang-orang PKI, terutama Pemuda Rakyat yang ditangkap dan dibunuh. Seperti halnya yang terjadi di Situjuh, Suliki, Atar dan Bancah Payakumbuh. Dalam daftar pembunuhan yang terjadi banyak terdapat orang-orang Pemuda Rakyat/PKI.<sup>12</sup> Di Sawahlunto/Sijunjung tokoh-tokoh PKI yang sudah terdata, ditangkap oleh Corp Polisi Militer (CPM), sedangkan untuk anggota PKI biasa ditangkap oleh polisi-polisi setempat.<sup>13</sup>

Hampir 300 orang PKI ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara di Sawahlunto. Mengingat keadaan saat itu sulit, penjara yang sempit sehingga para tahanan berhimpit-himpitan, ditambah lagi dengan tidak mencukupinya bahan makanan yang akan diberikan. Untuk itu Mansur Sami menginstruksikan agar para tahanan ini dilepaskan dengan syarat harus menandatangani surat perjanjian dan

---

<sup>10</sup> *Ibid.*,

<sup>11</sup> Gusti Asnan, *Mimikir Ulang Regionalisme*, *op.cit.*, hlm. 76. Dari keterangan lain menyebutkan bahwa masyarakat Kec. Sumpur Kudus merupakan salah satu basis dari PRRI, dimana orang-orang PKI mendukung kegiatan PRRI dan dalam masa itu tidak terjadi tindak kekerasan yang dilakukan oleh orang-orang PRRI kepada orang PKI. Dalam artian masyarakat dengan pola pemerintahan nagari dibentuk berkepala dua, satu wali nagari ditunjuk untuk menghadapi tentara pusat dan satu lagi untuk menghadapi tentara daerah. Hal ini terjadi di nagari Kumanis yang dipimpin oleh Jamilun dan Hasim. Wawancara dengan Zubir tanggal 30 Januari 2012.

<sup>12</sup> *Ibid.*, hlm. 230-240.

<sup>13</sup> Wawancara dengan Mansur Sami tanggal 21 Januari 2012. Tidak ada data yang menjelaskan siapa tokoh-tokoh PKI yang ditangkap saat itu.

bersumpah untuk tidak melakukan sabotase, serta taat pada pemerintah yang berkuasa.<sup>14</sup>

Saat Dewan Banteng semakin meningkatkan aksi, orang-orang komunis dan pemuda rakyat dicari-cari, sehingga membuat mereka harus lari ke hutan-hutan dan bersembunyi, mereka yang dicari adalah yang tidak mendukung Dewan Banteng. Selain itu aksi perampasan hasil pertanian berupa padi juga sering dilakukan oleh orang-orang Dewan Banteng.<sup>15</sup> Sumber lain mengatakan bahwa tentara Dewan Banteng hanya meminta sumbangan kepada masyarakat, akan tetapi pada satu tempat ada indikasi bahwa Dewan Banteng melakukan perampasan.<sup>16</sup>

Dewan Banteng akhirnya mengambil alih pemerintahan daerah, Masyumi menjadi semakin agresif dalam berhadapan dengan pemerintah pusat. Kurang diresponnya suara-suara daerah yang menginginkan desentralisi, semakin sentralistiknya pengelolaan negara, ditambah lagi dengan semakin kuatnya pengaruh PKI di pentas politik nasional merupakan sebagian alasan bagi petinggi Masyumi semakin kritis terhadap pemerintah pusat.<sup>17</sup> Masyumi selalu menjadi pihak oposisi dalam setiap kebijakan pemerintah dengan asumsi bahwa pemerintah telah mengarah ke komunisme.

Letnan Kolonel Ahmad Husein menjadi Ketua Daerah di Sumatera Barat, dan untuk daerah Riau dan Jambi diberi status provinsi. Semua diskusi nasional yang

---

<sup>14</sup> Wawancara dengan Mansur Sami tanggal 21 Januari 2012.

<sup>15</sup> Wawancara dengan Jamal Tanggal 20 Maret 2011.

<sup>16</sup> Wawancara dengan Mansur Sami tanggal 21 Januari 2012.

<sup>17</sup> Lebih jelas lihat Gusti Asnan, *Mimikir Ulang Regionalisme*, op.cit., hlm. 81-87.

diprakarsai oleh pemerintah pada tahun 1957,<sup>18</sup> gagal untuk menyelesaikan hubungan antara pemerintah pusat dan Provinsi Sumatera Tengah. Akhirnya terjadi gerakan daerah didukung oleh semua orang di Sumatera Barat, kecuali PKI dan PNI, yang berkembang menjadi PRRI (Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia) yang diumumkan pada Februari 1958.<sup>19</sup>

Euphoria perlawanan terhadap pusat merambah jauh ke daerah, yang demikian juga dipengaruhi oleh propaganda yang dilakukan oleh orang-orang PRRI. Wilayah Sawahlunto/Sijunjung menjadi basis dari kegiatan PRRI, daerah ini merupakan daerah Masyumi dan Muhammadiyah layaknya sebagian besar daerah-daerah di Sumatera Barat yang aktif dalam mendukung PRRI. Bupati Sawahlunto/Sijunjung saat itu adalah Mansur Sani<sup>20</sup>, ia adalah salah seorang perwira yang aktif dalam Dewan Banteng.

PRRI bekerja sama dengan pimpinan daerah mengajak masyarakat untuk memperjuangkan daerah.<sup>21</sup> Di bawah Masyumi, Dusti Samad juga aktif dalam menggerakkan masyarakat untuk ikut mendukung PRRI, begitu juga yang dilakukan oleh Yahya Yasiruddin yang merupakan tokoh Muhammadiyah.<sup>22</sup> Selain itu, guru-guru sekolah banyak yang mendukung dan menyatakan kesetiaannya kepada PRRI.<sup>23</sup>

Pemerintah mengambil tindakan ofensif terhadap PRRI, hal ini membuat masyarakat lebih memilih untuk membenci PRRI, yang tujuannya adalah agar mereka

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 139-176.

<sup>19</sup> Safrudin Bahar, *op,cit.*, hlm. 470.

<sup>20</sup> Wawancara dengan Mansur Sami tanggal 21 Januari 2012.

<sup>21</sup> Wawancara dengan Nurbaian tanggal 20 Mei 2010.

<sup>22</sup> Wawancara dengan Amirudin tanggal 21 April 2010.

<sup>23</sup> Wawancara dengan Amirudin tanggal 21 April 2010.

bisa selamat dari ancaman tindak kekerasan dari tentara pusat. Situasi itulah yang mendorong masyarakat memilih untuk bergabung dengan partai-partai yang bisa menyelamatkan hidup mereka dari ancaman tentara, seperti memasuki PKI yang notabene merupakan partai yang dekat dengan tentara pusat.<sup>24</sup> Dari sinilah awal masyarakat Sawahlunto/Sijunjung banyak terlibat dalam kepartaian PKI, di samping kampanye politik yang telah dilakukan oleh partai PKI sebelumnya.<sup>25</sup>

## B. Koalisi Militer dan PKI di Sawahlunto/Sijunjung

Pemerintah pusat melalui Perdana Menteri Ir. Djundu mengambil keputusan untuk menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan masalah gerakan regional. Pasukan Angkatan Perang Republik Indonesia (APRI) dibawah komando Operasi 17 Agustus menyerang Padang pada 17 April 1958 dan pindah ke kota lain di Sumatera Barat.<sup>26</sup> Dalam masa itu pemuda PKI yang tergabung ke dalam Organisasi Perlawanan Rakyat (OPR) yang diperintahkan oleh APRI untuk menangkap dan melaporkan orang-orang yang diperkirakan mendukung PRRI.<sup>27</sup>

OKR/OPR ini dibentuk berdasarkan Inst-30/Peperpu 1958 tanggal 14 Juli 1958<sup>28</sup>, dalam instruksi ini disebutkan bahwa jumlah anggota OPR/OKR hanyalah berjumlah 150 orang se-Sumatera Barat, dan mereka tidak boleh terpengaruhi oleh

<sup>24</sup> Wawancara dengan Mansur Sami tanggal 21 Januari 2012.

<sup>25</sup> Wawancara dengan Zubir tanggal 30 Januari 2012.

<sup>26</sup> Audrey R. Kahin, & George McTurnan Kahin, *Subversi sebagai Politik Luar Negeri: Menyingkap Keterlibatan CIA di Indonesia* (Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, Kementerian Penerangan Republik Indonesia, 1997), hlm. 211-212.

<sup>27</sup> Rika Wahyuni, "Zainar : Biografi Seorang Aktivis Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani) di Sungai Sariak Kabupaten Padang Pariaman Pada Tahun 1958-2008", *Skripsi* (Padang : Fakultas Sastra Universitas Andalas, 2010), hlm. 30-31.

<sup>28</sup> Saafrudin Bahar, *op.cit.*, hlm. 498.

suatu golongan atau aliran. Ternyata dalam pelaksanaannya oleh Kolonel Pranoto Reksosamodara yang menjabat sebagai Panglima Komando Daerah Militer (KODAM) III/17 Agustus melebihi ketentuan dan instruksi.<sup>29</sup>

Pertama kali OPR Sawahlunto/Sijunjung dibentuk di Pamuatan yang kemudian menyebar ke seluruh nagari-nagari, di antaranya Tanjung Ampalu, Tanjung Benai Aur, Sijunjung dan Kumanis. OPR ini dilatih oleh militer yang tujuannya mengamankan nagari-nagari dari orang-orang PRRI. Rata-rata dari setiap nagari terdapat 10-15 orang yang menjadi anggota OPR yang dilatih secara kemiliteran.<sup>30</sup>

Dalam proses penumpasan PRRI, di wilayah Sawahlunto/Sijunjung terdapat hubungan yang baik antara militer dan PKI. Bukti dari kedekatan tersebut adalah tokoh-tokoh PKI yang selamat dari penangkapan yang dilakukan oleh pemerintahan Dewan Banteng dan yang mendukung aksi Dewan Banteng sebelumnya, menyambut hangat kedatangan APRI.<sup>31</sup> Setelah mendengar kedatangan APRI, PKI dan ormasnya (Pemuda Rakyat) telah melakukan penyerangan terhadap orang-orang PRRI. Hal ini terbukti dengan diambilalihnya Kecamatan Sawahlunto yang sebelumnya dikuasai oleh PRRI, pembebasan tersebut dilakukan pada tanggal 22 April 1958.<sup>32</sup>

Penyerangan ini dibawah pimpinan Sersan Mayor Baba dengan 22 orang pasukan yang dibantu oleh kaum buruh di bawah pimpinan Ngadimun, dan membuat orang-orang PRRI melarikan diri ke Talawi dan menyebar ke hutan-hutan. Pada

<sup>29</sup> Rika Wahyuni, *op.cit.*, hlm. 30-31.

<sup>30</sup> Wawancara dengan Amirudin tanggal 21 April 2010.

<sup>31</sup> Wawancara dengan Amirudin tanggal 21 April 2010.

<sup>32</sup> Wawancara dengan Ramadanil tanggal 24 April 2011.

keesokan harinya Pemuda Rakyat menjemput APRI dan membawa mereka ke Sawahlunto dan Muaro Sijunjung untuk mengantipasi serangan balasan yang dilakukan oleh PRRI. Pada tanggal 24 April 1958 APRI memburu Marasanin, Musa dan tokoh-tokoh PRRI yang berpengaruh serta orang-orang yang mendukung PRRI.<sup>33</sup>

Saat itu pemerintahan Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung di bawah pimpinan Bupati Militer Mansur Sami membagi 2 stafnya, sebagian dipindahkan ke Nagari Sumpur Kudus, mengingat daerah itu adalah termasuk daerah pendukung PRRI. Sebagian staf lagi dipindahkan ke Kecamatan IV Nagari dan ditunjuklah Zainal Arifin sebagai wedana militer. Wedana militer tersebut diberi wewenang khusus apabila situasi semakin gawat.<sup>34</sup>

Pemburuan intensif dilakukan di setiap nagari sehingga semakin menyudutkan orang-orang PRRI, di Kumanis dan Tanjung Ampalu dilakukan penyerangan serentak, memaksa pasukan PRRI melarikan diri ke Sumpur Kudus dan daerah Sisawah, bahkan sampai ke Sungai Dareh serta ke Koto Baru. Selebihnya anggota PRRI menjauh ke Muaro Labuh yang menjadi tempat penahanan anggota PKI yang sebelumnya ditangkap oleh Dewan Banteng.<sup>35</sup>

Akhir tahun 1959, daerah ini dikuasai oleh tentara pusat, seiring dengan itu PKI mengalami perkembangan yang pesat di Sawahlunto/Sijunjung. Untuk mengisi

---

<sup>33</sup> Wawancara dengan Amirudin tanggal 23 April 2011.

<sup>34</sup> Wawancara dengan Mansur Sami tanggal 21 Januari 2012.

<sup>35</sup> Wawancara dengan Amirudin tanggal 23 April 2011.

kekosongan pemerintahan, pemerintah pusat menunjuk Daranin St. Rajo Adin<sup>36</sup>, tidak lama berselang digantikan A. Rivai<sup>37</sup> sebagai Bupati Daerah Tk II Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung. Setelah itu jabatan bupati dijabat oleh Prajitno, bupati ini didatangkan dari Jawa, karena pascaPRRI pemerintah pusat meletakkan orang Jawa dalam struktur pemerintahan di Sumatera Barat.<sup>38</sup>

Perkembangan PKI dibuktikan dengan hampir seluruh pejabat pemerintahan daerah, mulai dari daerah tingkat kecamatan sampai pada pedesaan/kenagarian, diangkat dari personil PKI atau yang simpati terhadap PKI.<sup>39</sup> Orang-orang PKI yang menduduki jabatan di tingkat kecamatan antara lain adalah : Ahmad Sinaro Kuniang di Kecamatan Kotobaru, Ahmad Majo Kayo di Kecamatan Sijunjung, Katik Diran di Kecamatan Sumpur Kudus, Kamiruddin di Kecamatan Koto Tujuh, Sutan Jamiri di Kecamatan Sawahlunto, dan H. Baudin di Kecamatan Talawi.<sup>40</sup> Untuk pemerintahan

---

<sup>36</sup> Masa pemerintahan Daranin St. Rajo Adin tidak sampai 1 tahun. Dia dilantik 26 Februari 1959 dan dalam tahun 1959 langsung digantikan oleh A. Rivai. *Daftar Nama Bupati Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung dan Masa Pemerintahan*, Dokumentasi Kantor Bupati Sijunjung Provinsi Sumatera Barat.

<sup>37</sup> A. Rivai juga tidak lama menjabat sebagai bupati, masa jabatannya juga dalam tahun 1959 dan setelah itu juga digantikan oleh Prajitno. Lihat Lampiran II.

<sup>38</sup> Gusti Asnan, *Mimikir Ulang Regionalisme*, *op.cit.*, hlm. 30-80. Tidak ada keterangan lain yang menyebutkan berapa lama Prajitno menjabat sebagai bupati, karena sampai tahun 1962 bupati Sawahlunto/Sijunjung dijabat oleh 3 orang, yaitu Prajitno, R. Sadi Purwopranoto dan Mawardi. Ada keterangan yang menyebutkan bahwa dari 3 bupati diatas hanya Mawardi yang diindikasikan berasal dari PKI, karena sebelumnya Mawardi adalah camat Kecamatan Talawi. Wawancara dengan Mansur Sami tanggal 21 Januari 2012.

<sup>39</sup> Saafrudin Bahar, *op.cit.*, hlm. 506.

<sup>40</sup> Wawancara dengan Amirudin tanggal 23 September 2010. Ada beberapa kecamatan yang tidak diketahui namanya antara lain Kecamatan Empat Nagari, Kecamatan Tanjung Gadang dan Pulau Pungung.

nagari di tiap kecamatan juga di jabat oleh orang-orang PKI, dan hal ini hampir dialami oleh semua nagari yang ada di Sawahlunto/Sijunjung.<sup>41</sup>

Pengaruh PKI yang ditanamkan tidak hanya pada pemerintahan sipil belaka, tetapi juga pada pemerintahan militer Sumatera Barat. Partai ini mendapat dukungan kuat dari beberapa orang perwira Kodam III/17 Agustus.<sup>42</sup> Untuk wilayah Sawahlunto/Sijunjung merupakan wilayah dari Komando Resort Militer (Korem) 032 yang dijabat oleh Kolonel Mardjiman, yang diwakili oleh Komando Distrik Militer (Kodim) 0310.<sup>43</sup> Salah seorang personil militer yang diketahui dari PKI adalah Komandan Pleton Heru Sayadi.<sup>44</sup>

Pada dasarnya jumlah perwira yang simpati terhadap PKI hanyalah kecil, namun mereka memegang jabatan-jabatan yang strategis dalam komando dan staf.<sup>45</sup> Inilah yang menyebabkan militer dikuasai oleh PKI. Walaupun terjadi pembinaan terhadap anggota militer di Sumatera Barat, tentunya hal ini tidak menyebabkan bahwa seluruh personil militer merupakan bagian dari PKI, faktanya tidak semua jiwa

<sup>41</sup> Nagari-nagari yang dipimpin oleh orang PKI di Sawahlunto/Sijunjung diantaranya adalah nagari, Padang Laweh, Tanjung Benai aur, Surian, Durian, Durian Gadang, Pulasan, Tamparungo, Tj. Ampalu, Pamuanan dan Padang Sibusuk. Dan nagari yang masih diragukan adalah nagari-nagari yang ada di Kecamatan Pualau Punjung, Kecamatan Perwakilan Koto Baru, Kecamatan Tanjung Gadang, dan nagari Sumpur Kudus. Wawancara dengan Zubir tanggal 31 Januari 2012 dan juga wawancara dengan Amirudin tanggal 23 September 2010.

<sup>42</sup> Saafrudin Bahar, *op,cit.*, hlm. 507.

<sup>43</sup> *Ibid.*, hlm. 507. Mengenai komandan Kodim wilayah teritorial Sawahlunto/Sijunjung masih diragukan apakah berasal dari PKI atau tidak. Salah seorang Dandim yang masih diingat adalah Zulkani. Sedangkan komandan distrik yang masih diingat adalah Dandis Suratman dan Dandis Sundari. Wawancara dengan Amirudin tanggal 23 September 2010.

<sup>44</sup> Wawancara dengan Mansur Sami tanggal 21 Januari 2012.

<sup>45</sup> Saafrudin Bahar, *op,cit.*, hlm. 507-508.

militer yang berhasil dikuasai oleh pengaruh PKI. Sebagian dari mereka hanya tidak berani menentang arus.<sup>46</sup>

Penguasaan yang dilakukan oleh APRI di Sawahlunto/Sijunjung memberikan dampak yang besar dalam perpolitikan, sebagaimana yang disinggung di atas, hampir semua pejabat pemerintahan nagari diduduki oleh orang-orang PKI.<sup>47</sup> Keadaan ini membuat tokoh-tokoh dan orang-orang yang berseberangan dengan PKI berada pada posisi yang sulit, ada diantara mereka yang mengalami siksaan fisik maupun mental.<sup>48</sup> Keadaan ini juga menjadi faktor pendorong terjadinya budaya merantau bagi masyarakat yang tidak tahan dengan keadaan sulit di bawah tekanan PKI dan karena kegelisahan politik yang terjadi.<sup>49</sup>

### C. PKI di Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung

Perkembangan PKI di Sumatera Barat umumnya dan Sawahlunto/Sijunjung khususnya terjadi setelah penumpasan PRRI, indikasi ini terlihat dari situasi politik yang terjadi pada tahun 1950-an, meletusnya PRRI menjadi titik tolak dari berkembangnya PKI. Bukan berarti sebelum terjadinya pemberontakan PRRI, PKI tidak ada di Sumatera Barat. Sebelum Pemilihan Umum 1955, PKI sudah ada di Sumatera Barat, akan tetapi tidak terlalu aktif karena masih dalam proses

<sup>46</sup> Tidak dapat dikatakan bahwa militer di Sawahlunto/Sijunjung dikuasai oleh PKI, karena militer dibawah Pimpinan Kodim dan Buterpra tidak menegaskan posisi mereka, antara mendukung PKI atau tidak. Tetapi mungkin ada juga beberapa orang dari personil tersebut yang terpengaruh oleh PKI. Wawancara dengan Zubir tanggal 30 Januari 2012.

<sup>47</sup> Sebagaimana yang dibahas sebelumnya. Lihat hlm. 51.

<sup>48</sup> Wawancara dengan Zainudin tanggal 30 Januari 2012.

<sup>49</sup> Saafrudin Bahar, *op.cit.*, hlm.509.

pengembalian nama baik setelah terjadinya pemberontakan Madiun 1948.<sup>50</sup> Berbeda keadaannya dengan saat penumpasan PRRI berlangsung, tentara pusat yang datang ke daerah menyebarluaskan ideologi komunis.<sup>51</sup>

Setelah dilaksanakannya Demokrasi Terpimpin, PKI tumbuh menjadi partai politik besar yang berdampingan dengan pemerintah, sehingga saat itu PKI merupakan partai populer dan mampu menarik simpati sebagian besar masyarakat. Sebagian masyarakatnya yang bergabung dengan PKI karena hanya ingin selamat dari pembasmian PRRI dan karena memang tertarik dengan metode pendekatan yang dilakukan oleh PKI. Pascapenumpasan PRRI membangkitkan jumlah kader PKI di Sumatera Barat, dan yang menarik lagi sebagian pimpinan daerah dan wali nagari merupakan orang-orang PKI atau simpatisan PKI.<sup>52</sup>

Pemimpin PRRI, staf dan karyawan pemerintah, guru dan semua orang yang berpihak terhadap PRRI lari ke pedalaman dan hutan-hutan. Saat itulah PKI dengan gencar menanamkan pengaruhnya. Keluarga PRRI yang ditinggalkan di perkampungan menjadi sasaran utama PKI dalam menyebarluaskan pengaruhnya.<sup>53</sup> Melalui berbagai intimidasi, tuduhan pro PRRI dan kadang ada yang didaftarkan paksa sebagai salah satu organisasi massa binaan PKI. Inilah tujuan politis PKI dalam usaha membangun kekuatan dan merekrut anggota partai ataupun organisasi

<sup>50</sup> PKI fase kedua ini datang ke Sawahlunto/Sijunjung pada tahun 1950-an. Pada tahun ini dibentuk PKI cabang Sijunjung yang diketuai oleh A. Hamid, sedangkan PKI cabang Sawahlunto saat itu belum didirikan. Untuk lebih jelas lihat Haluan, 1 Oktober 1955. Keterangan ini juga penulis dapat dari hasil wawancara dengan Amirudin tanggal 23 Mei 2010.

<sup>51</sup> *Ibid.*, hlm. 500-509.

<sup>52</sup> Audrey R. Kahin, & George McTurnan Kahin, *op. cit.*, hlm. 260-262. Lihat juga Rika Wahyuni, *op. cit.*, hlm. 30-31. Hal ini juga sudah disinggung sebelumnya, lihat hlm. 51 dan 52.

<sup>53</sup> Rika Wahyuni, *ibid.*, hlm. 30-31.

massanya.<sup>54</sup> Bagi masyarakat Sawahlunto/Sijunjung PKI ketika itu bukanlah partai atau ideologi yang baru, dimana jauh sebelum itu, PKI sudah dikenal dikalangan masyarakat Sawahlunto/Sijunjung.<sup>55</sup>

Saat terjadi penumpasan PRRI, PKI ikut bersama APRI yang didatangkan dari pusat. Dari sini, dimulailah babak baru PKI di Sawahlunto/Sijunjung. PKI dan *onderbouw*-nya berkembang dan memiliki banyak anggota. Jumlah anggota PKI di Sumatera Barat pada tahun 1965 adalah sekitar 25.653 orang, sedangkan untuk wilayah Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung berjumlah sebanyak 1925 orang.<sup>56</sup> Keterangan dari seorang mantan PKI menyebutkan bahwa jumlah simpatisan PKI adalah 15 ribu orang dan jumlah anggota PKI berserta ormasnya kira-kira 2000/3000 orang.<sup>57</sup>

Anggota ini terbagi ke dalam organisasi massa PKI yang terdiri dari Pemuda Rakyat, Gerwani, Lembaga Kebudayaan Rakyat (Lekra), Barisan tani Indonesia (BTI), Sentral Organisasi Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI) dan serikat buruh yang bernaung dibawah SOBSI seperti : Serikat Buruh Tambang Indonesia(SBTI), Serikat

---

<sup>54</sup> *Ibid.*,

<sup>55</sup> Mestika Zed, *Pemberontakan Komunis Silungkang 1927 : Studi Gerakan Sosial di Sumatera Barat* (Yogyakarta : Syarikat Indonesia, 2004), hlm. 10-107.

<sup>56</sup> Arsip pribadi Nadiar dan keterangan ini juga didapatkan melalui wawancara dengan Ibu Nadi tanggal 27 April 2011. Ibu Nadi adalah salah seorang peneliti Yayasan Peduli Korban Pembunuhan (YPKP) Sumatera Barat. Melihat dari hasil Pemilu 1955, jumlah PKI ini sangat bertolak belakang, saat Pemilu tersebut PKI meraih suara 4057 (Lihat Halaman 35). Terjadi pengecilan jumlah PKI pada tahun 1965.

<sup>57</sup> Wawancara dengan Amirudin tanggal 23 September 2010. Menurut Alnof Riadi (Pasi min Komando Distrik Militer Sawahlunto/Sijunjung) mengatakan bahwa arsip mengenai orang-orang PKI sulit ditemukan. Untuk Kodim sendiri sering pindah-pindah kantor sehingga banyak arsip yang tidak ditemukan.

Buruh Kereta Api (SBKA), Serikat Buruh Daerah (SEBDA), dan Serikat Buruh Kehutanan Seluruh Indonesia (Serbuksi).<sup>58</sup>

Dalam struktur kepartaian PKI di Sawahlunto/Sijunjung terdapat Comite Seksi, yaitu sebuah struktur pada daerah tk II yang mengurus segala kepentingan partai, Comite Seksi ini berada di bawah Comite Daerah Besar yang berada di tingkat provinsi. Comite Seksi tahun 1965 dijabat oleh Sudaria, sekretaris dipegang oleh Budiman, wakil ketua oleh Asmunir, ada pula anggota pleno yang terdiri dari sekretaris kecamatan dan ketua organisasi massa PKI. Di antara anggota pleno tersebut adalah Maudin, Matsan, M. Saleh, Syarifuddin dan Amirudin.<sup>59</sup>

Di tingkat kecamatan ada yang disebut sebagai Comite Sub Seksi (CSS), antara lain adalah : Ahmad Sinaro Kuniang di Comite Sub Seksi Kecamatan Kotobaru, Ahmad Majo Kayo di Kecamatan Sijunjung, Katik Diran di Kecamatan Sumpur Kudus, Kamiruddin di Kecamatan Koto Tujuh, Sutan Jamiri di Kecamatan Sawahlunto, H. Baudin di Kecamatan Talawi.<sup>60</sup> Comite Sub Seksi bertugas memantau situasi di ranting atau di kenagarian yang lebih dikenal dengan istilah Comite Resort, akan tetapi tidak ada struktur yang ditemukan terkait dengan struktur ranting ini.

---

<sup>58</sup> Menurut Nadiar tidak ada jumlah pasti dari masing-masing ormas PKI.

<sup>59</sup> Nama-nama anggota pleno lainnya dan anggota PKI serta sebagian besar struktur kepartaian dan organisasi massanya tidak diketahui lagi, kemungkinan data tersebut telah dilenyapkan, dan kebanyakan dari anggota atau elit politik partai sudah banyak yang meninggal dan sebagian dibunuh, dari wawancara dengan Amirudin pada tanggal 23 September 2010, tidak banyak didapatkan nama-nama struktur PKI dan organisasi massanya.

<sup>60</sup> Ada beberapa kecamatan yang tidak diketahui nama Comite Sub Seksinya antara lain kecamatan empat nagari, kecamatan tanjung gadang dan pulau punjung. Wawancara dengan Amirudin pada tanggal 23 September 2010.

PKI juga memiliki organisasi massa yang menjadi tulang punggung partai, dengan organisasi massa ini PKI mampu menyebarluaskan pengaruhnya sampai ke desa-desa. Pemuda Rakyat merupakan salah satu organisasi massa PKI, yang terbuka bagi seluruh lapisan masyarakat. Mereka diharuskan mengikuti pertemuan yang diadakan grup-grup di tingkat desa/nagari yang akan dilanjutkan dengan pendidikan politik dan ideologi yang diselenggarakan oleh partai.<sup>61</sup>

Pertemuan itu menjadi salah satu cara yang diandalkan oleh Pemuda Rakyat dalam mempropagandakan, membangun dan mengembangkan ideologi dan cita-cita partai yaitu komunisme. Selain itu pertemuan tersebut juga berupa acara-acara kebudayaan, seperti *saluang*, rabab, randai dan acara-acara keolahragaan. Dengan acara ini semua lapisan masyarakat diundang, bagi yang ikut mereka akan terdaftar sebagai anggota Pemuda Rakyat. Ini adalah salah satu metode yang dipakai oleh Pemuda Rakyat untuk mencari anggota.<sup>62</sup>

Dewan Pimpinan Daerah Pemuda Rakyat (DPDPR) Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung 1963,<sup>63</sup> Ruslan sebagai Ketua I, Asmunir sebagai Ketua II dan Sekretaris diduduki oleh Putra. Kepengurusan pada tingkat kecamatan disebut Pimpinan Cabang Pemuda Rakyat (PCPR) dan pada tingkat kenagarian disebut Pimpinan Ranting Pemuda Rakyat (PRPR).<sup>64</sup> Dalam organisasi Pemuda Rakyat terdapat seksi-seksi baik pada tingkat daerah, cabang, maupun ranting. Seksi

---

<sup>61</sup> Wawancara dengan Ramadani tanggal 24 Mei 2011.

<sup>62</sup> Wawancara dengan Asaruddin, Maunar, Zakaria dan Johan Arifin tanggal 30 Januari 2012.

<sup>63</sup> Wawancara dengan Amirudin tanggal 21 Februari 2011.

<sup>64</sup> Wawancara dengan Malaka tanggal 15 April 2010.

dimaksud antara lain adalah seksi ideologi. Program kerja utama seksi ideologi pada waktu itu adalah pendidikan ideologi dan politik PKI karena prinsip Pemuda Rakyat “merah dulu baru ahli”.<sup>65</sup>

Pendidikan ideologi dan politik tingkat daerah/kabupaten dilaksanakan langsung oleh pejabat tingkat provinsi yang disebut Sekolah Pemuda Daerah Besar (SPDB), para siswanya adalah kader-kader utusan dari tiap-tiap kabupaten yang ada Sumatera Barat. Kemudian tingkat kabupaten seperti Pemuda Rakyat Sawahlunto/Sijunjung melaksanakan pendidikan tingkat cabang/kecamatan yang kemudian adalah tugas kader cabang untuk mendidik kader ranting. Pendidikan pada tingkat ranting/kenagarian disebut Sekolah Politik Dasar (SPD). Kegiatan pada tingkat ranting tidak lancar karena motivasi utama saat itu adalah untuk mencari anggota, dan bersamaan dengan itu masyarakat lebih disibukkan oleh usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup.<sup>66</sup>

Kemudian ada pula mata pelajaran Bagaimana Masyarakat Berkembang (BMB), diajarkan mulai dari kehidupan zaman primitif, zaman batu, zaman tembaga, zaman besi, zaman barter, feudalisme, kapitalisme, kolonialisme dan imperialisme, kemudian diajarkan masyarakat sosialisme dan komunisme.<sup>67</sup> Mata pelajaran ini sangat penting bagi calon kader agar mampu memahami perilaku, pola pikir dan cara manusia menjalankan sebuah sistem kemasyarakatan dari zaman ke zaman sesuai dengan keadaan zaman dan tingkat pengetahuan manusia, sehingga dapat dirumuskan

<sup>65</sup> Wawancara dengan Ramadani tanggal 23 April 2011.

<sup>66</sup> Wawancara dengan Ramadani tanggal 23 April 2011.

<sup>67</sup> Wawancara dengan Jahar pada 20 September 2011.

sejarah perkembangan, serta pola pikirnya yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan pola pikir, sosial budaya dan perpolitikan di berbagai belahan dunia saat itu. Prinsip utama dalam masyarakat komunisme adalah “bekerja menurut kemampuan menerima menurut kebutuhan”.<sup>68</sup>

Dalam mata pelajaran Soal Pokok Revolusi diajarkan tentang geografis Indonesia, mana kawan dan mana lawan baik dari dalam maupun dari luar. Begitu pula tentang kekuatan progresif revolucioner, reaksioner, kaum borjuasi, kapitalisme nasional, dan kekuatan-kekuatan yang harus dirangkul adalah; kaum tani, buruh tani, buruh nelayan dan lain-lain. Sehingga kader-kader Pemuda Rakyat tidak mudah terpancing dengan isu dan agitasi yang setiap saat berkembang dalam perpolitikan Indonesia.<sup>69</sup>

Pemuda Rakyat juga memiliki seksi organisasi yang bekerja mengontrol kehidupan organisasi di tingkat kabupaten, cabang, dan ranting di seluruh daerah Sawahlunto/Sijunjung. Seksi ini melakukan pemantauan terhadap perkembangan organisasi dan kinerja anggotanya, yang bertindak sebagai pengawas adalah Asmunir yang juga sekaligus menjabat Ketua II DPDPR Sawahlunto/Sijunjung. Di tingkat ranting pengawasan dilakukan sendiri oleh ketua ranting yang ada, pengawasan juga dilakukan untuk meningkatkan kedisiplinan berorganisasi bagi anggota Pemuda Rakyat.<sup>70</sup>

---

<sup>68</sup> Wawancara dengan Jahar pada 20 September 2011.

<sup>69</sup> Wawancara dengan Ramadaniil tanggal 23 April 2011.

<sup>70</sup> Wawancara dengan Ramadaniil tanggal 23 April 2011.

Tidak dapat dipungkiri, sebagai ormas yang dekat dengan pemerintah Pemuda Rakyat juga sering melakukan tindakan-tindakan semena-mena terhadap kelompok lain. Pada satu tempat di Sawahlunto/Sijunjung Pemuda Rakyat melakukan tekanan kepada pemuda yang tidak berasal dari golongan mereka. Tekanan tersebut berupa olok-olokan dan penghinaan.<sup>71</sup> Ini merupakan bukti dari tidak lancarnya koordinasi antar pengurus dan anggota.

Sebagai salah satu organisasi pemuda yang besar, Pemuda Rakyat juga pernah melakukan kejahatan kepada masyarakat umum. Di Kecamatan Sijunjung pernah beberapa orang dari Pemuda Rakyat memukul salah seorang masyarakat, tidak jelas apa permasalahannya saat itu. Menurut kesaksian Zakaria, “seorang anggota Pemuda Rakyat memukul Saidi sampai jatuh, setelah itu anggota Pemuda Rakyat tersebut langsung pergi, sehingga tidak terjadi keributan yang cukup besar”<sup>72</sup>

Kejahatan lain yang dilakukan oleh Pemuda Rakyat adalah yang terjadi di daerah Kumanis, di mana Jasam dan Jasir mendapatkan paksaan dan ancaman dari beberapa orang Pemuda Rakyat. Mereka memaksa agar kedua orang tersebut untuk mau bergabung dengan PKI, jika tidak keduanya akan dibunuh. Untuk menghindari

<sup>71</sup> Wawancara dengan Zubir tanggal 30 Januari 2012. Hal ini seperti kebanyakan isu-isu yang selama ini dipahami oleh masyarakat umum. Kabar-kabar yang tersiar memang banyak yang mengatakan bahwa Pemuda Rakyat di tempat ada yang melakukan tindak kekerasan, tetapi untuk wilayah Sumpur Kudus hanya terjadi olok-olokan semata. Ada satu waktu salah seorang anggota Perti pergi mengikuti acara syukuran yang diadakan oleh salah seorang anggota masyarakat, dan pada waktu itu Pemuda Rakyat mengatakan “itu lihat ada orang yang mau meminta sedekah”. Ini merupakan satu bentuk olok-olokan yang terjadi di satu tempat. Dan hal ini mungkin juga terjadi di tempat lain, atau mungkin lebih dari sekedar itu.

<sup>72</sup> Wawancara dengan Asaruddin, Maunar, Zakaria dan Johan Arifin tanggal 30 Januari 2012.

pembunuhan, Jasam dan Jasir selalu bersembunyi, hingga akhirnya keduanya selamat dari pembunuhan.<sup>73</sup>

Menurut keterangan orang-orang PKI, bahwa PKI dan organisasi massanya tidak pernah diberikan instruksi untuk melakukan tindak kekerasan kepada masyarakat manapun.<sup>74</sup> Mengingat kondisi politik saat itu, bisa jadi PKI semakin radikal dan sadar atau tidak sebagian dari orang-orang PKI melakukan tindak semena-mena terhadap masyarakat umum, terutama orang yang mereka anggap sebagai lawan politik. Walaupun sebagian besar orang PKI menyangkal hal tersebut, akan tetapi fenomena di tengah masyarakat umum memperlihatkan bahwa PKI dan ormasnya pernah melakukan tindak kekerasan fisik ataupun verbal.<sup>75</sup>

Organisasi massa PKI lainnya adalah Gerwis (Gerwani).<sup>76</sup> Pada 4 Juni 1950 para wakil enam organisasi wanita berkumpul di Semarang, untuk melebur enam organisasi mereka masing-masing ke dalam satu wadah tunggal yang diberi nama Gerwis, yaitu kependekan dari Gerakan Wanita Indonesia Sedar. Enam organisasi tersebut ialah Rukun Putri Indonesia (Rupindo) dari Semarang, persatuan Wanita Sedar dari Surabaya, Isteri Sedar dari Bandung, Gerakan Wanita Indonesia

<sup>73</sup> Wawancara dengan Zubir tanggal 31 Januari 2012.

<sup>74</sup> Wawancara dengan Amirudin tanggal 24 April 2011. Kalaupun ada tindak kekerasan yang terjadi, itu hanya lebih bersifat personal, karena dilatarbelakangi oleh masalah pribadi.

<sup>75</sup> Wawancara dengan Zubir tanggal 31 Januari 2012.

<sup>76</sup> Ada yang menyebutkan bahwa Gerwani bukanlah organisasi massa atau *orderbouw* dari PKI, kedekatan Gerwani dan PKI hanyalah ada anggota gerwani yang menjadi anggota PKI ataupun sebaliknya. Untuk lebih jelas lihat Saskia E. Wierenga, *Penghancuran Gerakan Perempuan di Indonesia* (Jakarta: Garba Budaya, 1999), hlm. 1-30.

(Gerwindo) dari Kediri, Wanita Madura dari Madura, dan Perjuangan Putri Republik Indonesia dari Pasuruan.<sup>77</sup>

Tokoh pendiri Gerwis adalah Tis Netty dari Semarang dan Nyonya Umi dari Surabaya, S.K. Trimurty dari Yogyakarta dan Nyonya Srie Kustijah dari Semarang.<sup>78</sup> Sejak awal berdirinya Gerwis merupakan organisasi perempuan yang paling aktif di bidang politik nasional. Sesuai dengan keputusan yang diambil dalam kongres I pada Desember 1951, Gerwis kemudian diubah menjadi Gerwani.<sup>79</sup> Gerwani memiliki hubungan yang kuat dengan Partai Komunis Indonesia (PKI), namun sebenarnya merupakan organisasi independen yang memperhatikan masalah-masalah sosialisme dan feminism.

Gerwani menjadi gerakan massa mengikuti haluan PKI tentang emansipasi wanita, yang menggariskan bahwa pertama-tama sosialisme harus dicapai lebih dahulu, dan strategi terbaik untuk itu ialah dengan penggalangan front dari bawah, untuk menekan pemerintah agar berjalan ke arah yang diinginkan. Gerwani menghendaki agar gerakan wanita memainkan peranannya di dalam politik nasional. Mereka dipengaruhi sejumlah ide Sukarno tentang gerakan wanita pada umumnya, dan gerakan wanita Indonesia pada khususnya. Program perjuangan meliputi masalah hak-hak wanita, hak-hak anak-anak, demokrasi dan keamanan.<sup>80</sup>

---

<sup>77</sup> *Ibid.*, hlm. 283.

<sup>78</sup> Risdha Nugroho Budiyanto, "Aktivitas Gerwani Di Kota Semarang Tahun 1950-1965", *Skripsi* (Semarang : Universitas Diponegoro, 2009), hlm. 2-8.

<sup>79</sup> Wierenga 1999, *op.cit.*, hlm. 299.

<sup>80</sup> Wierenga, *ibid.*, hlm. 200-220.

Struktur organisasi Gerwani di tingkat Sawahlunto/Sijunjung pada tahun 1964, ketua dijabat oleh Jalinur, wakil ketua dijabat oleh Zubaidah dan bendahara oleh Sabaiyah. Sawahlunto/Sijunjung merupakan cabang dari Gewani pusat, sedangkan di bawahnya ada yang dikenal dengan anak cabang yang terletak di kecamatan, dan di bawah anak cabang ada organisasi Gerwani tingkat ranting.<sup>81</sup>

Gerwani di Sawahlunto/Sijunjung memiliki aktivitas di bidang sosial politik antara lain memberi dukungan dalam usaha menuntut penghapusan diskriminasi bagi kaum wanita dan dilaksanakannya Undang-Undang No. 68 tahun 1959 tentang persetujuan Konvensi Hak-hak Politik bagi Wanita. Harapannya adalah adanya pengembalian hak-hak wanita, tidak hanya sebagai pendamping suami namun juga sebagai penyangga negara.<sup>82</sup>

Selain itu juga menuntut penghapusan diskriminasi mengenai hak-hak wanita dalam jabatan Kepala Desa/Pamong Desa dan segera dihapuskannya berbagai macam kerja tanpa dibayar yang pada hakekatnya sama dengan *rodi* yang sangat memberatkan kaum tani.<sup>83</sup> Aktivitas sosial adalah membuat ladang kolektif Gerwani, membuat peternakan Gerwani, membentuk kelompok julo-julo (arisan) dan mereka juga aktif dalam mengkritik pakaian dan penampilan anak-anak gadis.<sup>84</sup>

Program perjuangan yang dampaknya berhubungan langsung dengan kaum perempuan adalah bidang ekonomi, sehingga bidang ini menjadi prioritas utama bagi

---

<sup>81</sup> Wawancara dengan Suryanis tanggal 24 April 2010.

<sup>82</sup> Wawancara dengan Suryanis tanggal 24 April 2010.

<sup>83</sup> Wawancara dengan Suryanis tanggal 24 April 2010.

<sup>84</sup> Wawancara dengan Suryanis tanggal 24 April 2010.

Gerwani. Adapun program perjuangan yang telah dilaksanakan oleh Gerwani di antaranya mengenai masalah lintah darat, bantuan kredit yang murah, dan anggaran kesehatan. Untuk menghindari masyarakat dari lintah darat Gerwani melakukan semacam arisan rumah tangga kecil, yang biasanya dipimpin oleh ketua ranting Gerwani.<sup>85</sup>

Gerwani juga membentuk Koperasi Wanita Indonesia, yang bertujuan untuk memberikan bantuan kredit ringan dalam mengatasi masalah ekonomi masyarakat. Selain itu, Gerwani juga membuat ladang kolektif dan peternakan Gerwani. Ladang dan peternakan kolektif tersebut merupakan satu langkah untuk mengajak masyarakat berdikari dan terampil, dengan lebih mengedepankan azas gotong-royong.<sup>86</sup> Keterangan lain menyebutkan bahwa ladang kolektif dan gotong-royong yang dilakukan oleh Gerwani merupakan salah satu cara untuk mencari anggota. Orang-orang yang datang ke tempat itu, walaupun hanya untuk melihat-lihat saja, akan terdaftar sebagai anggota Gerwani. Hal ini pernah terjadi di Nagari Kumanis dan beberapa nagari di Kecamatan Sijunjung.<sup>87</sup>

Gerwani Sawahlunto/Sijunjung membentuk 12 buah sekolah Taman Kanak-Kanak (TK) Melati di Sawahlunto/Sijunjung. Hal tersebut merupakan bentuk nyata dari program Gerwani mengenai tuntutan penambahan anggaran belanja pendidikan dan kebudayaan; penambahan gedung-gedung sekolah yang memenuhi syarat

<sup>85</sup> Wawancara dengan Suryanis tanggal 24 April 2010. Terkait dengan koperasi ini, tidak ada arsip yang menerangkan secara konkrit dan juga tidak terlalu besar, hanya ada di tingkat cabang dan tidak merata di seluruh daerah Sawahlunto/Sijunjung.

<sup>86</sup> Wawancara dengan Suryanis tanggal 24 April 2010.

<sup>87</sup> Wawancara dengan Zainudin tanggal 28 Januari 2012. Wawancara juga dilakukan dengan Asarudin, Johan Arifin, Maunar dan Zakaria tanggal 30 Januari 2012.

kesehatan dan sekolah-sekolah kejuruan perluasan usaha pemberantasan buta huruf, serta peningkatan taraf kebudayaan nasional.<sup>88</sup>

Ormas PKI berikutnya adalah Serikat Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI). Di Sawahlunto/Sijunjung SOBSI dan serikat yang ada di bawahnya menjalankan hal yang sama dengan kebanyakan cabang-cabang SOBSI yang ada di seluruh Indonesia. SOBSI cabang Sawahlunto/Sijunjung tahun 1954-1965 dipimpin oleh Nursalim, sedangkan organisasi dibawah naungan SOBSI seperti, SBKA diketua oleh Behram, SBTI diketuai oleh M. Sair dan SBTU diketuai oleh Latif.<sup>89</sup>

SOBSI melakukan aktivitas untuk memperjuangkan nasib kaum buruh, kegiatan tersebut berupa melakukan tuntutan untuk kenaikan gaji buruh. SBTI yang menjadi organisasi di buruh tambang batu bara, sering melakukan kegiatan untuk mensejahterahkan buruh tambang batu bara di PT. Ombilin yang terdapat di Sawahlunto dan perusahaan tambang lainnya. Memperjuangkan kasus kekerasan dan perlakuan kasar yang dialami oleh para pekerja tambang. akan tetapi memang tidak banyak program yang mereka jalankan.<sup>90</sup>

Petani juga diorganisir PKI ke dalam Barisan Tani Indonesia (BTI), yang dibentuk berdasarkan kongres petani Indonesia yang pertama diselenggarakan di Yogyakarta pada akhir November 1945.<sup>91</sup> Seiring dengan terbentuknya BTI di tingkat

---

<sup>88</sup> Wawancara dengan Suryanis tanggal 24 April 2010.

<sup>89</sup> Wawancara dengan Amirudin, Ramadani, Sulistiawati dan Suryanis tanggal 31 Maret 2011. mengenai kepengurusan lain tidak dikenal lagi, mengingat keterbatasan dari ingatan nara sumber. Selain itu hal ini juga karena arsip yang berkaitan dengan SOBSI dan organisasi bawahannya dibakar dan dilenyepkan.

<sup>90</sup> Wawancara dengan Sulistiawati tanggal 24 Februari 2011.

<sup>91</sup> Kuntowijoyo, *Radikalisisasi Petani* (Yogyakarta: Benteng, 2002), hlm. 15.

nasional, secara perlahan BTI berkembang sampai ke Sawahlunto/Sijunjung. BTI cabang Sawahlunto/Sijunjung sendiri terbentuk tahun 1953, dalam pembentukan ini dipilihlah Syariman Suni sebagai ketua dan Suman sebagai wakil ketua. Pembentukan BTI terbentuk karena upaya dari pimpinan tingkat nasional berupaya untuk memperkuat organisasi dan sekaligus untuk mendukung PKI dalam Pemilihan Umum 1955.<sup>92</sup>

BTI di bawah pimpinan Syariman Suni mengalami perkembangan, organisasi ini sering melakukan penyuluhan masalah pertanian kepada masyarakat. Tidak hanya itu BTI juga memfokuskan kegiatan pada kesejahteraan petani dengan melakukan pembagian alat-alat pertanian secara gratis, alat-alat pertanian tersebut berupa cangkul, parang, dan arit. Hal ini juga dilakukan untuk membuat masyarakat tertarik dan simpati terhadap BTI, isu yang paling sering dikembangkan oleh BTI adalah masalah bagi hasil, kepemilikan tanah dan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yakni UU no. 5/tahun 1960.<sup>93</sup>

Keterangan lain menyebutkan bahwa alat-alat pertanian yang dibagi-bagikan oleh BTI merupakan pola yang sama yang dilakukan oleh BTI untuk mencari anggota. Masyarakat yang menerima bantuan tersebut, secara otomatis akan terdaftar sebagai anggota BTI. Selain itu ada istilah “*umbuak ubi*” yang dilakukan oleh orang-orang BTI, masyarakat ditawarkan akan mendapatkan bantuan alat-alat dan bahan

---

<sup>92</sup> Wawancara dengan Zainudin tanggal 30 Januari 2012.

<sup>93</sup> Wawancara dengan Amirudin tanggal 21 April 2011.

pertanian, seperti cangkul, arit, bibit, dan pupuk yang bagus asalkan masyarakat mau bergabung dengan BTI.<sup>94</sup>

Kejadian itu pernah terjadi di daerah Pematang Panjang, sebagian masyarakat Pematang Panjang yang diberikan bantuan bibit teh, didaftarkan sebagai anggota BTI. Hal serupa juga pernah terjadi di Kecamatan Sumpur Kudus, sebagian besar masyarakat Sumpur Kudus adalah bermata pencarian bertani dan berkebun. Dengan situasi yang serba sulit saat itu, BTI memberikan bantuan segala sesuatu yang berkaitan dengan pertanian dan perkebunan, sehingga masyarakat yang menerima bantuan tersebut, menjadi anggota BTI.<sup>95</sup>

Dalam pelaksanaan program-programnya BTI tidak seradikal seperti yang terjadi di Jawa. Dalam penerapan UU bagi hasil misalnya, masyarakat Minangkabau sudah memiliki sistem pembagiannya 1 : 4.<sup>96</sup> Hal ini memberikan keuntungan tersendiri terhadap BTI dan petani yang ada di Sawahlunto/Sijunjung. Demikian pula halnya terhadap *landreform*, tidak ada lagi hal yang harus dibenahi, karena secara pemilikan tanah telah berjalan dengan baik, sehingga aksi sepihak tidak terjadi di daerah ini. Kalau pun ada permasalahan dalam pemilikan tanah, biasanya hanya

---

<sup>94</sup> Wawancara dengan Alnof Riadi (Pasi min Kodim Sawahlunto/Sijunjung tanggal 30 Januari 2012.

<sup>95</sup> Wawancara dengan Zainudin tanggal 28 Januari 2012. Wawancara juga dilakukan dengan Asarudin, Johan Arifin, Maunar dan Zakaria tanggal 30 Januari 2012. Terkait masalah ini orang-orang PKI tidak mengakui hal tersebut, mereka lebih percaya bahwa isu itu hanyalah bentuk kebencian yang diberikan oleh orang-orang yang tidak suka dengan PKI saat itu. Wawancara dengan Sulistiawati tanggal 24 April 2011.

<sup>96</sup> Wawancara dengan Zainudin tanggal 30 Januari 2012. Pembagian 1 : 4 ini adalah pembagian yang menggambarkan perolehan dari hasil panen antara penggarap dan pemilik tanah. Penggarap mendapatkan 4 bagian dan pemilik lahan hanya mendapatkan 1. Di tempat lain pembagiannya juga dilakukan dengan 1 : 2.

terjadi antara mamak dan kemenakan, dan ini bisa diselesaikan dengan kekeluargaan.<sup>97</sup>

Secara nasional PKI memiliki tujuan jangka panjang yaitu ingin menjadikan Indonesia sebagai negara komunis, guna mengatasi kesengsaraan masyarakat. PKI ingin menghapus kepemilikan perorangan atas alat produksi, yang kemudian diganti menjadi hak milik bersama dengan sistem bagi hasil dan bagi kerja. Tujuan jangka panjang ini dilakukan dengan revolusi.<sup>98</sup>

Terkait dengan tujuan jangka panjang tersebut, PKI di Sawahlunto/Sijunjung hanyalah menjalankan program partai yaitu menghimpun massa, guna memperkuat posisi partai. Menurut keterangan beberapa masyarakat menjelang peristiwa yang terjadi di pusat, PKI di Sawahlunto/Sijunjung juga telah siaga untuk serentak melakukan pembunuhan terhadap orang-orang yang tidak mendukung PKI. Dibuktikan dengan beredarnya orang-orang berpakaian hitam dan berikat kepala merah di nagari-nagari.<sup>99</sup>

Untuk melaksanakan aksi tersebut, sebelumnya PKI dan ormasnya menyerukan kepada penduduk untuk membuat lubang di bawah rumah masing-masing. Lubang itu dimaksudkan untuk mengubur orang-orang yang telah dicatat sebagai target operasi yang akan dilakukan. Sebelum melaksanakan aksi tersebut beberapa orang tokoh PKI di Sumpur Kudus, seperti Kotik Diran telah melakukan lobi-lobi kepada Amir dan Zainudin. Dalam lobi tersebut Kotik Diran mengatakan

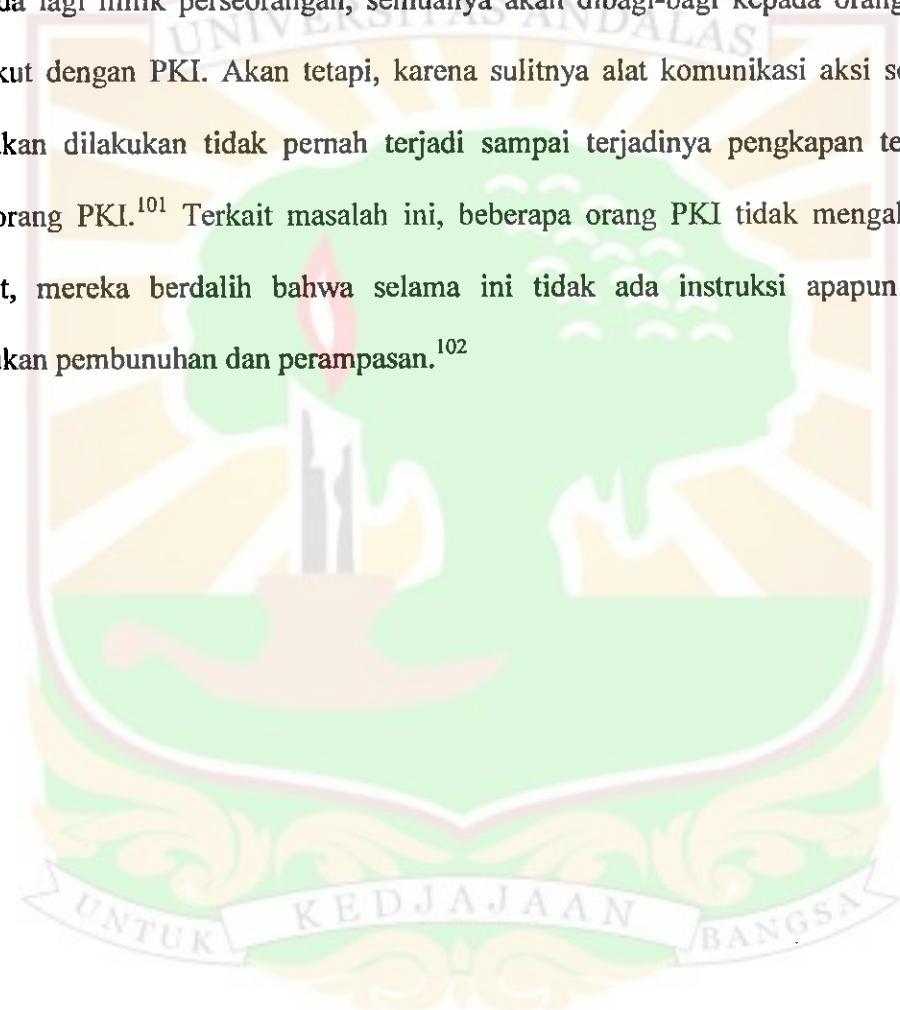
<sup>97</sup> Wawancara dengan Amirudin tanggal 21 Februari 2011.

<sup>98</sup> Wawancara dengan Jahar tanggal 15 Juli 2011.

<sup>99</sup> Wawancara dengan Zainudin tanggal 28 Januari 2012.

kepada Zainudin atas pendiriannya untuk memasuki PKI, karena sebentar lagi akan diadakan revolusi.<sup>100</sup>

Setelah revolusi tersebut dilaksanakan, tanah, kerbau dan harta lainnya tidak akan ada lagi milik perseorangan, semuanya akan dibagi-bagi kepada orang-orang yang ikut dengan PKI. Akan tetapi, karena sulitnya alat komunikasi aksi serentak yang akan dilakukan tidak pernah terjadi sampai terjadinya pengkapan terhadap orang-orang PKI.<sup>101</sup> Terkait masalah ini, beberapa orang PKI tidak mengakui hal tersebut, mereka berdalih bahwa selama ini tidak ada instruksi apapun untuk melakukan pembunuhan dan perampasan.<sup>102</sup>



<sup>100</sup> Wawancara dengan Zainudin tanggal 28 Januari 2012.

<sup>101</sup> Wawancara dengan Zainudin tanggal 28 Januari 2012. Wawancara dengan Zubir tanggal 31 Januari 2012. dan keterangan ini didapat dari wawancara dengan Asarudin, Johan Arifin, Maunar dan Zakaria tanggal 30 Januari 2012.

<sup>102</sup> Wawancara dengan Malaka, Ramadani, Suryani, Suryanis, Sulistiawati, Amirudin di waktu dan tempat yang berbeda. Yaitu tanggal 20 Februari dan 23-24 April 2011.

## BAB IV

### PENUMPASAN PKI DI SAWAHLUNTO/SIJUNJUNG

#### A. Proses Terjadinya Penumpasan

Tragedi 1 Oktober adalah sebuah peristiwa yang sampai saat ini menjadi misteri bagi masyarakat Indonesia, ada yang mengatakan bahwa tragedi ini didalangi oleh PKI, dan ada sebagian yang mengatakan bahwa kejadian ini merupakan konflik internal dalam tubuh Angkatan Darat.<sup>1</sup> Media massa cetak dan elektronik mengatakan bahwa PKI adalah dalang dan yang bertanggung jawab atas pembunuhan keji terhadap 6 orang perwira menengah dan 1 orang perwira biasa di Lubang Buaya.<sup>2</sup>

PKI mencoba melakukan kudeta terhadap pemerintahan yang sah, didahului dengan pembunuhan perwira-perwira angkatan darat, karena diduga mereka mengetahui rencana tersebut. Di sisi lain PKI dan pasukan pengaman presiden atau yang lebih dikenal dengan pasukan cakrabirawa hanya menyelamatkan Presiden Sukarno dari rencana kudeta yang akan dilancarkan oleh Dewan Jenderal. Dewan Jenderal adalah sebuah tim yang dibentuk dan diprakarsai untuk menggulingkan Presiden Sukarno, karena pada saat itu Sukarno sudah terlalu dekat dengan PKI.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Jhon Roosa, *Dalih Pembunuhan Massal : Gerakan 30 September dan Kudeta Suharto* (Jakarta : Hasta Mitra, 2008), hlm. 3-4.

<sup>2</sup> I. G. Krisnadi, *Tahanan Politik Pulau Buru 1969-1979* (Jakarta : PT. LP3ES Indonesia, 2000), hlm. 5.

<sup>3</sup> Jhon Roosa, *op.cit.*, hlm. 3-4. Dewan Jenderal adalah sebuah tim yang dibentuk dan diprakarsai untuk menggulingkan Presiden Sukarno, karena pada saat itu Sukarno sudah terlalu dekat dengan PKI. Akan tetapi hal ini masih menjadi polemik dan butuh penelitian yang mendalam lagi apakah benar saat itu telah berdiri Dewan Jenderal yang disebutkan oleh PKI.

Akan tetapi hal ini masih menjadi polemik dan butuh penelitian yang mendalam lagi apakah benar saat itu telah berdiri Dewan Jenderal yang disebutkan oleh PKI.

Panglima Kostrad Mayor Jenderal Suharto mengambil alih komando Angkatan Darat pada pagi hari 1 Oktober, dan pada petang hari ia melancarkan serangan balik. Pasukan G-30-S meninggalkan stasiun RRI dan Lapangan Merdeka yang sempat mereka duduki selama dua belas jam saja. Semua pasukan pemberontak akhirnya ditangkap atau melarikan diri dari Jakarta pada pagi hari 2 Oktober. Di Jawa Tengah, G-30-S hanya bertahan sampai 3 Oktober. Gerakan 30 September lenyap sebelum anggota-anggotanya sempat menjelaskan tujuan mereka kepada publik. Tragedi ini telah melahirkan polemik, pro dan kontra terhadap apa yang sebenarnya terjadi, akan tetapi satu hal yang tidak terbantahkan dan menjadi fakta sejarah, yaitu terjadinya pembunuhan dan tindak kekerasan terhadap kader/simpatisan PKI, atau terhadap orang yang dituduh PKI.<sup>4</sup>

Dikeluarkannya Surat Perintah Sebelah Maret (Supersemar) oleh Presiden Sukarno kepada Soeharto untuk memulihkan stabilitas keamanan nasional, memberikan legitimasi kepada Suharto untuk membubarkan PKI dengan ormas-ormasnya. Pembersihan dilakukan dengan menangkap, menahan, dan membunuh siapa saja yang dianggap PKI dan simpatisan PKI.<sup>5</sup> Pemberitaan di media Angkatan Bersejata, telah mempengaruhi masyarakat untuk melakukan tindak kekerasan dan pembunuhan terhadap orang-orang PKI. Di Jawa dan Bali terjadi pembunuhan massal

---

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> *Ibid.*

dan tindak kekerasan terhadap kader/simpatisan PKI yang tidak diketahui berapa jumlahnya.<sup>6</sup>

Pascapemberontakan di pusat, situasi Sumatera Barat dari tanggal 1-8 Oktober 1965 pada umumnya biasa-biasa saja, masyarakat tetap menjalankan tugasnya masing-masing. Mereka hampir tidak ambil pusing terhadap apa yang terjadi di Jakarta seperti diberitakan RRI Jakarta, adapun yang dilakukan oleh masyarakat umum hanyalah berbisik dan bertanya-tanya sesama mereka, apa yang terjadi sebenarnya? Begitu juga pihak militer saat itu, tidak menunjukkan aktivitas yang berarti, kantor-kantor pemerintah juga tidak melihatkan apa-apa, hanya saja sejumlah kepala-kepala bagian yang sulit dihubungi.<sup>7</sup>

Tokoh-tokoh partai berwajah tegang dan bersikap tutup mulut. Sebagaimana yang terjadi dalam pertemuan di kantor Front Nasional Daerah Sumatera Barat tanggal 4 Oktober 1965, beberapa hari sesudah pembataian di Lubang Buaya. Pangdam III/17 Agustus, Brigjen Panuju memberikan *briefing*, sebagian anggota pertemuan hanya diam, tidak ada yang bertanya walaupun ada kesempatan untuk itu.<sup>8</sup> Beberapa hari setelah itu, tertanggal 9 Oktober 1965 suhu politik mulai meningkat, di tempat-tempat strategis di daerah Sumatera Barat, seperti Padang, Padang Pariaman

---

<sup>6</sup> Robert Cribb, *Pembantaian PKI di Jawa dan Bali 1965-1966* (Yogyakarta : Mata Bangsa, 2000), hlm. 50-150.

<sup>7</sup> Syafei Datoek, "Catatan Harian (korban 1965)" *Suara Kita* (Organ Yayasan Penelitian Korban Peristiwa 1965, edisi No. 01 april. (Tangerang: Penerbit YPKP, 2007), hlm. 14.

<sup>8</sup> *Ibid.*

sudah ditempel pamflet-pamflet yang isinya “ganyang antek-antek PKI, gantung Aidit, gantung Untung, gantung Subandrio dan lain sebagainya”.<sup>9</sup>

Satu hari setelah itu di bawah Pangdam III/17 Agustus, melarang dan mencabut izin terbitnya surat kabar harian “Suara Persatuan”.<sup>10</sup> Tidak diketahui dengan pasti mengapa pada langkah awal ini Pangdam III/17 Agustus hanya melakukan pelarangan terhadap surat kabar. Mengingat luasnya pengaruh PKI dalam jajaran Kodam III/17 Agustus, dalam minggu-minggu pertama masyarakat tidak berani mengambil prakarsa untuk melakukan aksi penumpasan terhadap unsur-unsur PKI. Mereka lebih memilih untuk menunggu isyarat dari unsur Kodam III/17 Agustus yang anti komunis.<sup>11</sup>

Pada tanggal 13 Oktober Kota Padang dilanda oleh demonstrasi besar-besaran, yang jadi sasaran adalah kantor-kantor PKI serta ormas-ormasnya. Di beberapa daerah Tk. II di Sumatera Barat, seperti Padang Pariaman, Tanah Datar, Solok dan Kota Bukittinggi beberapa hari kemudian terjadi pula hal yang sama. Atas situasi tersebut Pangdam III/17 Agustus mengambil sikap dengan mengeluarkan pengumuman yang isinya menyerukan kepada para pimpinan PKI dan organisasi

<sup>9</sup> *Ibid.*

<sup>10</sup> *Ibid.*

<sup>11</sup> Saafrudin Bahar, “Peranan Elit Sipil dan Militer dalam Dinamika Integrasi Nasional di Indonesia (Kasus Etnik Minangkabau di Daerah Sumatera Barat 1945-1984)”, *Disertasi* (Yogyakarta : Universitas Gadjah Mada, 1996), hlm. 527-530. Militer tidak menjelaskan posisi mereka, apakah mereka pro/kontra terhadap PKI.

massa dibawah naungan PKI agar melaporkan diri kepada pihak keamanan setempat, demi menjaga keamanan dan keselamatan mereka.<sup>12</sup>

Di Kota Padang minggu pertama bulan November 1965, ratusan kader dan simpatisan PKI melakukan apel bersama di lapangan Imam Bonjol dengan disaksikan Panca Tunggal Kotamadya Padang. Pada kesempatan tersebut ratusan anggota dan simpatisan PKI tersebut membubarkan PKI dan sekaligus mengutuk pembunuhan terhadap para perwira menengah dan perwira biasa yang telah terjadi satu bulan sebelumnya.<sup>13</sup> Hal ini dilakukan dengan pertimbangan untuk keselamatan orang-orang PKI dan ormasnya.<sup>14</sup>

Terkait dengan peristiwa 30 September dan 1 Oktober, banyak masyarakat di Sawahlunto/Sijunjung yang tidak mengetahui berita tersebut. Kondisi sosial politik pada awal Oktober 1965 relatif tenang, hanya muncul saling curiga antar anggota masyarakat, partai atau organisasi yang berbeda.<sup>15</sup> Meskipun akhirnya berita-berita yang diterima masyarakat, melalui radio maupun dari mulut ke mulut, mengatakan bahwa penculik dan pembunuh para jenderal adalah PKI, namun tidak ada tindakan apa pun yang dilakukan oleh partai atau organisasi massa lain terhadap PKI sebelum 17 Oktober 1965.<sup>16</sup>

---

<sup>12</sup> *Ibid.*,

<sup>13</sup> Syafei Datoek, *op.cit.*, hlm. 14.

<sup>14</sup> Wawancara dengan Syamsudin tanggal 27 Januari 2011.

<sup>15</sup> Wawancara dengan Suryanis tanggal 23 April 2011.

<sup>16</sup> Wawancara dengan Amirudin tanggal 27 Januari 2011.

Barulah sesudah adanya demonstrasi dari KAMI dan organisasi mahasiswa serta kelompok-kelompok lainnya yang terjadi di Padang,<sup>17</sup> Sudarsin selaku Bupati Sawahlunto/Sijunjung dan Dandim Jailani serta Danres Kompol Amuis mengambil langkah-langkah untuk mengamankan kader/simpatisan PKI, dengan mengumumkan agar seluruh simpatisan dan kader PKI agar berkumpul di Muaro Sijunjung. Pada pertemuan yang diadakan, ada sekitar 420 orang pengurus PKI dan simpatisannya yang hadir.<sup>18</sup> Pada dasarnya pemerintahan sipil maupun militer dan polisi sulit mengambil sikap karena faktor kedekatan dengan PKI atau karena belum adanya instruksi dari pusat.<sup>19</sup>

Hampir seluruh pimpinan dan anggota PKI beserta ormasnya membubarkan diri dalam pertemuan tersebut, serta ikut mengutuk atas pembunuhan yang sadis yang terjadi beberapa bulan sebelumnya.<sup>20</sup> Setelah pertemuan itu, banyak dari mereka yang ditangkap, dengan dalih demi keselamatan mereka, karena ditakutkan akan terjadi tindakan brutal dari masyarakat umum. Dalam pertemuan tersebut memang tidak semua dari orang-orang PKI yang hadir. Selain itu, pengumuman pemerintah mengharuskan semua pengurus PKI dan simpatisannya untuk melapor.<sup>21</sup>

Untuk tingkat kabupaten diharuskan melapor ke kantor polisi resort, akomodasi tingkat kecamatan adalah ke kantor polisi sektor dan untuk tingkat nagari

<sup>17</sup> Ridwan Saidi, *Lakon Politik "Che Guevara Melayu"* Dokumentasi teror PKI 1955-1960 (Jakarta : Institute for Policy Studies (IPS), 2006), hlm. 100.

<sup>18</sup> Wawancara dengan Amirudin tanggal 22 April 2011.

<sup>19</sup> Saafrudin Bahar, *op.cit.*, hlm. 527-530. Keterangan ini juga diutarakan oleh Wawancara dengan Syamsudin tanggal 22 April 2011.

<sup>20</sup> Syafei Datek, *op.cit.*, hlm. 14. Wawancara dengan Syamsudin tanggal 22 April 2011.

<sup>21</sup> Wawancara dengan Amirudin tanggal 22 April 2011.

diharuskan melapor ke wali nagari masing-masing. Akomodasi yang dilakukan dibagi menjadi akomodasi tingkat kabupaten, kecamatan dan nagari.<sup>22</sup> Tidak semua dari orang-orang PKI yang melapor, ada juga diantara mereka yang bersembunyi dan lari karena takut.<sup>23</sup>

Bagi anggota PKI yang bersembunyi dan lari, dilakukan pengejaran oleh polisi dan tentara yang dibantu oleh pasukan keamanan nagari atau hansip.<sup>24</sup> Dengan pengejaran tersebut ada yang tertangkap dan ada yang menyerahkan diri karena tidak tahan lagi hidup di hutan.<sup>25</sup> Tahap awal penangkapan berlangsung dengan tenang dan damai, namun pada tahun 1966 yang ditandai dengan dikeluarkannya dekrit pelarangan dan pembubaran partai PKI dan ormasnya. Dengan dukungan dari polisi dan militer, barulah beberapa terjadi tindak kekerasan fisik yang diiringi oleh kekerasan verbal.<sup>26</sup>

## B. Bentuk-Bentuk Tindak Kekeresan

Sebagaimana yang terjadi di seluruh daerah di Indonesia, PKI dan ormasnya diwajibkan melapor ke markas-markas komando kepolisian yang terdekat.

---

<sup>22</sup> Wawancara dengan Amirudin tanggal 22 April 2011.

<sup>23</sup> Wawancara dengan Zainudin tanggal 30 Januari '2012.

<sup>24</sup> Hansip saat itu adalah anggota OPR yang dibentuk pada penumpasan PRRI sebelumnya. Belum banyak dilakukan perubahan, yang berubah hanyalah personil-personilnya saja, ada yang digantikan karena sudah tua atau meninggal. Barulah beberapa tahun setelahnya dilakukan pembentukan hansip baru dengan surat keputusan 058/MADA/KD/1/1966 Kepala Markas III Sumatera Barat, berdasarkan Surat Keputusan Gubernur kepala Markas Daerah Hansip Sumatera Barat.

<sup>25</sup> Wawancara dengan Zainudin tanggal 30 Januari '2012. Untuk anggota PKI di Sumpur Kudus, mereka bersembunyi di hutan-hutan, ada yang bersembunyi di rumah-rumah sawah dan bersembunyi di jalan pintas menuju Talawi.

<sup>26</sup> Wawancara dengan Amirudin tanggal 22 April 2011.

Demonstrasi terjadi di mana-mana yang mengutuk tindakan biadab yang telah dilakukan oleh PKI dan ormasnya, serta menuntut agar PKI beserta semua yang bersangkutan dengannya harus dibubarkan.<sup>27</sup> Selain itu, secara sengaja atau tidak sengaja media cetak gencar melakukan propagandanya, yang memberitakan betapa sadisnya penganiayaan atas jenderal-jenderal tersebut. Terlihat suatu indikasi yang dilakukan media untuk memobilisasi masyarakat umum, yang bertujuan untuk memanas-manasi masyarakat sehingga aksi kekerasan terjadi di banyak daerah basis PKI.<sup>28</sup>

Dalam proses penumpasan yang terjadi di Sawahlunto/Sijunjung terdapat beberapa tindak kekerasan. Kekerasan fisik terhadap orang-orang PKI dimulai dari pemukulan, pemerkosan sampai pembunuhan, sedangkan kekerasan verbal diawali dengan kata-kata kasar yang dilontarkan secara terang-terangan kepada orang-orang PKI. Dalam kekerasan verbal tersebut, orang-orang PKI diteriakan sebagai orang biadab, tidak bertuhan, jahanam dan kata-kata kasar lainnya. Tindak kekerasan baik fisik maupun verbal dilakukan setelah mereka ditahan.<sup>29</sup>

Sebagaimana yang disinggung di atas, tindak kekerasan juga terjadi dalam penjara, ada yang dicabut kuku kakinya. Tindakan itu dilakukan untuk membuat mereka mengaku atas kesalahan yang belum tentu mereka perbuat, ditambah lagi dengan keadaan penjara yang tidak memadai, sampai-sampai makanpun kadangkala

---

<sup>27</sup> Angkatan Bersenjata, 16 Mei 1966.

<sup>28</sup> Jhon Roosa, *op.cit.*, hlm. 3-5.

<sup>29</sup> *Ibid.*, hlm. 60-70. Wawancara dengan Amirudin, Suryanis, Ramadani dan Sulistiawati tanggal 24 April 2011. Wawancara juga dilakukan dengan Zainudin tanggal 30 Januari 2012 dan Zubir tanggal 31 Januari 2012.

tidak diberi oleh sipir penjara, sehingga untuk makan harus dihantarkan oleh keluarga. Sebagaimana yang dikisahkan oleh Ramadani<sup>30</sup>l :

Seorang polisi menemui saya. Dia bicara, “kamu dipanggil pak Dandis di kantor polisi”. Sesampainya di sana, saya disuruh langsung ke belakang, ternyata langsung ke penjara. Saya dimasukan ke sel 13, Sel tersebut tidak memiliki kamar mandi, waktu itu saya belum makan dan minum. Besoknya saya baru mendapatkan berita kalau ternyata terjadi pemberontakan di Jakarta. Saya dituduh ikut memberontak dan membunuh. Pada suatu kali di dalam penjara saya dipanggil oleh beberapa orang sipir, saya tidak tahu apa kesalahan saya, tapi pada saat itu saya memiliki kedekatan dengan pimpinan mereka, mungkin inilah alasan mereka memanggil, menempeleng dan menendang dengan sepatu laras yang ujungnya ada besi. Aduh, saat itu saya menangis kesakitan, kalau melawan tentunya tidak mungkin. Di sana saya dikurung 3 bulan, setelah itu saya dipindahkan ke Muaro Kalaban, di sanalah dimulai kerja bakti sosial, makan tidak dikasih oleh pemerintah, sehingga makanan harus datang dari keluarga.<sup>30</sup>

Sebagaimana yang disinggung di atas, penangkapan terhadap orang-orang PKI yang terjadi di Sawahlunto/Sijunjung tidak dilakukan secara serentak. Awalnya penangkapan dilakukan satu-persatu sesuai dengan daftar orang-orang PKI yang ditemukan oleh polisi dan buterpra. Dalam masa penangkapan tersebut, orang-orang PKI yang tertangkap mengalami penyiksaan dari beberapa orang polisi. Hal ini terjadi pada saat interrogasi untuk mendapatkan keterangan dari orang PKI yang ditangkap.

Sumino juga mengisahkan :

Pada dasarnya saat penumpasan dan penyelidikan, memang banyak terjadi tindak kekerasan, untung bagi saya saat interrogasi tidak diperlakukan dengan kasar. Akan tetapi teman-teman di samping saya banyak yang ditampar, dipukul dan ditendang, bahkan ada yang diinjak kakinya dengan meja, serta ada yang dicabut kukunya, tujuannya mungkin agar mereka mengakui kesalahan yang sama sekali tidak mereka lakukan. Tuduhan yang diberikan

---

<sup>30</sup> Wawancara dengan Ramadani tanggal 25 Mei 2011.

pada saya adalah dituduh menyelewengkan uang negara, kebetulan saat itu saya bagian keuangan di pemerintahan. Selain itu, saya juga memiliki sertifikat tanda pelatihan militer yang diadakan oleh Dandim. Kemudian tanpa saya sadari ternyata pelatihan tersebut dijadikan sebagai tuduhan, pada hal pelatihan tersebut sah dan dilakukan oleh pihak militer. Untuk menghindari kekerasan, pada saat pemeriksaan saya bersifat kooperatif. Agar semua berjalan dengan lancar.<sup>31</sup>

Dari keterangan di atas, terlihat ada kerancuan atas tuduhan dalam proses penangkapan yang dilakukan oleh pihak yang berwajib. Tuduhan yang diberikan kepada orang-orang PKI adalah rencana melakukan kudeta secara serentak antara pusat dan daerah. Sulit mencari pbenaran terhadap tuduhan yang diberikan kepada tokoh dan anggota PKI yang ada di daerah. Salah satu tuduhan yang pernah diberikan kepada salah seorang anggota Pemuda Rakyat adalah perihal mengenai pelatihan militer resmi yang pernah dilakukan. Seharusnya penangkapan tidak hanya dilakukan terhadap peserta pelatihan militer, akan tetapi juga kepada pihak yang menyelenggarakan pelatihan tersebut. Namun kenyataannya tidak terjadi penangkapan kepada pihak militer tersebut.

Peristiwa yang terjadi di penjara selain tindak kekerasan, yaitu pemerkosaan yang dilakukan terhadap orang-orang PKI. Salah seorang korban perkosaan ini adalah anggota Gerwani. Sulistiawati mengisahkan “dulu pernah ada satu orang yang satu sel dengan kami, saat itu dia berusia sekitar 17-an tahun dan namanya adalah Surtini, awalnya dia dipanggil oleh seorang anggota polisi, namun setelah dipanggil itu, dia

---

<sup>31</sup> Wawancara dengan Sumino tanggal 23 April 2011.

tidak pernah muncul lagi, ada kabar yang menyebutkan bahwa dia diperkosa dan setelah itu dibunuh”.<sup>32</sup>

Selain itu, banyak dari tahanan yang dipekerjakan tanpa diupah dan diberi makan, tetapi kami cari sendiri. Adapun pekerjaan tersebut adalah pembuatan jalan dari Sungai Dareh sampai ke Sijunjung. Terkait dengan kerja ini Sumino mengisahkan :

Selama di penjara kami dikaryakan untuk membuat jalan, aduh pembuatan jalan tersebut sangat sulit, di mana kami harus menebangi pohon-pohon yang besar dengan menggunakan alat-alat yang sederhana. Selain itu di areal tersebut juga banyak duri-duri tinggi. Ditambah lagi kami tidak diberi makan, untuk itu kami hanya memanfaatkan apa yang ketemu di lapangan saja. Kalau ada binatang baik yang halal maupun haram kami makan, semata-mata untuk bertahan hidup. Pernah suatu kali kami makan ular, sebenarnya saya geli, tapi untuk menambah tenaga, saya harus makan.<sup>33</sup>

Para tahanan yang ditahan di Muaro Sijunjung pernah melakukan perintisan jalan lintas Sumatera, yaitu Pulau Punjung sampai ke Palangki.<sup>34</sup> Selain itu, tahanan di Kecamatan Sumpur Kudus disuruh untuk bercocok tanam dan membuka lahan perkebunan, tidak hanya itu mereka juga membuat rumah dinas tentara. Mereka juga dibebankan untuk mengumpulkan kayu untuk bahan bangunan, kalau tidak ada kayu

<sup>32</sup> Wawancara dengan Sulistiawati tanggal 24 April 2011. Untuk keterangan ini perlu dilakukan penelitian yang mendalam, karena ini hanya bersifat dugaan dan tidak ada bukti konkret dari tindak pemerkosaan tersebut. Kesimpulan tersebut ia ambil karena setelah dibawa oleh pihak polisi tidak ada kabar berita lagi tentang Surtini baik di dalam penjara maupun setelah keluar penjara.

<sup>33</sup> Wawancara dengan Sumino tanggal 23 April 2011.

<sup>34</sup> Wawancara dengan Malaka tanggal 22 April 2011. Wawancara dengan Sumino tanggal 23 April 2011, dan juga didapatkan dari wawancara dengan Zubir tanggal 31 Januari 2012.

mereka harus menggantinya dengan uang. Ini merupakan salah satu sanksi yang diterapkan oleh polisi.<sup>35</sup>

Tindak kekerasan tersebut berupa tamparan dan tendangan baik dengan tangan kosong maupun dengan benda keras lainnya.<sup>36</sup> Tindakan itu bertujuan untuk membuat orang-orang tersebut mengaku dan menandatangi surat tuntutan dan tuduhan yang diarahkan kepadanya. Banyak dari orang-orang tersebut memilih untuk mengikuti apa yang diperintahkan, daripada mati atau mendapatkan perlakuan kasar.<sup>37</sup> Kekerasan tersebut sebagian terjadi waktu interogasi yang dilakukan oleh polisi.<sup>38</sup>

Seorang anggota PKI yang mengalami tindak kekerasan adalah Tama. Sebelumnya Nursalim selaku buterpra menyuruh Zainudin dan Ali Amran selaku hansip untuk mencari dan membawa Tama ke kantor polisi. Dalam pencarian tersebut Tama ditemukan di gubuk sawah miliknya, dengan alasan disuruh melapor ke buterpra, maka Tama mendatangi kantor polisi, karena saat itu interogasi dilakukan di kantor Komando Sektor. Setelah Tama datang, salah seorang polisi yang tidak diketahui namanya meremas betis Tama dan menarik rambut Tama sehingga ia berteriak. Teriakan tersebut sangat keras sehingga sampai terdengar ke perumahan penduduk.<sup>39</sup>

---

<sup>35</sup> Wawancara dengan Zubir tanggal 31 Januari 2012.

<sup>36</sup> Wawancara dengan Ramadani tanggal 24 April 2011.

<sup>37</sup> Wawancara dengan Sumino tanggal 23 April 2011.

<sup>38</sup> Wawancara dengan Zubir tanggal 31 Januari 2012.

<sup>39</sup> Wawancara dengan Zainudin tanggal 30 Januari 2012. Keterangan ini juga didapatkan dari cerita yang disampaikan oleh anak Zainudin yang juga ada pada saat wawancara berlangsung.

Selain itu juga hal serupa juga terjadi pada Syapi'i, sebelumnya Syapi'i lari ke Talawi dan dalam pengejaran dia berhasil ditangkap oleh polisi. Setelah ditangkap dia dibawa ke kantor Komsek untuk diinterogasi. Adapun pertanyaan yang dilontarkan oleh Harsono selaku dansek adalah "akan kamu apakan orang-orang yang tidak termasuk ke PKI?", belum sampai dia menjawab pukulan mendarat ke mukanya dan rokok mati ditelinganya. Syapi'i dipukul dengan tangan kosong dan tongkat rotan yang dimiliki oleh Nursalim.<sup>40</sup>

Terdapat beberapa pembunuhan terhadap orang-orang PKI atau orang yang disangka PKI. Kondisi negeri terasa kurang nyaman, masyarakat diminta untuk melakukan ronda malam yang bertujuan untuk jaga-jaga kalau ada tindakan perlawanan yang dilakukan oleh orang-orang PKI. Situasi dalam keluarga yang tersebut sebagai orang PKI juga tidak nyaman, tiap sebentar rumah mereka didatangi, barang-barang mereka ada yang diambil paksa, dan malangnya lagi kalau ada anak gadis, kadang terjadi perkosaan terhadap anak gadis tersebut.<sup>41</sup>

Korban pembunuhan adalah orang-orang atau kader PKI golongan A yang terdapat di Sawahlunto/Sijunjung.<sup>42</sup> Keterangan lain menyebutkan bahwa yang meninggal bukanlah berarti golongan A, karena klasifikasi dilakukan setelah di

---

<sup>40</sup> Wawancara dengan Zainudin tanggal 30 Januari 2012. Saat peristiwa tersebut Zainudin selaku hansip berada di samping Syapi'l yang sedang diinterogasi, sehingga Zainudin melihat persis bagaimana kejadian tersebut berlangsung.

<sup>41</sup> Wawancara dengan Suryani tanggal 3 April 2011. Untuk kejadian ini perlu dilakukan penelitian yang mendalam, keterangan lain menyebutkan bahwa tidak pernah terjadi hal-hal seperti itu, biasanya yang datang ke rumah-rumah penduduk untuk melakukan pemanggilan terhadap orang-orang PKI adalah hansip yang juga berasal dari masyarakat tersebut. Wawancara dengan Zainudin tanggal 30 Januari 2012.

<sup>42</sup> Wawancara dengan Nadiar tanggal 23 April 2011.

penjara, untuk Sawahlunto/Sijunjung tidak ada klasifikasi A.<sup>43</sup> Mereka dibunuh antara lain adalah Inyiak Dagang,<sup>44</sup> ia ditembak saat berusaha untuk kabur dari penangkapan. Kejadian tersebut sekitar 1 Desember 1965 di lahan sawah salah seorang masyarakat di Kumanis.<sup>45</sup>

Abdul Aziz yang merupakan Comite Sub Seksi di Kecamatan Sungai Tarakj.<sup>46</sup> Dalam daftar anggota PKI yang ditemukan oleh polisi, menyatakan bahwa ia adalah seorang anggota PKI yang “*badoriak*”<sup>47</sup> dan berbahaya, pengejaran dilakukan dan ia ditembak oleh polisi yang mengejarnya. Pelaku penembakan sudah tidak diketahui lagi, akan tetapi polisi yang ditugaskan untuk menangkapnya adalah polisi sektor Kecamatan Sungai Tarok.<sup>48</sup>

Pembunuhan juga terjadi terhadap Sampono Alam yang merupakan pegawai kantor bupati dan anggota Badan Pemerintahan Harian (BPH). Sampono Alam juga tertulis sebagai anggota PKI yang berbahaya, sehingga pada proses penangkapan yang berlangsung, ia ditembak karena juga berusaha untuk melarikan diri. Pada saat sebelumnya Sampono Alam bersembunyi pada suatu tempat, akan tetapi persembunyian tersebut tercium oleh pihak polisi. Pencarian dilakukan oleh polisi, tentara dan hansip, saat berusaha untuk ditangkap Sampono melarikan diri dan secara

---

<sup>43</sup> Wawancara dengan Amirudin tanggal 27 Januari 2011.

<sup>44</sup> Inyiak dagang adalah seorang yang teridentifikasi terbunuh pada saat penumpasan PKI, akan tetapi tidak diketahui siapa nama sebenarnya dan tidak diketahui dimana tempat pemakamannya.

<sup>45</sup> Wawancara dengan Zainudin tanggal 30 Januari 2012.

<sup>46</sup> Wawancara dengan Malaka tanggal 22 April 2011.

<sup>47</sup> *Badoriak* adalah bahasa dengan dialek Sawahlunto/Sijunjung, sedangkan dalam dialek masyarakat Minangkabau lain biasanya dibaca *badariak* yang artinya keras atau tulen.

<sup>48</sup> Wawancara dengan Malaka tanggal 22 April 2011.

spontan polisi menembaknya. Tidak diketahui juga siapa polisi yang melakukan penembakan.<sup>49</sup>

Korban yang terbunuh lainnya adalah Kotik Diran yang merupakan mantan Camat Kecamatan Sumpur Kudus yang juga bertindak sebagai comite sub seksi, sama halnya dengan beberapa orang di atas, Kotik Diran adalah salah seorang PKI tulen dan terdaftar sebagai PKI kelas berat. Pada saat penangkapan ia sempat melarikan diri dan polisi yang dibantu oleh pihak keamanan nagari kewalahan mencarinya. Selama pengejaran keluarganya sering kali didatangi dan polisi selalu menanyakan dimana Kotik Diran bersembunyi.<sup>50</sup>

Pencarian dilakukan dengan membagi 3 wilayah pencarian, untuk itu juga dibentuk 3 regu yang masing-masing terdiri dari 10 orang dan salah seorang dalam regu tersebut adalah seorang polisi yang lengkap dengan senapan. Adapun diantara anggota regu tersebut adalah Imran, Ali Amran, Zainudin, Zubir, Sinealepak, Sakir Pinda dan sebagian dari mereka adalah anggota pertahanan sipil (hansip) nagari Kumanis. Polisi yang ikut ke dalam regu tersebut sudah tidak diketahui lagi namanya. Akhirnya pada tanggal (5 Desember 1965?) Kotik Diran berhasil ditangkap.<sup>51</sup>

Setelah berhasil ditangkap Kotik Diran langsung dibawa kantor Komsek Sumpur Kudus. Selama 2 hari Kotik Diran dipertontonkan agar semua orang tahu

---

<sup>49</sup> Wawancara dengan Malaka tanggal 22 April 2011.

<sup>50</sup> Wawancara dengan Malaka tanggal 22 April 2011.

<sup>51</sup> Wawancara dengan Zainudin tanggal 30 Januari 2012 dan juga dengan Zubir 31 Januari 2012. Nama-nama tersebut adalah sebatas ingatan dari nara sumber, karena arsip mengenai hal tersebut sudah tidak ditemukan lagi dan juga tidak ada pihak polisi yang bisa diwawancara. Mengenai tanggal penangkapan tersebut hanyalah perkiraan dari nara sumber karena mengingat kejadian tersebut sudah lama.

bahwa beliau adalah orang yang tidak bertuhan dan harus bertanggung jawab atas peristiwa yang terjadi di pusat. Akhirnya Nursalim yang merupakan Buterpra Kecamatan Sumpur Kudus menembaknya. Ia ditembak dibagian perut, tidak lama berselang Saifudin seorang polisi juga menembaknya dibagian bahu yang tembus kepunggung. Setelah ditembak ia diletakkan dalam parit di depan kantor polsek.<sup>52</sup>

Selain itu, Ahmad yang merupakan menteri pasar atau pengelola pasar Sijunjung dan Salam juga harus tewas dengan tragis setelah beberapa orang menculiknya.<sup>53</sup> Setelah kejadian tersebut, barulah diketahui bahwa Salam bukanlah tokoh atau anggota dari PKI dan organisasi massanya, dalam artian kematian Salam ini hanya sebagian dari sekian banyaknya pembunuhan salah sasaran, atau mungkin Salam merupakan korban perampokan. Salam merupakan pedagang emas, dan saat ditangkap, beliau baru pulang dari pasar dan tentunya membawa uang banyak. Untuk menutupi kesalahan pelaku, akhirnya Salam disebut sebagai bagian dari PKI.<sup>54</sup>

Mestika Zed dkk, menjelaskan bahwa dalam penumpasan dan tindak kekerasan terhadap PKI di Sumatera Barat, terdapat aksi balas dendam yang dilakukan oleh orang-orang PRRI, karena pada masa sebelumnya PKI aktif dalam

---

<sup>52</sup> Wawancara dengan Malaka tanggal 22 April 2011 dan dengan Zubir tanggal 31 Januari 2012, dalam wawancara tersebut didapatkan keterangan bahwa Kotik Diran ditembak oleh buterpra karena kemungkinan akan bersuara dan menyebutkan dari kalangan polisi dan tentara yang PKI. Hal ini adalah “kemungkinan” yang bersifat spekulasi karena tidak diketahui alasan pasti.

<sup>53</sup> Wawancara dengan Malaka tanggal 22 April 2011.

<sup>54</sup> Wawancara dengan Malaka tanggal 22 April 2011. Ada keterangan lain yang menyebutkan bahwa masih ada lagi terdapat korban-korban pembunuhan, karena ada teman-teman yang sesama tahanan dulu tidak pernah terdengar kabarnya lagi. Ada kemungkinan mereka dibunuh atau mereka tidak mau kembali ke kampung halamannya. Mereka tersebut adalah orang-orang PKI Sawahlunto/Sijunjung yang diakomodasikan ke Padang dan Bukittinggi. Keterangan ini baru bersifat spekulasi, karena tidak ada keterangan pendukung yang menguatkan keterangan ini.

menghancurkan PRRI.<sup>55</sup> Saafrudin Bahar mengatakan bahwa penumpasan terhadap PKI lebih didorong oleh gerakan massa yang tidak lagi menginginkan PKI tumbuh di Sumatera Barat.<sup>56</sup>

Akan tetapi, dalam penumpasan dan tindak kekerasan terhadap PKI di Sawahlunto/Sijunjung tidak ditemukan aksi balas dendam dan juga tidak ditemukan aksi massa, seperti pembakaran rumah, kantor, atribut dan pembunuhan massal terhadap PKI dan simpatisannya.<sup>57</sup> Dalam kasus Sawahlunto/Sijunjung dendam sengaja diciptakan oleh penguasa dan fenomena tersebut keluar dari pola umum yang selama ini terpahami.

Tempat penahanan orang-orang PKI dan simpatisannya di Sawahlunto/Sijunjung adalah Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) bangsal 10 lantai 2<sup>58</sup>, kantor polisi dan kantor buterpra yang ada di kawasan Sawahlunto/Sijunjung, diantaranya adalah Kantor Polisi dan Buterpra Muaro Kalaban dan Sijunjung, dan biasanya digunakan hanya sebagai tempat penampungan sementara. Di saat jumlah tahanan meningkat, mereka dipindahkan ke Lembaga Pemasyarakatan (LP) yang ada di Sijunjung dan rumah-rumah kosong yang cukup untuk menampung lebih kurang 155 orang.<sup>59</sup>

---

<sup>55</sup> Mestika Zed (dkk), *Sumatera Barat di Panggung Sejarah 1945-1995* (Sumatera Barat : Bidang Penerbitan Khusus Panitia Peringatan 50 Tahun RI Sumatera Barat, 1992), hlm. 301-350.

<sup>56</sup> Saafrudin Bahar, "Peranan Elit Sipil dan Militer dalam Dinamika Integrasi Nasional di Indonesia (Kasus Etnik Minangkabau di Daerah Sumatera Barat 1945-1984)", *Disertasi* (Yogyakarta : Universitas Gadjah Mada, 1996), hlm. 410-510.

<sup>57</sup> Keterangan ini senada dikatakan oleh semua nara sumber yang pernah diwawancara.

<sup>58</sup> Lihat lampiran XVIII.

<sup>59</sup> Wawancara dengan Ramadani tanggal 24 April 2011.

Penahanan di Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung berakhir dalam beberapa gelombang, tapi rata-rata tahanan dilepaskan pada tahun 1977-1978.<sup>60</sup> Pada tahun tersebut tidak ada lagi yang ditahan. Pembebasan terhadap orang-orang PKI ditandai dengan surat pembebasan yang diberikan oleh pihak militer.<sup>61</sup> Akhir dari penahanan tersebut melahirkan duka dan suka bagi orang-orang PKI. Kesengsaraan tidak sampai di sini, lepas dari penjara mereka harus menggunakan stempel “ekstapol” dalam kartu identitas mereka, agaknya ini merupakan “tahanan luar” dalam istilah sekarang.<sup>62</sup>

Tidak hanya itu, mereka harus kehilangan hak-hak sebagai warga negara, dan sebagian masyarakat mengucilkan mereka. Dalam pemerintahan mereka sering mendapatkan perlakuan intimidasi dan sentimen yang berlebihan. Kepahitan tersebut tidak hanya dialami oleh orang-orang PKI secara pribadi, melainkan juga terhadap keluarga dan kerabat-kerabatnya. Penangkapan dan penahanan dibedakan menjadi tiga golongan, yang pertama golongan A yaitu para pemimpin PKI, golongan B yaitu anggota organisasi yang dianggap berafiliasi atau berhubungan dengan PKI, golongan C adalah orang-orang yang bukan anggota PKI dan juga bukan anggota ormas yang berhubungan dengan PKI, akan tetapi mereka ini adalah orang yang ikut-ikutan dalam gerakan komunis di Indonesia.<sup>63</sup>

---

<sup>60</sup> Wawancara dengan Sumino tanggal 23 April 2011.

<sup>61</sup> Arsip Sumino, Laksus Pangkobkamtip Daerah Sumatera Barat dan Riau, Teptada, Kartu Pembebasan Sementara No. ES/11/1970. Tanggal 26 November 1970. Ketua Tim Penyelesaian Tahanan Daerah yang ditanda tangani oleh Ramlan H.S Kolonel Infantri NRP. 12683. Tidak semua dari orang-orang PKI mendapatkan surat pembebasan.

<sup>62</sup> Wawancara dilakukan dengan Ramadanil, Amirudin, Suryanis dan Sulistiawati tanggal 24 April 2011.

<sup>63</sup> I. G. Krisnadi, *op.cit.*, hlm. 5-6.

### C. Pelaku Penumpasan

Penumpasan yang terjadi akhir 1965 dan awal tahun 1966 yang terjadi di Sawahlunto/Sijunjung tidak seradikal yang terjadi di Jawa dan Bali.<sup>64</sup> Pada umumnya pelaku penumpasan PKI adalah dari pihak polisi dan militer dan dibantu oleh pihak keamanan desa/nagari sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya. Dalam penumpasan tersebut terdapat tindak kekerasan yang rata-rata dilakukan oleh pihak polisi. Sebagaimana dengan kasus lainnya, di bawah tekanan dari pihak militer barulah penumpasan berlangsung keras.<sup>65</sup>

Pelaku penumpasan PKI hanya dari polisi dan militer dengan dibantu oleh pihak keamanan desa/nagari, sedangkan masyarakat umum tidak ikut serta dalam membasmi PKI di Sawahlunto/Sijunjung. Hal ini karena daftar orang-orang PKI sudah ada ditangan para polisi dan CPM (Corp Polisi Militer), sehingga pada proses penumpasan yang aktif hanyalah polisi. Bahkan ada dari masyarakat umum yang menyuruh orang PKI untuk kabur. Ini merupakan sebuah bukti bahwa tidak ada perselisihan yang serius yang terjadi di Sawahlunto/Sijunjung antara PKI dan masyarakat lainnya.<sup>66</sup>

Adapun orang-orang yang aktif dalam proses penumpasan tersebut adalah Sudarsin selaku Bupati Sawahlunto/Sijunjung dan Dandim Jailani serta Danres

---

<sup>64</sup> Syafei Datoek, *op,cit.*, hlm. 14.

<sup>65</sup> Saskia E. Wierenga, *Penghancuran Gerakan Perempuan di Indonesia* (Jakarta: Garba Budaya, 1999), hlm. 280-290.

<sup>66</sup> Wawancara dengan Zubir tanggal 31 Januari 2012. Hal serupa juga dikatakan oleh Syamsudin pada tanggal 24 April 2011.

Kompol Amuis.<sup>67</sup> Langkah awal yang mereka ambil adalah untuk mengamankan kader/simpatisan PKI, untuk itu pimpinan-pimpinan daerah tersebut menyerukan kepada seluruh anggota/simpatisan PKI agar melaporkan diri kepada pihak berwajib yang terdekat. Hal ini merupakan langkah akomodasi untuk tokoh PKI untuk tingkat kabupaten.

Untuk wilayah kecamatan, orang-orang PKI diinstruksikan untuk melapor ke kantor polisi resort yang terdapat di masing-masing kecamatan, dan hal ini ditangani oleh pihak berwajib yang berada dalam kesatuan polsek tersebut. Untuk tingkat kecamatan juga dibantu oleh buterpra yang merupakan daerah pengawasan militer untuk tingkat kecamatan. Untuk Kecamatan Sawahlunto yang cukup luas, didirikanlah Distrik Kepolisian Sumatera Barat, sehingga untuk wilayah Sawahlunto orang-orang PKI yang berada pada wilayah itu harus melapor ke distrik kepolisian. Komandan distrik itu saat terjadi penumpasan PKI adalah Suratman.<sup>68</sup>

Penumpasan terhadap PKI di Kecamatan Sumpur Kudus, dilakukan oleh anggota polisi sektor Sumpur Kudus, buterpra Sumpur Kudus dan hansip. Polsek saat itu dipimpin oleh Harsono, buterpra dipimpin oleh Nursalim, mereka adalah orang-orang yang keras terhadap PKI. Selain itu, untuk memudahkan kerja polsek dan buterpra, mereka dibantu oleh hansip-hansip yang ada di setiap nagari di Kecamatan

---

<sup>67</sup> *Daftar Nama Bupati Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung dan Masa Pemerintahan*, Dokumentasi Kantor Bupati Sijunjung Provinsi Sumatera Barat. Keterangan juga didapat dari Wawancara dengan Amirudin tanggal 24 April 2011.

<sup>68</sup> Arsip Polisi Sektor Kecamatan Silungkang. Awalnya polsek ini adalah distrik kepolisian mengingat wilayah Kecamatan Sawahlunto yang cukup luas.

Sumpur Kudus. Hansip tersebutlah yang pergi memanggil orang-orang PKI, akan tetapi kalau ada yang lari atau bersembunyi, maka pengejaran akan dilakukan oleh polisi. Penangkapan-penangkapan yang dilakukan sangatlah mudah, karena daftar anggota PKI sudah berada di tangan Dansek.<sup>69</sup>

Keadaan nagari pada waktu penumpasan sangat mencekam, siang dan malam selalu dilakukan razia dan pengejaran terhadap orang-orang PKI yang lari dan bersembunyi. Petugas keamanan nagari (hansib) sebelum terjadi Gestapu adalah orang-orang OPR dan orang-orang yang memiliki kedekatan dengan PKI, tetapi pada saat penumpasan terjadi kekosongan petugas keamanan. Hal ini menyebabkan suasana semakin tidak terkendali, nagari dikuasai oleh tentara dan orang-orang anti komunis yang selalu melakukan penggeledahan kepada rumah-rumah penduduk, terutama ke rumah orang-orang PKI.<sup>70</sup>

Pelaku penumpasan untuk daerah Sijunjung juga dilakukan oleh polisi dan hansip, tidak ada aksi massa dalam penangkapan tersebut dan militer juga tidak melakukan tindakan apa-apa. Polisi yang aktif dan tegas kepada orang-orang PKI saat itu adalah Tambunan dan Suragi. Orang-orang PKI yang ditangkap dikumpulkan pada sebuah rumah dan di dalam rumah tersebut dilakukan interogasi. Dalam melakukan interogasi, polisi melakukan pemukulan terhadap orang-orang PKI, dari

---

<sup>69</sup> Wawancara dengan Zainudin tanggal 30 Januari 2012.

<sup>70</sup> Wawancara dengan Asmaniar tanggal 25 Agustus 2011.

pemukulan tersebut terdapat lebam di wajah orang-orang PKI. Selain itu juga terdengar jeritan dan rintihan dari orang-orang PKI.<sup>71</sup>

Tidak semua dari militer dan polisi yang melakukan tindak kekerasan, ada sebagian dari mereka yang baik, kekejaman hanya saat di depan pimpinan. Sebagaimana yang diutarakan Tambunan :

Memang kami sebagai alat negara dan untuk mempertahankan keutuhan Negara kesatuan republik Indonesia (NKRI), harus bertindak tegas kepada orang-orang yang mencoba untuk memberontak dan merusak ketentraman umum. Perihal dengan tindak kekerasan yang kami lakukan, hal tersebut hanyalah prosedur dalam interrogasi yang kami lakukan. Dan ada satu hal yang harus dipahami, bahwa tidak semua dari kami yang kurang ajar atau melakukan kekerasan secara verbal maupun fisik sebagaimana yang sering diungkapkan oleh orang-orang PKI. Kami paham, rasa dendam dan sakit hati karena penyiksaan yang dialami oleh PKI, menimbulkan kebencian yang mendalam terhadap kami (polisi atau militer). Akan tetapi ini hanya prosedur, walaupun ada indikasi pelanggaran HAM di dalamnya.<sup>72</sup>

Pengakuan yang diberikan oleh salah seorang pelaku penumpasan ini terdapat indikasi pembelaan diri dan terdapat makna permintaan maaf. Sebagai alat negara, tidak sepenuhnya kesalahan dilimpahkan kepada polisi-polisi yang bertugas. Akan tetapi, ada pihak yang lebih bertanggungjawab terhadap peristiwa tersebut, yaitu elit pemerintah yang memberikan perintah dalam menumpas PKI sampai ke akar-akarnya.

Tindak kekerasan yang terjadi selama penumpasan terhadap PKI di Sawahlunto/Sijunjung merupakan sebuah langkah yang diambil oleh polisi sebagai

---

<sup>71</sup> Wawancara dengan Asarudin, Johan Arifin, Maunar, dan Zakaria tanggal 30 Januari 2012.

<sup>72</sup> Wawancara dengan Tambunan tanggal 20 April 2011.

pihak keamanan untuk membuat orang-orang PKI jera, serta bertujuan untuk membuat mereka mengakui kejahatan dan rencana yang akan mereka lakukan. Kekerasan tersebut mendapatkan legalitas dari pemerintah, ada pendapat yang mengatakan bahwa dalam situasi setengan darurat tidak berlaku hukum dan hak azasi manusia.<sup>73</sup>



---

<sup>73</sup> Wawancara dengan Zubir tanggal 31 Januari 2012.

## BAB V

### KESIMPULAN

Di Sawahlunto/Sijunjung terdapat sekitar ± 15.000 orang kader/simpatisan PKI, yang terdiri dari anggota PKI dan organisasi massanya, yaitu Pemuda Rakyat, Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani), Barisan Tani Indonesia (BTI) dan Sentral Buruh Seluruh Indonesia (SOBSI) yang juga terdiri dari serikat buruh yang bernaung di bawahnya seperti : Serikat Buruh Kereta Api (SBKA), Serikat Buruh Tambang Indonesia (SBTI), Serikat Buruh Kehutanan Seluruh Indonesia (Serbuksi) dan Serikat Buruh Daerah (SEBDA).

Dalam menjalankan programnya PKI di Sawahlunto/Sijunjung hampir sama dengan semua PKI dan ormas yang tersebar di seluruh Indonesia, yang membedakannya, hanyalah cara dalam menjalankan programnya. Kalau di Jawa PKI dan ormas PKI seperti SOBSI dan BTI melancarkan program dengan radikal, yang diwujudkan melalui aksi sepihak, sedangkan di wilayah ini berjalan dengan aman dan biasa-biasa saja, sehingga ketegangan politik tidak merata terjadi di lapisan masyarakat.

Sebagai partai yang besar saat itu, PKI dan ormasnya juga pernah melakukan hal-hal yang semena-mena terhadap masyarakat, di samping mereka memiliki visi dan misi untuk mensejahterakan masyarakat menengah kebawah. Pola perekrutan yang dilakukan oleh PKI dan ormasnya dalam mencari anggota, hampir sama dengan yang dilakukan oleh partai politik saat ini, yaitu dengan memberikan bantuan-bantuan. Selain itu, ada beberapa masyarakat yang bergabung dengan PKI karena

sadarnya. Saat ditanya mengapa mau masuk PKI, mereka menjawab PKI merupakan partai besar dan tidak ada larangan untuk bergabung dengan PKI.

Setelah terjadi peristiwa 1 Oktober 1965, keadaan berubah drastis. Terlepas dari benar atau tidaknya terjadi pemberontakan yang didalangi oleh PKI, karena sulit memahami kondisi yang terlahir akibat ketegangan politik. Disatu sisi kejadian tersebut merupakan bagian dari konflik internal Angkatan Darat, dan sebagian lagi menyebutkan kejadian tersebut merupakan bentuk dari usaha PKI dalam meng-komuniskan Indonesia. Satu fakta yang tidak terbantahkan, yaitu dalam proses penumpasan banyak terjadi tindak kekerasan, baik fisik maupun mental serta pembunuhan yang terjadi kepada orang-orang PKI atau yang dituduh PKI. Keadaan ini sulit diterima dalam sebuah negara yang konon katanya ber-prikemanusian.

Pada awal pemberitaan, keadaan biasa-biasa saja, dan masyarakat dan pemerintahan daerah tingkat II Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung menjalankan aktifitas mereka seperti biasa. Yang terjadi hanyalah gunjingan dari mulut ke mulut setelah pemberitaan atas pembunuhan di Lubang Buaya. Tidak ada yang berani mengambil sikap, pemerintahanpun diam dan menunggu instruksi dari pusat.

Setelah banyaknya terjadi demonstrasi yang menuntut pembubaran PKI di Padang, barulah pemerintahan daerah Tk II yang bekerja sama dengan polisi dan militer memanggil dan mengumpulkan orang-orang PKI. Dalam perkumpulan tersebut, orang-orang PKI mengutuk kejadian berdarah di lubang buaya dan dengan kesadaran sendiri membubarkan dan mengundurkan diri dari PKI dan ormasnya. Kejadian tidak berhenti di situ, dengan alasan demi keselamatan mereka, maka pada

hari itu kader/simpatisan PKI langsung ditahan. Ditakutkan akan terjadi tindak anarkis dari masyarakat yang panas akibat pemberitaan di media.

Dengan sistem pengkotakan dan marginalisasi yang diterapkan oleh pemerintah, pemerintah berhasil menempatkan PKI pada sudut musuh bersama. Dalam masyarakat, dengan sistem yang diterapkan pemerintah memberikan klasifikasi yang jelas terhadap PKI. *The construction of the outsider* mampu memilah-milah antara masyarakat umum dan orang PKI. Hal ini secara sengaja atau tidak sengaja membuat masyarakat termobilisasi untuk membenci serta mengucilkan orang-orang PKI.

Tindak kekerasan yang terjadi setelah penangkapan, yaitu terjadi di penjara atau tempat yang dijadikan sebagai penjara oleh polisi. Tindak kekerasan terjadi berupa, pemukulan, siksaan fisik, kekerasan mental, pembunuhan sampai pada tindak asusila berupa pemerkosaan. Untuk menyikapi keadaan ini seakan pemerintah Rezim Orde Baru di bawah pemerintahan Suharto memberikan legitimasi terhadap segala tindak kekerasan dan pembunuhan tersebut.

Dampak dari tindakan ofensif ini tidak hanya terhadap orang-orang PKI, akan tetapi juga pada kerabat dan familiinya. Kenyamanan dalam bermasyarakat tidak ditemukan kepada keluarga orang PKI, baik dalam menjalani kehidupan sehari-hari atau sebagai warga negara. Bagi orang-orang PKI pun, setelah keluar penjara mereka juga diwajibkan untuk selalu melapor ke pos polisi atau militer terdekat. Tidak hanya intimidasi selalu yang didapat oleh orang PKI serta keturunannya, keturunan atau kerabat PKI tidak mendapatkan hak-hak yang layak sebagai seorang warga negara.

Dalam pemerintahan, kebanyakan keturunan PKI dicekal, dengan dalih bahwa mereka adalah keturunan orang PKI yang tidak beradab. Di dalam masyarakat pun, tidak sedikit orang yang sentimen, walaupun ada yang bisa menerima mereka layaknya manusia biasa.

Sebagaimana yang telah penulis nyatakan berulang-ulang kali di atas, bahwa sulit memahami suatu peristiwa politik, dimana banyak terjadi konspirasi yang membuat kita berbeda pandangan. Pada dasarnya dalam penulisan ini, tidak ada indikasi untuk mengungkit-ungkit kisah pedih yang dialami oleh PKI, dan juga tidak ada usaha untuk menjelek-jelekan pihak yang anti terhadap PKI. Penulis hanya melihat peristiwa penumpasan PKI di Sawahlunto/Sijunjung sebagai warisan peristiwa politik yang terjadi di pusat. Ke depannya diharapkan masyarakat Indonesia lebih terbuka dalam menerima perbedaan. Pemerintah dalam hal ini tidak melakukan tindakan diskriminatif terhadap keturunan orang-orang PKI, sebagai akibat dari kesalahan pendahulunya.

## **DAFTAR PUSTAKA**

### **A. Arsip**

Arsip pribadi A. Mansur. Berupa kliping koran “Harian Semangat” tentang sejarah perjuangan rakyat Sawahlunto/Sijunjung.

*Daftar Nama Bupati Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung dan Masa Pemerintahan Tahun 1949-2011*, Dokumentasi Kantor Bupati Sijunjung Provinsi Sumatera Barat.

*Nama-nama Komandan Distrik Militer Sawahlunto/Sijunjung yang bertugas dari tahun 1965-1968*, Dokumentasi Distrik Militer 0310 Sawahlunto/Sijunjung.

*Laksus Pangkobkkamtip Daerah Sumatera Barat dan Riau, Teptada, Kartu Pembebasan Sementara No. ES/11/1970. Tanggal 26 November 1970. Ketua Tim Penyelesaian Tahanan Daerah yang ditanda tangani oleh Ramalan H.S Kolonel Infantri NRP. 12683*, Arsip Sumino.

*Surat Keterangan Latihan Kemiliteran Buruh/Tani. SK-01/0310/7/1965*, Komando Daerah Militer III 17 Agustus. Komando Resor Militer 33/Wirajudha. Arsip Sumino.

*Daftar Jumlah Anggota PKI tahun 1966*, Arsip Nadiar.

*Daftar Nama Anggota PKI Untuk Kecamatan Sumpur Kudus*, Arsip Kecamatan Sumpur Kudus.

*Surat Keterangan 058/MADA/KD/I/1963, Kepala Markas III Hansip Sumatera Barat*. Arsip Zainudin.

### **B. Surat Kabar**

Haluan, 1 Oktober 1955

Angkatan Bersenjata, 8 Maret 1966

\_\_\_\_\_, 4 Mei 1966

\_\_\_\_\_, 4 Mei 1966

\_\_\_\_\_, 16 Mei 1966

### C. Artikel, Laporan, Skripsi dan Thesis

Alfian Yusra, "Pemilihan Umum 1955 di Sumatera Barat : Studi Kasus Tentang Kemenangan Masyumi di Kanagarian Guguk VIII Koto, Kecamatan Guguk, Kabupaten 50 Kota". *Skripsi*. Padang : Universitas Andalas, 1998.

Asvi Warman Adam. *1965: Tahun yang tak pernah berakhir*. Dalam Dewi Fortuna Anwar (ed), *Konflik Kekerasan Internal ; Tinjauan Sejarah, Ekonomi-Politik, dan Kebijakan di Asia Pasifik*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, LIPI, LASEMA-CNRS dan KITLV-Jakarta.

Bappeda Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung. *Sawahlunto/Sijunjung Dalam Angka 2002*. Sawahlunto/Sijunjung :Bappeda Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung 2004.

Colombijn, Freek . "Explaining the Violent Solution in Indonesia", *The Brown Journal of World Affairs*. Volume IX, Issue 1. 2002.

Cribb, Robert. "Genocide in Indonesia 1965-1966". *Journal Of Genocide Research*, Volume 3 Number 2. USA : Research Network in Genocide Studies, 2001.

Datoek Syafei. "Catatan harian (korban 1965)". Suara Kita (Organ Yayasan Penelitian Korban Peristiwa 1965, Edisi No. 01 april. Tangerang: Penerbit YPKP, 2007.

Nasution. "Pemekaran Wilayah Di Sumatera Barat : Studi Tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya (1999-2005)". *Skripsi*. Padang : Unand, 2009.

Rika Wahyuni. "Zainar : Biografi Seorang Aktifis Gerakan Wanita Indonesia (Gerwani) di Sungai Sariak Kabupaten Padanmg Pariaman Pada Tahun 1958-2008". *Skripsi*. Padang : Universitas Andalas, 2010.

Risdha Nugroho Budiyanto, "Aktivitas Gerwani Di Kota Semarang Tahun 1950-1965". *Skripsi*. Semarang : Universitas Diponegoro, 2009.

Saafrudin Bahar. "Peranan Elit Sipil dan Militer dalam Dinamika Integrasi Nasional di Indonesia (Kasus Etnik Minangkabau di Daerah Sumatera Barat 1945-1984)". *Disertasi*. Yogyakarta : Universitas Gadjah Mada, 1996.

Thomas Santoso. *Kekuasaan dan Kekerasan* . Dalam *Masyarakat, Kebudayaan dan Politik*. Surabaya : Fisipunair, Oktober 2001.

Yenny Narny "Violence in The Anti-Communist Tragedy in West Sumatera". *Thesis*. Canberra : Australian National University, 2008.

## D. Buku

- Ahmad Syafi'i Ma'arif. *Studi tentang pencalunan dalam Konstituante, Islam dan masalah kenegaraan*. Jakarta: LP3ES, 1985.
- Armyin An (dkk). *Sejarah Perjuangan Rakyat Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung 1833 – 1950*. Sijunjung : Inforkom, 2004.
- Cribb, Robert. *Pembantaian PKI di Jawa dan Bali 1965-1966*. Yogyakarta : Mata Bangsa, 2000.
- Gootschalk, Louis. "Mengerti Sejarah". terj. Nugroho Notosusanto. Jakarta: UI Press, 1986.
- Gusti Asnan. *Mimikir Ulang Regionalisme : Sumatera Barat Tahun 1950-an*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007.
- \_\_\_\_\_. *Demokrasi, Otonomi dan Gerakan Daerah: Pemikiran Politik Orang Minangkabau Tahun 1950-an*. Padang: Citra Budaya, 2006.
- \_\_\_\_\_. *Pemerintahan Sumatera Barat Dari VOC hingga Reformasi*. Yogyakarta: Citra Pustaka 2006.
- Hasan Raid. *Pergulatan Muslim Komunis : Otobiografi Hasan Raid*. Yogyakarta : LKPSM-Syarikat, 2001.
- Hermawan Sulistyo. *Palu Arit di Ladang Tebu*. Jakarta : KPG, 2000.
- I. G. Krisnadi. *Tahanan Politik Pulau Buru (1969-1979)*. Jakarta : PT LP3ES Indonesia, 2000.
- Kahin, Audrey. *Dari Pemberontakan ke Integrasi, Sumatera Barat dan Politik Indonesia 1926-1998*. Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 2005.
- \_\_\_\_\_. dan George McTurnan Kahin. *Subversi sebagai Politik Luar Negeri: Menyingkap Keterlibatan CIA di Indonesia*. Translation. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, Kempen (Kementerian Penerangan Republik Indonesia), 1997.
- Kuntowijoyo. *Radikalisisasi Petani*. Yogyakarta: Benteng, 2002.
- Markas Besar ABRI. *Bahaya Laten Komunis di Indonesia Jilid II : Penumpasan Pemberontakan PKI 1948*. Jakarta : Pusat Sejarah dan Tradisi ABRI, 1998.

Mestika Zed, Eddy Utama & Hasril Chaniago. *Sumatera Barat di Panggung Sejarah 1945-1995*. Sumatera Barat : Bidang Penerbitan Khusus Panitia Peringatan 50 Tahun RI Sumatera Barat, 1992.

\_\_\_\_\_ dan Hasril Chaniago. *Ahmad Husein : Perlawanan Seorang Pejuang*. Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 2001.

\_\_\_\_\_. *Pemberontakan Komunis Silungkang 1927 : Studi Gerakan Sosial di Sumatera Barat*. Yogyakarta : Syarikat Indonesia, 2004.

Muhammad Rasjid. *Di Sekitar Pemerintahan Darurat Republik Indonesia (PDRI)*. Jakarta : Penerbit Bulan Bintang, 1982.

Reni Nuryanti. *Perempuan Berselimut Konflik : Perempuan Minangkabau di Masa Dewan Banteng dan PRRI*. Yogyakarta : Penerbit Tiara Wacana, 2011.

Ridwan Saidi. *Lakon Politik "Che Guevara Melayu" Dokumentasi teror PKI 1955-1960*. Jakarta : Institute for Policy Studies (IPS), 2006.

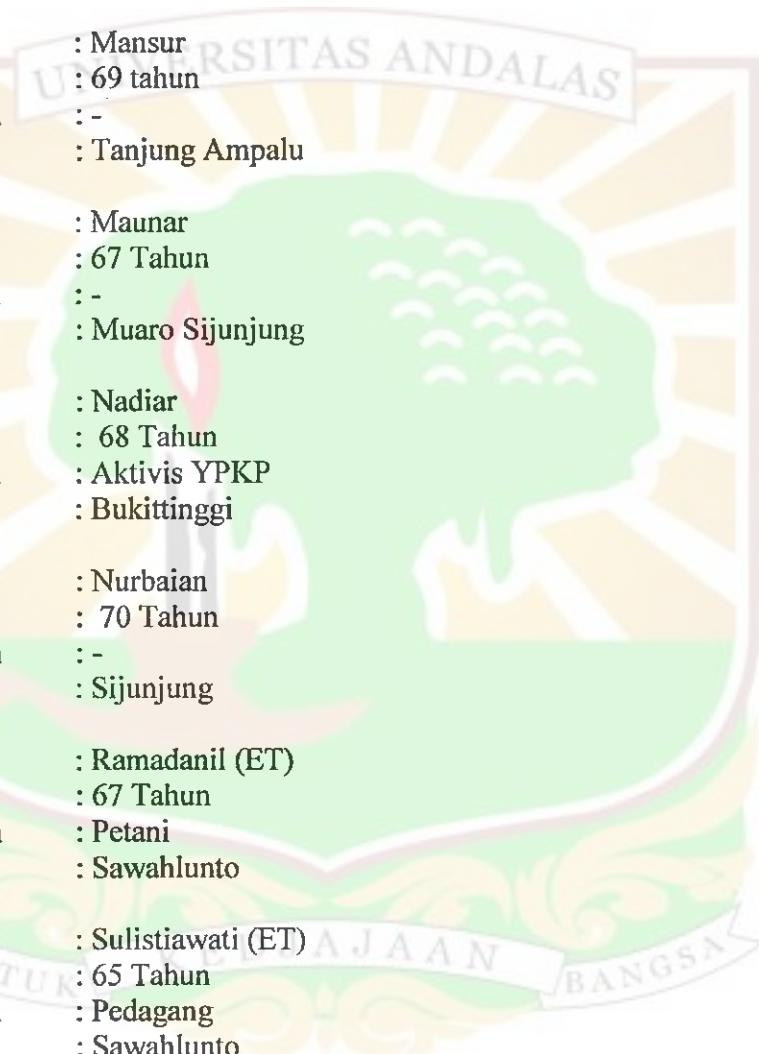
Roosa, Jhon. *Dalih Pembunuhan Massal : Gerakan 30 September dan Kudeta Suharto*. Jakarta : Hasta Mitra, 2008.

Wierenga, Saskia E. *Penghancuran Gerakan Perempuan di Indonesia*. Jakarta: Garba Budaya, 1999.

Zaiyardam Zubir. *Pertempuran Nan Tak Kunjung Usai : Eksplorasi Buruh Tambang Batubara Ombilin Oleh Kolonial Belanda 1891-1927*. Padang : Andalas University Press, 2006.

## **DAFTAR INFORMAN**

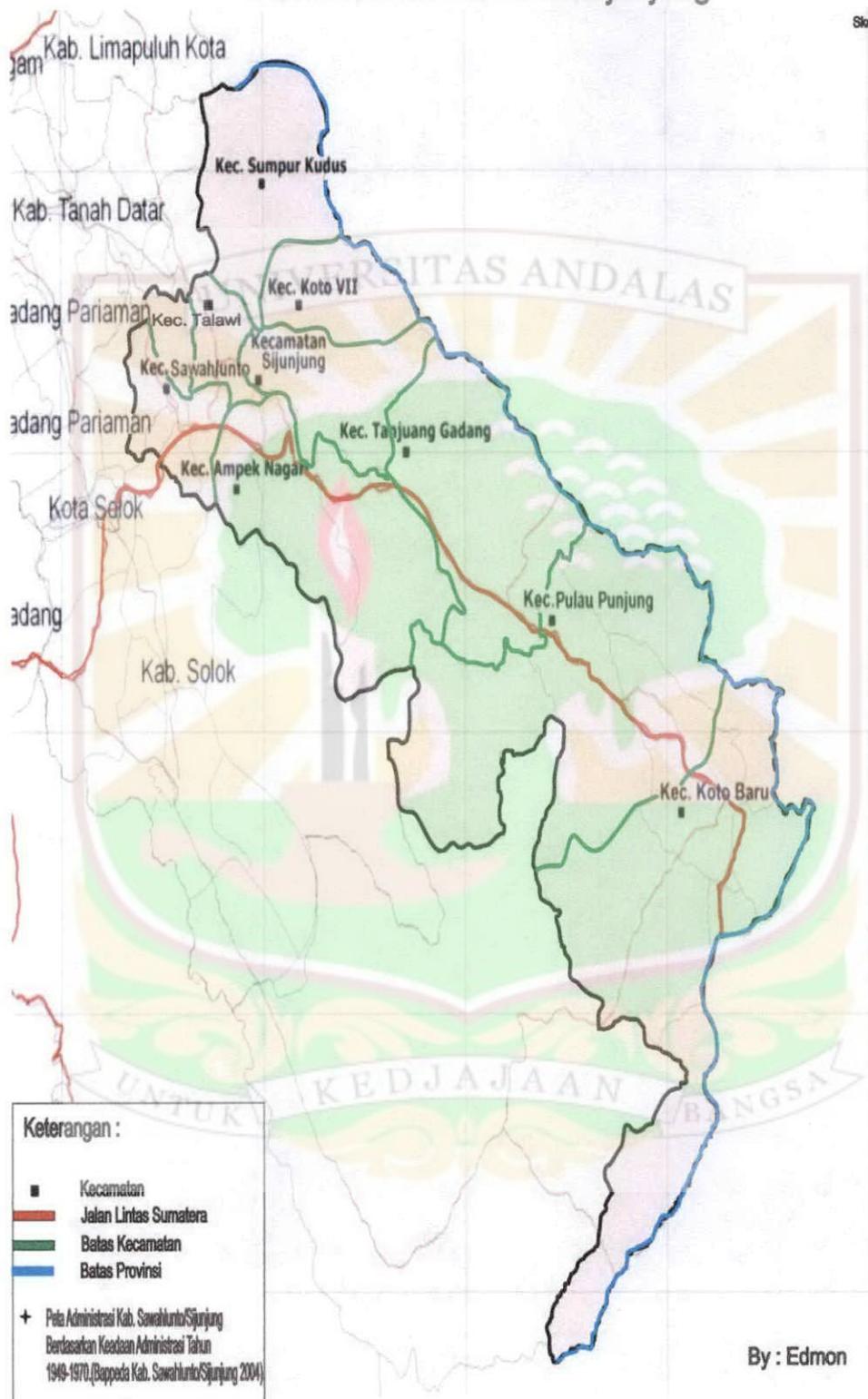
1. Nama : Amirudin (ET)  
Umur : 78 Tahun  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Pamuatan
2. Nama : Asarudin  
Umur : 69 Tahun  
Pekerjaan : -  
Alamat : Muaro Sijunjung
3. Nama : Asmaniar (ET)  
Umur : 69 Tahun  
Pekerjaan : -  
Alamat : Muaro Kalaban
4. Nama : Harun (ET)  
Umur : 69 Tahun  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Kumanis
5. Nama : Jahar (ET)  
Umur : 74 Tahun  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Padang Panjang
6. Nama : Jamal (ET)  
Umur : 75 Tahun  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Kumanis
7. Nama : Johan Arifin  
Umur : 70 Tahun  
Pekerjaan : -  
Alamat : Muaro Sijunjung
8. Nama : Johar (ET)  
Umur : 70 Tahun  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Kumanis

- 
9. Nama : Malaka (ET)  
Umur : 68 Tahun  
Pekerjaan : Wirausaha  
Alamat : Sijunjung
10. Nama : Mansur  
Umur : 69 tahun  
Pekerjaan : -  
Alamat : Tanjung Ampalu
11. Nama : Maunar  
Umur : 67 Tahun  
Pekerjaan : -  
Alamat : Muaro Sijunjung
12. Nama : Nadiar  
Umur : 68 Tahun  
Pekerjaan : Aktivis YPKP  
Alamat : Bukittinggi
13. Nama : Nurbaiyan  
Umur : 70 Tahun  
Pekerjaan : -  
Alamat : Sijunjung
14. Nama : Ramadani (ET)  
Umur : 67 Tahun  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Sawahlunto
15. Nama : Sulistiawati (ET)  
Umur : 65 Tahun  
Pekerjaan : Pedagang  
Alamat : Sawahlunto
16. Nama : Sumiah  
Umur : 71 Tahun  
Pekerjaan : -  
Alamat : Pulau Punjung

17. Nama : Sumino (ET)  
Umur : 65 Tahun  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Alamat : Sawahlunto
18. Nama : Suryani (ET)  
Umur : 70 Tahun  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Alamat : Sijunjung
19. Nama : Suryanis (ET)  
Umur : 73 tahun  
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga  
Alamat : Pamuatan
20. Nama : Sutiun  
Umur : 64 Tahun  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Tanjung Ampalu
21. Nama : Tambunan  
Umur : 66 Tahun  
Pekerjaan : -  
Alamat : Talawi
22. Nama : Zainudin  
Umur : 78 Tahun  
Pekerjaan : Petani  
Alamat : Kumanis
23. Nama : Zakaria  
Umur : 70 Tahun  
Pekerjaan : -  
Alamat : Muaro Sijunjung
24. Nama : Zubir  
Umur : 76 Tahun  
Pekerjaan : -  
Alamat : Kumanis

## Peta Kab. Sawahlunto/Sijunjung

Skala 1 : 250.000



By : Edmon

# Berdirinya Kabupaten Swl/Sijunjung

Setelah Kurir Maju Arif menyerahkan Tan Tuah Bagindo Ratu di rumah Guru Syukur, kemudian ia melanjutkan perjalanan ke Padang Laweh yang telah di bumi hancarkan tentara Belanda, sementara itu Tan Tuah Bagindo Ratu minta kepada Wali Peran Tanjung Bonai Aur A.Rajo Du belang untuk mengutus kurir menghubungi Camat Koto VII Rustam Efendi.

Pada tanggal 23 Februari 1949 diperintahkan Agus untuk mewakili Camat Koto VII di Lembaru dengan membawa surat dari Pemerintah Pusat, dan sekali gus minta datang menemu kurir Pemerintah Pusat tersebut di Tanjung Bonai Aur, dia sebelumnya ditetapkan Hasan Basri

Staf Camat Koto VII sebagai pelaksana tugas, selama Camat berpergi bersama Darwis berangkat bersama camat menemui kurir Pemerintah Pusat di Tanjung Boai Aur.

Setelah bertemu di Tanjung Bonai Aur, Camat Koto VII menugaskan kurir pemerintah pusat tersebut (Tan Tuah Bagindo Ratu) ke Markasnya di Lembaru Tanjung, dan kepada Camat Koto VII sesudah makan malam diperlukan surat dari Pemerintah Pusat kepada Rustam Efendi yang billy menunjuk Tan Tuah Bagindo Ratu sebagai Bupati Militer Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung.

Pada malam itu juga Hasan Basri dan Darwis (Bambang) ditugaskan untuk membuat surat undangan menghadiri Rapat esok harinya di Masjid Tauhid Koto Gadang Tanjung Bonai Aur, diantarnya yang diundang M.Syarif Dt.Gunung Emas, M.Zen Dt.Bijo Dirajo dari Tanjung Achipal, M.Syafei Idris dari Padang Laweh, Marah Tayab dari Sumpur Kudus.

Rapat yang dilaksanakan di Masjid Tauhid Koto Gadang tersebut dihadiri 17 orang, yakni Tan Tuah Bagindo Ratu, Rustam Efendi Amir Mahmud, M.Syarif Dt.Gunung Emas, M.Zen Dt.Bijo Dirajo, H.Syafei Idris, Hasan Basri, Darwis (Bambang), Marah Tayab, Maju Arif, M.Saman Ahmad, A.Malin Dubalang, Saidin Dt.Perpatih Suanggih, Jasem Pandito, Jamiruddin Mantari Sutan dan Munaf Dt.Patih, dan kepada Salim Halim dipertanggung jawabkan untuk menghubungi Komandan front Jajar Bebastani dan Jaka Makmun Dt.Ringkayo Muilia, dan lainnya.

Dalam rapat tersebut setelah mendengar isi surat Gubernur Militer Propinsi Sumatera Barat nomor 49/GM/Ist. tanggal 18 Februari 1949 tentang penunjukan Tan Tuah Bagindo Ratu sebagai Bupati Militer Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung, anggota rapat menyetujui beberapa keputusan antara lain: menunjuk M.Syarif Dt.Gunung Emas, M.Zen Dt.Bijo Dirajo, H.Syafei Idris dan Marah Tayab, sebagai staf penasehat Bupati Militer Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung.

Staf administrasi ditetapkan Hasan Basri dan Darwis. Bam bang staf parbakenan/logistik, Malin Dubalang, Saidin Dt.Perpatih Suanggih, Jasem Pandito, Jamiruddin Mantari Sutan dan Munaf Dt.Patih, dan kepada Salim Halim dipertanggung jawabkan untuk menghubungi Komandan front Jajar Bebastani dan Jaka Makmun Dt.Ringkayo Muilia, dan lainnya.

Pada tanggal 27 Februari 1949 diadakan rapat dengan pimpinan Rustam Efendi, dirumah Biaro Kumania, yang di tempati Laus Moja Sutan Kehutanan dari Buitinggl, yang dihadiri Rustam Efendi, Salim Halim, Berma wi Zen, Amir Mahmud, Johar Yakub, M.Zen Dt.Bijo Dirajo, Jasem Pandito, A.R.DT.Rajo Dubalang, M.Saman Dt.Rajo Batuh, A.Rahman, Makmun Dt.Rangkayo Mulia, M.Aras Intan Satu, Syamsu Anwer, Bur Yusuf, Saleh, M.Rusyid, Serma PHB Lamuis dan Abd Muhsin Munaf.

Selesai rapat, sebagian besar dari anggota rapat meninggalkan rumah tempat tinggal Laus dan mencari tempat bermalam dipondok sawah dan ladang masya

rakat disebelah Batang Sinar, yang dianggap aman.

Pada tanggal 28 Februari 1949 rapat dilanjutkan dengan anggota yang lebih lengkap, dipimpin Tan Tuah Bagindo Ratu, yang diremukkan sebagai Bupati Militer Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung, berdasarkan SK Gubernur Militer Propinsi Sumatera Barat tanggal 18 Februari 1949 no.49/GM/Ist.

Pada tanggal 3 Maret 1949, rapat dilanjutkan di rumah M.Jamil Dt.Arta Direjo Tanjung Boai Aur, dengan acara: Pembagan deereah kewedanaan, menetapkan staf Bupati Militer dan pejabat kabupaten kewedanaan dan kecamatan.

Staf Bupati Militer dan Pejabat lainnya sebagai berikut: Bupati Militer Tan Tuah Bagindo Ratu, pembantu Bupati Militer, Kapten Zainal Arifin, dan Ajun Komisaris Polisi Amir Dt.Palindih, staf penasehat, H.Syafei Idris, M.Zen Dt.Bijo Dirajo, M.Syarif DT.Gunung Emas dan Marah Tayab.

SEkretaris Penata Tata usaha Tk.I Jajar Bebastani, kepala kantor Z. ADT.Rajo Dubalang, urusan personalia Abd.Munaf, urusan keuangan Syaifullah, dan pembantu urusan keuangan Umer Muluk, kepala kehutanan A.Rahman dan Laus Marajo Sutan, Kejaksaan Dt.Pahlawan Gareng, perhubungan (POs/PTT) Harun dan Kasini, P.P dan K., Dt.Peduko Sireajo, pengadilan negri Buyung Dt.Gadang Bandaro pekerjaan Umum Opzeter Ibrahim Maju Indo.

Pejabat untuk kewedanaan Sawahlunto, wedana Militer Nurdin Dt.Sati, kedewanaan Tanjung Ampaial, Wedana Militer Rus tam Efendi, Kewedanaan Sijunjung Wedana Militer H.Rusli Abd.Wahid, dan kewedanaan Batang Hari, St.Mansyur Dt.Sati.

Pejabat Militer Sumpur Kudur A.Rivai, camat Militer Koto VII Amir Mahmud, Camat militer Talawi Syaricin Dt.Kabut, camat militer Sawahlunto, Sutan Salim camat Militer Koto IX Dimudik (IV Nagari) A.B.Dt.Rajo Mudo, camat militer Sijunjung Abd.

Rauf, camat militer Tanjung Gadang M.Unir Dt.Tanall, camat Militer Pulau Punjung, Nain Dt. Mangguyang dan camat Militer Koto Baru, A.Rauf St. Mansyur

Dengan terbentuknya pemerintahan Sipil Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung, sekaligus telah terpisah dari kabupaten Tanah Datar dan dapat melaksanakan segera tugas pemerintahan dalam wilayah kerjanya.

Pada tanggal 17 Mei 1949, selesa rapat PDRI di Sumur Kudus, Gubernur Militer Sumatra Barat mengadakan rapat lagi mengenai Kabupaten sawahlunto/Sijunjung dan hadir pada rapat tersebut, Gubernur Militer Sumatera Barat, Mr.Muhsin Rasid, Juir Muhammed dan H. Ilyas Yakub staf penasehat G

ubernur, Bupati Militer Kab.Swl/Sijunjung dan anggota staf Bupati militer, dan para Wedana se kabupaten Sawahlunto/Sijunjung dan beberapa pejabat pemrintahan lainnya.

Rapat tersebut memutuskan meninjau kembali kebijaksanaan sebelumnya dan menetapkan kebijaksanaan baru, dengan menghapuskan kewedanaan Tanjung Ampalu dan memindahkan Ratu Efendi sebagai wedanaan militer Batang Hari.

A.Jarlis Bebastani sebagai sekretaris, ditunjuk untuk melaksanakan tugas Bupati Militer, karena Tan.Tuah Begindo.Ratu dan H.Rusli Abd Wahid mendaftar tugas baru di-PDRI berdasarkan SK.Gubernur Militer Provinsi Sumatera Barat No.120/GM/49 tanggal 15 Mei 1949.

Wedana Militer Nurdin Dt.M Mejo Sati memindahkan sebagai wedana militer Sijunjung, menggantikan H.Rusli Abd Wahid, Kapten Bur Yusuf diangkat sebagai wedana Militer Sawahlunto Saridin Dt.Kabut dipindahkan ke staf Bupati Militer, dan pengannya diangkat Syamsu Anwar sebagai camat Militer Talawi, Camat Militer A.B.Dt.Rajo Mu do digantikan Letnan I.M.Aras Intan Sati sebagai camat Militer IV nagari.

Sesuai dengan situasi perjuangan waktu itu, Markas/Kantor Bupati Militer kabupaten Sawahlunto/Sijunjung, dipindahkan dari Tanjung Bonsai Aur Ke Tamparugo, begitu juga zender Radio Republik Indonesia (RAI) juga telah berada di Tamparugo di bawa pengawasan Ir. Indraraja Menteri Perhubungan PDRI.

Pusat pemerintahan Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung dari Tamperungo pindah ke Durian Gedang, Sungai Batung, Sikabur, Langki, Buluh Kasok, Lubuk Tarab, dan di Lubuk Tarab ini diadakan rapat dengan semua camat dan komandan-front untuk membicarakan masalah iyu ren Perang guna melanjutkan perjuangan.

Sewaktu terjadinya pergolakan Daerah jabatan Bupati Swl/Sij. Kapten Mansur Sami, kemudian Jabatan Bupati Swl/Sijun Jung selama dalam pergolakan daerah selang berganti dalam beberapa bulan saja, dan Bupati yang ke-VII ini digantikan oleh

A.Rival sebagai Bupati Swl/Sij ke-VIII.

Jabatan Bupati selanjutnya sampai tahun 1962, dijabat berturut oleh Prajitno, R.Sadi Purwopranoto, dan Daramin St.R.Adin sebagai Bupati ke dan kemudian digantikan oleh Mawardi St.Mangkuto sebagai Bupati ke-XII.

Kapten Sudarsin yang menggantikan Mawardi St.Mangkuto merupakan Bupati ke-XIII dan memangku jabatan sampai tahun 1962, dan pada waktu itu ibu kota Kabupaten Swl/Sij sudah berada di Sijunjung dan pada masa ini pulalah dilaksanakan pemindahan ibukota Kabupaten Swl/Sij ke Muaro Sijunjung, dan pada masa itu juga dibangun Astrama perumahan pegawai yang ada di Gambok sekarang.

Sewaktu Bupati Sudarsin dengan swadaya daerah dan menghimpun dana yang ada dibangun sebuah Kantor Bupati di Gambok yang himpun dana yang ada di bangun sebuah Kantor Bupati di Gambok yang dijadikan Gedung SPMA Daerah sekarang.

Selain kantor Bupati astrama pegawai negeri juga dibangun dengan harapan pegawai Pemda TK.II Swl/Sij dekat tinggal dari kantor karena perhubungan pada masa itu salu satunya dengan Kereta api dari Sawahlunto yang waktu tibanya akan kembali tidak tepat menurut jadwal waktu yang ditentukan.

Harapan dari Bupati Sudarsin pada waktu itu tidak sepenuhnya terlaksana, sebab ke banyaknya pegawai lebih suka tinggal di Sawahlunto. Padang Sibusuk dan Tanjung. Am-palu dengan berbagai alih antara lain karena jauhnya tempat berbelanja sarana yang cukup memadai selanjutnya masih hujan dan seribu satu alas yang mereka kemukakan.

Bupati Sudarsin mengakhiri jabatannya pada awal tahun 1967, dan menyerahkan jabatannya kepada letkol Jamrin Jurus Yunus sebagai Bupati yang ke XIV terhitung mulai tanggal 20 Februari 1967 sampai 30 Juli 1980.

Dalam masa jabatan Bupati Jamris Yunus, kantor Bupati yang dulunya di Gambok dipindahkan ke Muaro dan menempati bekas Kantor PN Tambang Ombilin Kantor yang ditempati Bappeda Seluruh dan dinas jawatan dihimpun dibawah satu atap menempati bekas Gudang padi dan terakhi bangunan itu dijadikan Gedung Pertemuan Daerah dan sekolah sedang tersebut sudah tidak pula sedang yang terlihat dibekas bangunan tersebut sebuah gedung bertingkat dua yang megah dan bersifat yang terbaca pada papan namai Kantor Peng-

dilan negeri Muaro.  
Alasan pemindahan Kantor  
Bersambu Kep Hal VIII

Sumber.: A. Mansyur, Kliping Koran Semangat 1980-2003 Tentang Perjuangan Masyarakat Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung.

# Liku-Liku Perjuangan dan Pertempuran Di Kab. Sijunjung

UNIVERSITAS ANDALAS

Setelah Wedana Sijunjung H. Rusli Abdul Wahid, menerima berita tentang pelanggaran.

persetujuan Ranvil le oleh pihak Belanda, Wedana Sijunjung mengadakan rapat kiat dengan Jawatan, Pasukan rakyat, Pemuka masyarakat Sijunjung untuk menyeber lusinan berita tentang situasi Negara dan penyerangan tentara Belanda ke berbagai kota di Sumatera Barat, seperti Bukittinggi, Solok dan Sawahlunto, serta Sijunjung yang juga akan jadi basaran perdudukan Belanda.

Dalam rapat kiat tersebut diambil keputusan, untuk terus berjaga-jaga siang malam mengawas orang keluar masuk; mengungkap aksi perseratan, rakyat supeya menyengkut kehutannya dan Tionghoa Sijunjung diperintahkan mengungsi ke Air hancur.

Pada tanggal 31 Desember 1948, di jembatan Muaro Batuk dan beberapa mobil truk yang mengangkut kaln dan minyak ditembak pesawat Belanda, dan rakyat di Sijunjung mulai mengungsi ke daerah yang dianggap aman.

Pesukan Singa Harau pimpinan Peida Altudin, Jam 7 pagi tanggal 2 Januari 1948 sampai di Sijunjung setelah menghadang pasukan Belanda di beberapa tempat menuju Sawahlunto dan pada hari itu juga Wedana Rusli Abdul Wahid bersama staf dan aparat Pemerintah Kecamatan Sijunjung, meninggalkan Sijunjung dan mengungsi ke daerah yang dianggap aman.

Tidak lama kemudian tentara Belanda memasuki Sijunjung dari arah Tanjung Ampalu dengan

beberapa mobil, yang disebut jang-jalan melakukan penembakan secara membabi buta, dan esok harinya tentara Belanda mengadakan razia askir Sijunjung dan menangkap rakyat yg ditemuinya dari menembak bebe rpa orang rakyat biasa.

Kepada rakyat yang meninggalkan rumahnya dan mengungsi kehutannya, Belanda mengajak untuk pulang kerumahnya dan mereka tidak akan di ganggu, tetapi rakyat telah ber tekad untuk berjuang dan tidak dapat mereka bujuk, kecuali beberapa orang bekas Romusa Hel Ho Jepang yang berasal dari luar daerah Sumber.

Pada tanggal 4 Januari 1948 Belanda melakukan penembakan dari udara, ketempar pengungsi rakyat di Tanah Bedantung, dan Muaro. Juga tidak lupa dari asasden penembakan dari udara, tetapi rakyat Muaro telah lebih dulu mengungsi ke Siloek dan Durlan Gadang, dan selanjutnya hampir setiap hari Belanda melakukan patroli ke seluruh Sijunjung.

Komandan front Tanjung Ampalu Adakan Rapat.

Dengan terjadinya penembakan dari udara pada beberapa tempat pengungsian rakyat Sijunjung, (4/1-4%) didapat informasi bahwa Belanda akan ber malam lagi di Tanjung Ampalu pada tanggal tersebut, dan untuk mengatur langkah penyerbuan, dilakukan rapat kiat di Surau Pedang Daar Aur Gading.

Untuk menyelidiki berita tersebut ditugaskan Bahrumayah, Abd Munaf dan Inyik Dagang, dari Surau Padang Datar ke arah Pasar Tanjung Ampalu, setelah

sampai di Pasar Tanjung Ampalu di belakang rumah Syarifah kepangkot/terserobok tentara Belanda dan terjadi tembak me nembak, Abd Munaf tertembak pada kakinya sedang Bahrum syahdan Inyik Dagang asal Duri an Gadang kembali ke Surau Gadang Datar melaporkan kejadian tersebut.

Mendengar laporan Bahrum syah dan Inyik Dagang, Komandan Front memerintahkan A. Munaf untuk memimpin pencarian Abd. Munaf yang telah terluka tersebut, akhirnya dapat di temui esok harinya dan ternyata tidak bias berjalan kakinya membengkok kena peluru.

Pada hari itu juga diadakan rapat kiat di Markas Solok Bayur Padang Datar Aur Gadang, dan pasukan PMT dibawah pimpinan Sersan Rekimin dari Pamus tan juga hadir pada rapat tersebut, dan pada rapat kiat itu yang intinya merumuskan untuk mencari informasi tentang kegiatan tentara Belanda di Sawahlunto dan Sijunjung, dan usaha mendapatkan perbekalan dan perlengkapan kebutuhan perang.

Kepada Dr. Rajo Garik ditugaskan untuk mencari informasi ke Sawahlunto, dan tanggal 5 Januari 1949, didepat informasi, bahwa tentara Belanda akan pergi lagi ke Sijunjung pada tanggal 8 Januari 1949 sebanyak 1 kompi dengan pimpinan Major Sersan Jonsen, dan mempergunakan kendaraan truk sebanyak 6 buah.

Berdasarkan informasi dari Dr. Rajo Garik, Komandan Front Tanjung Ampalu Sersan Rekimin memerintahkan Kopral A. Rahman untuk melaksanakan

penghadangan di batas Pamus tan setelah tentara Belanda kembali dari Sijunjung dan pada jam 6 sore terjadi pencegatan dan pertempuran singgasana dengan rencana, dan sebelumnya terangkap 2 orang mata mata Belanda, A.Musil Muhamad dan Syahdin.

Dalam pertempuran ini dipilih kita gugur Idrus Hakim dan dari tentara Belanda Kapten Hendrik, pencegatan dilakukan hamplir setiap kali tentara Belanda lewat ke Sijunjung dan sebaliknya, dan pada tanggal 10 Januari 1949 terjadi lagi pertempuran karena kepergok tentara Belanda dan seorang gugur dari pasukan kita..

Dengan seringnya Belanda mundur mandir dari Sawahlunto ke Sijunjung, Komandan Front Bermawi Zen dan Komanda Sektor Salim Halimi dan Amir Mahmud, mengadakan rapat kilat dan memutuskan untuk memindahkan alat-alat pada gejadian S.R Tanjung Ampalu ke Tarak Melintang, dan membakar gedung tersebut supaya tidak ditempati lagi oleh pasukan Belanda.

Kepada pasukan PMT diperintahkan untuk siaga terus dan melakukan pencegatan terhadap tentara Belanda dimana saja ditemui, dan pada tanggal 30 Januari 1949 terjadi lagi pertemuan di Solok Batu Hamper dari jam 2 sampai jam 6 sore dipimpin Kasim (Jepang), H. Abas Seharuddin Ampera.

Dalam pertempuran tersebut Kasim memberikan aba-aba peringatan dengan bahasa Jepang, sehingga Belanda mengira pasukan Tanjung Ampalu dibantu serdadu Jepang, kerena itu meminta tahanan pasukannya untuk mundur saja meninggalkan 8 orang yang telah korban oleh pasukan kita.

Berdasarkan pertimbangan keamanan, Komandan Front mengeluarkan perintah, supaya para hu sepanjang sungai ombilin dilakukan pengangkutan rakyat supaya menghindari kehutan, dan melewati rumah terutama yg masih dipunggali jalan Pamutatan-Tanjung Ampalu dan Bulu Roto dan sepele yang melanggar perintah dianggap musuh.

Pada hari itu juga diterima laporan dari front Manggih Banyak Padang Laweh, bahwa pada hari TNI Resimen III Kurau dibawah pimpinan Letda Yuks Atom dan Letda Yahya sebagai berada ditempat, dan akan dilanjutkan perjalanan ke Batu Sangkar.

Komandan front manggih Banyak, A.Wahid, kepada Komandan Resimen III Kurauji minta agar menangguhkan keberangkatannya ke Batu Sangkar untuk beberapa hari, dan mohon kesempatan untuk membantu pasukan mencenggat Belanda di tempat itu, dan permintaan Komandan front Manggih Banyak ini didukung pula oleh Bermawi Zen dan Salim Halimi.

Sementara itu kepada rakyat diperintahkan untuk melakukan sabotase dengan merebakkan kayu besar dan kelapa ke jalan raya dari Landiaro Koto Panjang sampai ke Titian tareh, dan ke seok harinya tentara Belanda yang datang dari Sawahlunto mendapat rintangan untuk terus ke Sijunjung, dan tembakan dari pasukan kita, sehingga tidak je di terus ke Sijunjung.

Untuk melapaskan kemarahan nya sebelum pulang ke Sawahlunto, mereka membakar 60 buah rumah rakyat di Batu Gedang, 9 buah di Koto Panjang, dan hari berikutnya dengan pesukan yang lebih besar mereka ulangi kembali untuk terus ke Sijunjung, dan di front Manggih Banyak dicegat pasukan resimen III Kurauji yang belum jadi berangkat ke Batu Sangkar, pihak Belanda mengalami korban lebih banyak karena penghadangan yang tiba-tiba, sedang dipimpin kita seorang gugur dalam pertempuran tersebut.

Pada tanggal 5 Februari 1949 datang kurir/staf Gubernur Sumatera tengah untuk menemu mul Bebastani dan Jaksa Makmun Dr.Rangkayo Mulia di Padang Sibusuk, kebetulan yang dicari sedang berada di Markas Padang Datar Aur Gading, dan pada pertemuan tersebut disepakati untuk mengadakan rapat dengan Pemerintah Darurat RI (PDRRI) di Sumpur Kudus, dan kesepakatan supaya diperketat setiap Nagari selama sebulan.

Pada Tanggal 16 Februari 1949 tentara Belanda mengadakan patroli ke Koto Padang Laweh dan membakar 125 buah rumah rakyat, dan berita itu sampai ke staf PDRRI di Sisawah, dan Gubernur Militer Sumatra Mr.Tengku Mohd.Hassen dan rombongan melakukan peninjauan ke Padang Laweh dengan pengawalan yang dipimpin A. Wahid. (Bersambung).

Sumber : A. Mansyur, Kliping Koran Semangat 1980-2003 Tentang Perjuangan Masyarakat Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung.

# Berbagai Pertempuran di Kewedanaan Sijunjung

Dengan berhasilnya digagalkan patroli belanda ke Batu Manjukur dan Kampung Baru dari Jurusan Palangki dan Padang Sibusuk, dapat terhindar korban yang lebih banyak, namun dalam pertempuran ini tentu tidak sekaruh korban yang dapat dihindari.

Dalam operasi tentara Belanda ke Batu Manjukur itu, terjadi korban 4 orang, 2 Goliya, 1 orang TNI dan 1 orang anak dibawah umur, sedang dalam penghadaan di Palangki terdapat korban 14 orang, 3 orang Goliya, 2 orang anak anak, 1 orang perempuan tua, dan 8 orang pemuda yang seorang di penggal kepala.

Dengan terjadinya operasi besar bekar tentara Belanda ke Batu Manjukur, pasukan Gerilya mempertanyakan front dan sabotase untuk menghalangi gerakan pasukan Belanda, untuk kompi I dipimpin Umar Peto Rajo beranggotakan dari perintua de Padang Sibusuk, Kampung Baru dan Batu Manjukur, mempertanyakan front Padang Sibusuk dengan Komandan Front Sersma Ma'ani Lupin, dan Kompi II dipimpin Ibnu Hajar Ampang Basir, beranggotakan pemuda kecamatan IV Nagari ditempatkan Taman Putih.

Kemudian berdasarkan instruksi perintah Gubernur Militir Sumatra Barat tanggal 5 April 1949 no 248/GM/Instr, pemuda dan pasukan yang bergerilya melawan tentara Belanda, diketahui nemanya menjadi pasukan Mobil Teras (PMT) dari Batu dan Pengawal Nagari dan Kota (BPNK).

Pada bulan Mei, kekuatan PMT dibantu pasukan Mobil dibawah pimpinan Letnan Ayub Bakar menempati front Sopan Ayam palangki, sekitar 1 seku bersenjatakan Karabén Jepang, Cekki (senjata Jepang model Bren) dan sebuah mitriliur 12,7.

Sebulan kemudian daerah Batu Manjukur I/III Komando daerah Pertempuran Solok/Sawahlunto, dibentuk 3 sektor, sektor A dipimpin Letnan Muda Ruslan Usman meliputi Kecamatan Talawi ditambah Lunto dan Kubang, sektor B dipimpin Letnan Muda Ma'lik Efendi meliputi kecamatan Sawahlunto dan sektor C dipimpin Sersam Mayor Idrus Ramora meliputi kecamatan IV Nagari.

Sektor B dan C berada dibawah Komando Pertempuran Sawahlunto di pimpin Letnan II Syofyan Tumala, dan Zainal Arifin Abbas diangkat menjadi Kapela Markas Pertahanan Rakyat Kecamatan IV Nagari dan Letnan I M.Aras Intan Satu di angkat jadi Camat IV Nagari.

Patroli Belanda semakin sering dilakukannya, terutama terutama pada malam hari dan kadang-kadang bermalam di Palangki, tapi pihak Gerilya tidak amelakukan pernyerangan, karena mengakibatkan rakyat yang tidak bersalah jadi korban dan rupanya penduduk yang mereka dikenakan asasan diburni hangus kan.

**Situasi di Kewedanaan Sijunjung.**

Setelah dilanggarinya perjanjian Revinile dengan melakukan pernyerangan serentak, darat dan udara setiap kota di Indonesia dengan menjatuhkan bom dari udara dan pertempuran darat menggunakan senjata modern waktu itu disebut pertahanan pasukan kita.

Dengan semakin gawatnya situasi, pada tanggal 24 Desember 1948 diadakan rapat BPNK di Surau Batu Peher Air Gedung, dibentuk front front pertempuran dibawah pimpinan Letda Salim Halimi untuk daerah pertempuran allian sungai Ombilin, dari Talawi, Sawahlunto; Palangki, Muaro Bodsi, dan kecamatan Koto VII, dan pertempuran Sijil dipimpin Kapten Zainuddin Tembak.

Pada tanggal 27 Desember 1948 dengan dipimpin camat Koto VII Rustam Efendi, dibentuk Dewan Pemerintahan kecamatan Koto VII yang diketuai oleh

Sumber : A. Mansyur, Kliping Koran-Semangat 1980-2003 Tentang Perjuangan Masyarakat Kabupaten Sawahlunto/Sijunjung.

Camat, dan pada 28 Desember 1948 atas perintah komandan Front semua rektor dipingir jalan besar antara Batu Gandang sampai Batu Balang diperintahkan supaya mengungsi kepedalaman karena diduga tentara Belanda akan memasuki Tanjung Ampalu dan Sijunjung.

Kepada para pemuda diperlakukan untuk menghadang total dengan perlawanan rakyat semesta dan untuk itu setiap Negari diadakan sarana pemuda yang kapan saja dapat dikerahkan ketika pertempuran dalam 2 kelompok pemuda, extrims/gerilya atau BPNK.

Kelompok pemuda extrims/gerilya sejak waktu waktu dikirim ke front pertempuran sedang pemuda BPNK tetap mengeradaan penjagaan tentang kegiatan spionase Belanda, karena musuh belum melakukan aksinya terlebih dulu mengirim mata mata mereka seperti Intelijen Dienst (ID)

Pasukan extrims/gerilya kecakapan Koto VII dibagi atas 4 front, dan front I dengan daerahnya Tanjung Ampalu sampai batas Padang Sibauk dipimpin H. Abbas, front II Palaluan-Bulu; Rotan dipimpin Bahrusyah, front III Tanjung dan Ladang Cengkeh dipimpin Kaharuddin, dan front IV Padang Laweh dan Manggih Banyak dipimpin A.Wahid.

Keempat front tersebut berada dibawah Komandan Sektor Dua Bermawi Zen, setelah Belanda memasuki kota Sawahlunto

to 31 Desember 1948 para extrims/gerilya X, III dan IV diperingkatkan ke front Kupitan-Musro Kalaban terus ke Bukit Sawahlunto, sedang gerilya II berada bersama pemuda Pamustan, Muaro Bodu dan Palangki kebukit sebelah atas RSU Sawahlunto dan dipimpin Kapten Tembak.

### Pasukan Belanda Kasar

Gerakan yang dilakukan Belanda menuju Sijunjung pada tanggal 1 Januari 1949 salah arah dan akhirnya bertemu dengan para perlawanan yang akan menuju Sawahlunto di Muaro Bodu, pertempuran tidak bisa dielekkan dan 37 orang gugur dari pihak kita.

Karena menyadari kesasar ke Muaro Bodu, kemudian kembali ke Padang Sibauk dan sampai di Simancung belok kanan terus ke jalan Tanjung Ampalu, sampai di Batu Gandang dihadang pasukan kita yang dipimpin Roslan Jamaris.

Setelah berhasil menerobos front Batu Gandang, pasukan Belanda terus ke Tanjung Ampalu dan sepanjang jalan melakukan tembakan tanpa arah, dan se sampainya di Simpang Tiga Tanjung Ampalu pasukan Belanda salah arah lagi dan terus saja kearah jalang Sitangkal, dan setelah melewati Jembatan Tanjung Ampalu dihadang lagi oleh pemuda dibawah pimpinan Kaifiy dan Amir (keduanya orang Jagoang) tetapi tidak menjadil

hambatan untuk meneruskan tujuannya.

Setelah sampai di Lurah Jeiring Kumanis, terjadi lagi konfrontasi dengan pasukan TNI begitu peringkapan dan perbaikan yang datang dari Kumanis akhirnya tentara Belanda mundur ke Tanjung Ampalu dan bermalam di Sd no 1 Tanjung Ampalu.

Mengetahui pasukan Belanda bermalam di SD No.1 Tanjung Ampalu maka pada malam itu diadakan rapat kiat dirumah Dr. Mantiko Reno (wall Perang Palaluan) di Tanjung Gerek, dipimpin Camat Koto VII Rustam Efendi, dan dihadiri Amir Mahmud (Wall Perang V Koto) Dt.Bijo

Drajo, Salim Halimi, Abd. Majid dan sejumlah pemuda Tanjung Ampalu, Palaluan, Mengku du Kedap dan Padang Laweh.

Seusai rapat di rumah Dt. Mantiko Reno dilakukan pula rapat di Sura Gadang Datar Aur Gading yang dihadiri Dt.Bijo Drajo, Salim Halimi, Isrin Arlef Dt.Sampanhulu, Bermawi Zen, Johari Dt. Gamuk dan sejumlah pemuda Batu Gandang, Koto Panjang, Aur Gading dan Bukit Buai.

Hasil rapat diketahui tempat tersebut akan melakukan serangan jam 2.00 tengah malam ke Sd no 1 Tanjung Ampalu dalam tiga-jurusan/kelompok, untuk kelompok I dari Jurusan Barat/Kubang Gajah dipimpin Kop

rai A.Rahman, kelompok II dari Jurusan Selatan/Kandang Ilik di pimpin Sorda H.Abbas, dan kelompok III dari Jurusan Timur/Sumpadang dipimpin Letnan Muhibbin M.Majid.

Untuk mengetahui situasi lokasi sajaran yang akan dituju/tempat bermalamnya tentara Belanda, kepada Mukhtar Rajo Pahlawan, Idris Imam Pakih Sinaro dan Dahlias, ditugaskan untuk menyelidikannya agar dalam pernyataan tidak salah alamat.

Tepat jam 2.00 tengah malam serangan dimulai sesuai dengan rencana, dan pertempuran berakhir jam 5.00 pagi tanpa korban dipihak kita, sedangkan pihak Belanda tidak diketahui berapa jumlah korban, tetapi setelah meninggal tempat ditemui mayat pembantu rumah tangga dari Guru Isanler.

Pada jam 7.00 pagi (2 Januari 1949) pasukan Belanda meninggalkan Tanjung Ampalu menuju Sijunjung, dan sepanjang jalannya melakukan tembakan tanpa arah, dan jam 8.00 pagi sampai di Sijunjung terus ke Kantor Wadana dan Kantor Polisi Sijunjung yang telah dikosongkan.

Setelah bermalam di Pasanggerahan (yang ditempati Ketua BP.7 sekarang) dan esok harinya tanggal 3 Januari 1949 melaksanakan patroli ke Pematang Penjang dan terus ke Batu Hampar perbatasan palangki, dan sekemballinya dihadang pemuda di Nagau Kandang Baru.  
(Beraimbang).

१०८ अनुवाद विजय कुमार

8-251 - 8-28, 1900

Each source site, also along the same river, has

*Leucostoma* *luteum* (Nees) Nees.

— such whole lives as we have had — do the lives now, on the old plan, but  
— the days of old are over — and the days of new beginnings begin — and the old  
— days of old are over — and the days of new beginnings begin — and the old  
— days of old are over — and the days of new beginnings begin — and the old  
— days of old are over — and the days of new beginnings begin — and the old

After discussion with Dr. L. H. Dickey, Director of the Bureau of Fisheries, P. O. Box 7, Washington, D. C., it was determined that the best method of protection against the spread of the disease is to prohibit the importation of live fish from the following countries - the

to **①** **Congress** **will** **be**  
to **②** **Oppose** **will** **be**  
to **③** **Oppose** **will** **be**  
to **④** **Oppose** **will** **be**

Haluan 13 Oktober 1955

Di Kab. Solok Majumi dapat  
55775 suara

DI KAB. SAWAH LUNTO/SDD. DJUGA MASJU  
MI LEADING.

Padang, 12-10 (Haluan).  
Sampai tgl. 5-10 jang lalu di kabupaten Solok baru jang sampai hasil pemungutan suara? ketjamatan dari 12 ketja ten tersebut, Jatu ketjamatan Kubung, X Koto Singkarak, Bukit Sundi, Lemban Gamanti, Pantai Tjermilin, Lembang Dja-ja, Sungai Pagu, IX Koto Sungai Las dan Talang. dalam tempat mana Masjumi mendapat suara terbanjak jakni:

Masjumi 55775, Parti 1934, PKI 3156, PSI 680, PSII 520, Murba 338, IP-KI 236, Sibinji ang 358, PRI 219, MTKAAM 273, PNI 196, Baperki 7, Partai Baruh 72, PPTI 10928, Parkindo 30, L.M.Isa 5, Sjam-su Bahrum 11, Pemeiji 389, Partai Rakjat 10, NU 544, PII 1836, H. Muhammad 5, Mr. Nasrun 14, PAR 38, Gerakan Pembela Pantja Siia 23, Mohd. Nur Ahmad 9, Ishak Effendi 2 A.Tomo 1, Sudarsono 11, PRN 15, Surau Injik Djambiek 8, Adat Lembaga Djambi 2, S. Atmosaputro 12, Yusuf Nasri 3, Nauman Djamil Dr. M. Azieh 2, R. Wirjewihardjo 4, M. Kamil 1, A. Maluk 19, M. Sajang 1, Rambah Husain dkk 3.

DI KAB. SW. LUNTO/SDD  
MASJUMI MENANG.

Sementara itu dalam kab. Sawah Lunto jang telah diteri ma oleh FP Kah adalah sebagi berikut:

Masjumi 22.883, Parti 12303 PKI 4104, MTKAAM 1939, PII 2048, PSII 2106, PSI 1223, Burah 31, GPP 24, Z. Abidin 3, Ishak Effendi 9, A.L. Djambi 7, PRN 63, S.I. Djambiek 11 N.Dj.Dt. M. Ameh 5, P. Rep. 14, A. Maluk 37, Murba 293, R. Wirjo 3, M. Kamil 4, IP-KI 253, Parkindo 204, H. Muhammad 11, PSRI 340, Baperki 13, R. Sudarseno 17, PRI 3, NU 323, PPTI 2829, Ikrapins 31, M. Nasrun 14, R. Atmo 17, M.K. Ahmad 14, Mr. Mohd.

Yamin 169, L.M. Isa 13, Pem-sji 174, M. Sajang 1, Sj. Bah-run 25, R. Husin 2, A.Tomo 3, Jusuf Nasri 7.

UNTUK KEDAJAAN BANGSA

B.L.R : PEMERINTAH SUPPLY PERILU 1955 / 1971  
DALAM DAERAH SUMATERA BARAT.

NO.ORD	DAERAH TINGKAT II KABUPATEN/KOTA/KOTA	P. TRG LTH.	T.S. LTH.	K.U.	KANTOR WILAYAH	GOLONGAN	P.M. LTH. D.	P.H.I. LTH. D.	P.I. PERILU LTH.	P.K. LTH.	P.I.I.	P.S.I.	PENGELUARAN PERILU	P.P. LTH.	JUMLAH SUPPLY PERILU/CH GARIS S1. LK. BMR.	JUMLAH				
																	1	2		
1.	KABUPATEN AGAM	A.	-	11.040	415	77.311	-	73	1.372	656	35.340	00	7.600	4.670	1.056	193	65	1.666	2.699	116.950
		B.	31	9.321	1.069	52.357	73.967	111	512	212	15.636	710	-	-	-	"	-	-	-	157.176
2.	KABUPATEN SOKA	A.	-	2.300	2.302	67.746	-	133	1.106	1.011	34.569	73	7.483	33	306	135	67	257	1.054	119.352
		B.	32	2.615	2.123	26.597	59.010	103	130	253	16.626	543	-	-	-	-	-	-	-	100.102
3.	KABUPATEN PADANG PARIAMAN	A.	-	2.607	126	61.510	-	6.097	305	.262	50.361	1.499	10.066	13.084	5.660	1.502	155	4.992	178.257	
		B.	1.617	2.162	16.490	10.116	119.035	6.110	319	1.252	22.619	1.377	-	-	-	"	-	-	-	217.726
4.	KABUPATEN PASERBARU	A.	-	265	1.190	32.146	-	163	119	2.001	17.260	59	1.459	0	1.160	31	59	1.016	1.027	93.567
		B.	91	471	2.207	7.211	104.592	257	60	214	3.776	201	-	-	-	-	-	-	-	120.496
5.	KABUPATEN PADANG PANGBULAN	A.	-	1.631	131	18.915	-	157	70	209	33.073	110	5.395	1.105	1.112	1.197	1.007	1.570	2.325	91.725
		B.	17	1.064	107	19.517	57.737	71	61	177	2.035	225	-	"	-	-	-	-	-	112.055
6.	KABUPATEN PASURUAN	A.	-	2.077	384	22.926	-	203	276	160	10.140	221	1.057	1.723	1.390	4.931	140	2.755	1.065	60.457
		B.	36	1.170	112	15.311	63.900	85	12	192	775	210	-	-	-	"	-	-	-	72.390
7.	KABUPATEN SOKA	A.	-	514	592	70.076	-	56	204	167	25.192	304	1.001	2.073	1.017	321	150	13.311	1.172	121.713
		B.	53	1.126	3.422	31.271	80.193	253	135	314	4.371	769	-	-	-	-	-	-	-	133.352
8.	KABUPATEN SUMBER DAWAR	A.	-	1.020	273	72.795	-	96	1.003	764	22.620	150	9.030	6.604	1.083	693	1.000	1.096	3.006	121.720
		B.	52	1.010	3.615	25.250	74.498	150	400	716	9.116	629	-	-	-	-	-	-	-	126.357
9.	KOTAMUDA BULIT TEGAL	A.	-	167	107	11.020	-	61	51	210	1.432	203	513	271	509	13	3	27	1.514	17.160
		B.	97	916	699	9.032	12.979	30	06	211	720	213	-	-	-	-	-	-	-	25.930
10.	KOTAMUDA PADANG PARIAMAN	A.	-	203	129	20.157	-	705	325	115	5.920	1.396	2.029	65	1.221	62	17	23	3.929	36.756
		B.	3.760	1.505	1.752	27.211	35.675	116	161	017	3.691	921	-	-	-	-	-	-	-	70.100
11.	KOTAMUDA PADANG PARIAMAN	A.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		B.	21	252	161	5.336	5.600	4	0	65	210	114	-	-	-	-	-	-	-	
12.	KOTAMUDA SAMARINDA	A.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		B.	111	21	115	321	3.000	0	3	111	115	37	-	-	-	-	-	-	-	
13.	KOTAMUDA S OLOK	A.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		B.	6	117	612	2.672	6.614	9	17	64	122	71	-	-	-	-	-	-	-	
14.	KOTAMUDA PADANG PARIAMAN	A.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		B.	55	572	607	7.022	13.252	13	99	211	3.075	176	-	-	-	-	-	-	-	25.763
	JUMLAH	(A.)	-	23.264	5.645	400.521	416.168	7.601	5.677	6.263	271.513	0.627	61.591	29.223	15.962	12.294	11.254	22.001	21.613	970.214
		(B.)	5.033	23.114	35.000	273.196	761.165	757.028	2.011	5.046	03.556	6.492	-	-	-	-	-	-	-	1.203.995

LETTERHEAD : - Tahun 1955. Sumber: Arsip SOSPOL  
- Tahun 1971.

Sumatera Barat

PADANO, 15 JULI 1975.  
SIS DIRECTOR PERILU.

Haluan 18 September 1957

tg. 28 September Jadi. ini. temuan pendahuluan itö. berpendidikan tekskop.

Kyai Wahab, Rois Aam NU:

## PKI partai diktator jg tak ada batasnya

Kalau mereka berkuasa, golongan lain akan ditindas

### MUSJAWARAH PARTAI ISLAM TIDAK ADA GUNA

Padang, 26-8 (Haluan).

SUATU musjawarah diantara partai Islam menurut Kyai Wahab tidak ada gunanya karena tidak akan memberikan kewajiban bagi perdoongan Islam dan partai Islam itu sendiri.

Dalam suatu keterangan kepada kita ada dijuga belakna. "Pedoman" kemaren, Rois Aam NU itu menjelaskan bahwa "djangan salah faham. PKI djika sekiranya partai Islam me ngadakan suatu musjawarah, akan akan menyebabkan ber sertai musuh Islam lainnya". Keterangan ini diberikan oleh Kyai Wahab berhubungan dengan adinya keinginan Masjumi Djawwa Tingah untuk mengadakan suatu musjawarah besar diantara partai Islam sebagai kongres Islam Kooperasi alim ulama se Indonesia di Palembang Jl. Situb, djika-kita membentuk suatu front untuk melawan front jng lainnya, maka djelas jng lainnya itu dijuga akan jng lainnya itu dijuga mengadakan perseruan.

Sebagaimana tjetoh Kyai Wahab itu bukan kendisama partai Islam dalam konstituante jng ini, namun Kyai Wahab sering menyalini keragalan, disebekian gelar Kristen dan golongan jng tidak anti Tuhan tetapi bukan Islam, tidak mau bekerja sama dengan partai Islam. "Ini adalah suatu kesalahan. Oleh sebab itu menurut pendapat saya, boriah kerjasama Islam itu tetap seperti sekiranya ini tidak berdirikan schuwah Islamiah (persaudaraan Islam)" kata Kyai Wahab selanjutnya. "Akhir PKI = borsang.

Atas pertemuan apakah akan lebih baik diadakan suatu per temuan antara partai jng ne ngalah koenia Tuhan, bukan ya di sebelah dalam golongan Islam, sekali mengingat gerakan sebagaimana Kyai Wahab menjelaskan bahwa suatu pertemuan

Tetapi dalam hal ini orang yang diancam salah faham. PKI djika mengingat Tuhan-jng sendiri, jadi baring jng kelihatan. Djadi, kalau mau mengadakan pertemuan antara partai jng mengakui adanya Tuhan, seperti "Tuhan", PKI itu tidak boleh diajak serta, ketua pemimpin NU tsb, selanjutnya.

Diktator jng tidak terbatas.

Berbitjara mengenai soal PKI, Kyai Wahab menjelaskan, bahwa PKI selama ini tetap menaikkan mereka itu tidak anti Tuhan, karena mereka belum berkuasa besar.

Selama mereka belum berkuasa, maka PKI tetap masih mendukung golongan lainnya.

Tetapi apabila mereka berkuasa, maka mereka pastilah akan mendukung golongan lainnya dan golongan PKIlah jng hanya boleh berkuasa dan memerintah.

Berdasarkan pengalaman, ia seperti tulis, maka PKI adalah sebuah faktor konseptual itu, ada yang merupakan suatu partai atau ideologi diktator jng tidak ada halangan jng tidak berpedoman pada golongan Islam, jadi Kyai Wahab seharusnya tidak berpedoman pada golongan Islam.

Sebaliknya dituduh, bahwa PKI adalah partai penting NU yang berpengaruh, itu tidak pernah membela para pengaruh Islamiah dalam perorangan maupun dalam partai Islam.

Haluan 25 Oktober 1957.

pendjuangan Tuanku Raja. orang yang keberikan dan ti-

PUTUSAN KONF. MASJUMI KAB. SOTOK

**PKI Cs. supaya dinjatakan terlarang di Sum. Tengah**

DESAK PEMERINTAH AIR TEUDING, PEMANGKUTAN ASWAMA PELADJAR KOTA SOLOK

Sabtu, 24.9. (Hab)

KOOPERENSI Masjumi Cabang Solok yang berlangsung dari 10.9.57 s.d. 21 September di Solok telah berhasil melahirkan beberapa peraturan pribina untuk Pemerintah Sumatra Tengah dan Pemerintah Kabupaten Solok seputar dengan tata pembangunan dan etika akademik dari perdjuangan Masjumi, denting S.D. Charib dan anggota D.P. Masjumi tersebut kepada Haluan.

Dalam kooperensi yang dihadiri oleh Masjumi Wilayah S. Tengah ini telah dimulai pada pagi hari dengan mengadakan sidang Presidium dan memberikan DPRD dan sesuai dengan hasil pemilihan umum jilid satu kepada para pelaksana pemilihan umum daerah, denting Ch. Basa, selanjutnya:

Menuntut perubahan Kepala Sta. Sipil tentang tata pengabdian di DPRD dan mengadakan pendeklarasi demokratis Pemerintahan S. Tengah.

Telah dilaksanakan PKI di Sumatra Tengah, pada hari ini tetap dilaksanakan sidang peraturan dasar ini. Masjumi mendeklarasi kepada KDJ-ST dan Dewan Perwakilan agar dijadikan PKI/minta organisasi sebagai parpol resmi di Sumatra Tengah dan mengajukan agar berdiri partai resmi golongan resimodifikasi/PAI di dalam tata pemergaman dasar, denting Ch. Basa.

Dilaporkan pembentukan Misi survei oleh komite ST, pertemuan dengan Komisi Nasional Aceh-Sotok yang sedang dalam pembentungan, perbaikan organisasi untuk haluan dan seputaran Solok, pertemuan dan pembentukan ST, mendeklarasi diri sebagai SLP dan ST, melaksanakan pertemuan dan seminar resmi di kota Solok, dan kota Medan dengan berdiskusi di Akhlaq dan bantuan kerja sama dengan kota Medan. Misi survei Misionari dan seputaran ST pada pertemuan dengan resmi di kota Medan dan pertemuan dengan resmi di kota Medan dengan SLP dan untuk bantuan kerja sama di kota Medan. Misi survei dan pertemuan resmi di kota Medan dengan resmi di kota Medan dan pertemuan resmi di kota Medan dengan resmi di kota Medan.

Summa Pengurus Masjumi  
di Kab. Solok

Dalam kooperensi Masjumi ini  
bagian Solok tersebut telah ter-  
bentuk puluhan pengurus di  
masing-masing sub :

Lamitan S., Syukur S., dan Kar-

im Tebar, kepala Keluarga Umar

I dan II, Direktur SD, Cawas

Basa, Sekda, Usaha, Pedagang

dan sebagainya dari A.N.D. R. H.

A. Bujangkun A., Djoko, Mak-

ro, S.A., Dr. Sulis, IB, Dr. Budi-

, N. Dr. M. Basa, Djoko D.

Mansur, Arsyad, Anis, Husaini, La-

ish, Ahmad, Sudah M., dan No-

m Junaedi

Seluruh pengurus ini telah

lulus seleksi 2 th. pertama dari 15.9.57

s.d. 13.9.59 yang diberikan Sertifikat Kepada Haluan (WA).

PENGURUS BAHU SPPK

Jalanan Kota Bandar Padang

Pada 24.9. (Haluan)

RAPAT pleno SPPK Tiba-tiba

Kota Bandar Padang yang berlangsung

pada 24.9.57 tidak dapat me-

diketahui peraturan barang yang am-

ministrasi adalah SPPK, Ketua

Umar, Fachri A., Bakri, Putih

A. Bakri, Djimin, Umar, Sek-

retaris I dan II, Abd. Aziz dan A.

Dr. Raden

Dilanjutkan pengurus dihaluan adi-

lasi pengurus bahagian resmi

Secara bahagian Organisasi I

dan II, Mansur dan M. Maksum

Secara bahagian Sosial/Educa-

si I dan II, Agus Salim dan M.

Riwandu, Secara bahagian Ke-

budaya/Olehraga I dan II, M.

dan Bahrul Salim, dan bahagian pen-

didikan dan penelitian I dan II

Asra, Thalib dan Abd. Gani, Sek-

retaris bahagian penelitian I dan II

Z. Chaidir dan Sugihardjo

SALINAN

822

PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

INSTRUKSI PRESIDEN/PANGLIMA TERTINGGI ANGKATAN  
BERSENDJATA REPUBLIK INDONESIA/ PANGLIMA BESAR  
KOMANDO GANJANG MALAYSIA  
NO. INST- 09/KOGAM/5/66

KAMI, PRESIDEN/PANGLIMA TERTINGGI ANGKATAN BERSENDJATA  
REPUBLIK INDONESIA/PANGLIMA BESAR  
KOMANDO GANJANG MALAYSIA

Menimbang : 1. Bawa untuk kepentingan kelantaran dan ketertiban dalam pelaksanaan penertiban/pembersihan personil, sebagaimana dimaksud dalam Instruksi Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersendjata Republik Indonesia/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris MPRS No.3/1966, sehubungan dengan pembubarannya dan perajearaan PKI dan ormas-ormas jang seanza/bernaung/berlindung dibawahnja, sebagai partai dan ormas-ormas teriarrang, perlu segera menjepurnakan pedoman-pedoman jang teriaut dalam Instruksi Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersendjata Republik Indonesia/Komando Operasi Tertinggi No.22/KOTI/1965 ;

2. Bawa pedoman tersebut harus mendjamin terlaksananya penertiban/pembersihan personil setjara integral, atas dasar ketentuan jang sama, dengan sedjauh mungkin menadukan faktor kepentingan keamanan dengan kepastian hukum bagi jang bersangkutan ;

Mengingat : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia No.40 tahun 1966 ;  
 2. Instruksi Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersendjata Republik Indonesia/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris MPRS No. 3/3/1966 ;  
 3. Keputusan Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersendjata Republik Indonesia/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris MPRS No. 1/3/1966 ;  
 4. Undang-undang No.18 tahun 1961 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kepagawaiian ;

Mengingat pula : Sebagai penjepurnakan Instruksi Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersendjata Republik Indonesia/Komando Operasi Tertinggi No.22/KOTI/1965 ;

MENGINSTRUKSIKAH :

K e p a d a : Semua Kementerian-kementerian/Departemen-departemen, Lembaga Negara dan Badan-badan Pemerintah ditingkat pusat dan di daerah-daerah ;

U n t u k : Dalam melaksanakan Instruksi Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Bersendjata Republik Indonesia/Pemimpin Besar Revolusi/Mandataris MPRS No.3/3/1966, berpedoman kepada ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

B A B - I

U M U M

Pasal - 1

Ketentuan-ketentuan dalam Instruksi ini merupakan pedoman untuk melaksanakan penertiban/pembersihan personil sipil maupun anggota Angkatan Bersendjata Republik Indonesia pada Kementerian-kementerian / Departemen-departemen,

Lembaga-lembaga .....

Lemah-lembaga negara iku, dan, jang diintai, baik ditindak pesat maupun didorong-lari oleh, amanah iku, ada bekas partai terlarang PKI dan er milikai iku, jang sebagian bersama/berlinangan di bawahnya dan mereka pen, eritikai, .... perban lokeri revolusi "G-30-S", termasuk k. Dalam-ketua istan jka rawuh-rawuh atau sengketa.

Pasal - 2.

Beker kebijaksanaan dan prinsip-prinsip, yang dilihat dalam Instruksi ini serta pada caumanya, adalah suatu tontonan ukuran jang an-pon dalam peninjauan terhadap hal-hal jang, atau nilainya, dengan se-olah sungkin berada dalam sebagian besar dengan keputusan hukum bag jang terdiri, ketika mer dan tiang menindakkan rasa, goral bertujuan laju laju konseren-kenari dan puguh, berlakukannya jang ber-sangkutan, untuk seluruh orang-orang yang berkebijaksanaan dan prinsip-prinsip itu menca ikon pengaruhnya. Dan an kendali obatas dilakukan aming-analing.

R.A.B - II.

KLASIFIKASI DOK. PAM. D. 1/II

Pasal - 3.

Personil-nipil atau anggota angkatan berwajib Republik Indonesia jang diketahui cindakan perberikan/penerbitan dimaksud dalam pasal 1 Instruksi ini, diklasifikasikan dalam :

**a. RUMA-KARTA PERLUH ANGGOTA LAMPUH GIAJ "G-30-S".**

Iaolah mereka jang :

1. merantjasukan, turut mengantjasukan atau mempunyai adanya perantjasukan gerakan komoro revolusi ita, terapi tidak melalui perkan kepada perangkat jan, berwajib;
2. dengan kecamaran akan perangkatjan, melakukan kojiguan-kojiguan celar polisikaman gerakan komoro revolusi tersebut.

**b. MINTA-NIKAH, IKAU, D. 1/II DAN LAKUKAN KEGIATAN "G-30-S".**

Iaolah mereka, jang, setelah merantai datu ujungan gerakan komoro revoluksi itu :

1. memundjukkan mitap, baik celar segera atau datu ujungan, jang, setelah merantai gerakan komoro revolusi itu;
2. setjarn sacer sekundjuzan mitap, baik celar perantjasukan atau datu ujungan, jang merantang basa/basa/gerakan perangketan "G-30-S".

**c. DEKLARASI PETUGALAN ALAS ANTUT D. M. HIGIKA SULISTYO RAHAYA  
LAKUKAN KEGIATAN LAMPUH GIAJ "G-30-S".**

Iaolah mereka jang :

1. mencjadi anggota buka partai terlarang PKI atau pengurus/pengurus organisasi massa jang sebagian/berlinangan di bawah batas partai tersebut, beserta aktiva-aktivisaja;
2. mencjadi anggota buka dari okta er milikai massa terlarung jan, sebagian/berlinangan/berlinangan ofisial bawah partai PKI dan mereka, jang menurut anteradi jang ada pernah terlibat dalam "Peristiwa Kedua", jang setelah terjadinya gerakan komoro revolusi itu tidak setuju te an ketemuangnya terurut kontini dan ketemuang jang kuiljar.

Pasal - 4. ....

#### ANALISI

- (1). Kondisikan terhadap perorangan yang diliputi oleh anggota organisasi bersama-sama. Organisasi ini mencakup yang terlibat seperti dibutuhkan pada pasal 3 Peraturan ini, diambil dalam:
1. penindakan (repressif) yang meliputi:
    - a. pembaharuan tata kelola; b. pembentukan komunitas dalam diberlakukan tertentu;
    - c. retooling, sosiologi, Instrumen kerja dan Republik Indonesia No. 3 tahun 1962;
  2. pencegahan (preventif), yang meliputi:
    - a. Indoctrinasi;
    - b. penindakan mental;
- (2). Kondisikan bahwa pengelolaan administratif dalam rangka peraturan-peraturan kongresional, diatur berdasarkan peraturan-peraturan keputusan kepemerintahan dan berlaku bagi anggota negara (partai); di Republik Indonesia, namun tetapi juga peraturan-peraturan keputusan kepartaiannya dibidik oleh Partai Islam dan Komunis;
- (3). bagi partai negara, menurut peraturan-peraturan keputusan keputusan keputusan kantor pusat negara;

#### Pend. 2.

Rangkuman berbagai sifat penindakan itu adalah sebagai berikut:

- (1). terhadap narator, yang termasuk klasifikasi tersebut dalam pasal 3 huruf A, diketahui yakindahan dalam bidang hukum pidana dan penindakan administratif berupa pemberantasan tidak dengan hormat, mengangkat seisme dalam proses mereka dilaksanakan;
- (2). terhadap narator, yang termasuk dalam klasifikasi tersebut dalam pasal 3 huruf B, diketahui penindakan administratif berupa:
  - a. pemberhentian tidak dengan hormat, apabila narator adalah anggota bekas PKI atau anggota orang-orang yang secara/bentuknya berlindung/kemudian dibuktikan narator tersebut, atau narator yang sekarang mampu bukti bahwa dia, memang terlibat dalam "Partisipasi Radikal";
  - b. pembentukan komunitas d. 1. . . . . atau hasil produksi d. berlaku dalam retooling, d. . . . . dilakukan indoktrinasi; apabila narator bukan anggota PKI atau anggota orang-orang yang berlindung/bentuknya dengan partai tersebut, atau narator, yang tidak pernah terlibat dalam "Partisipasi Radikal";
- (3). terhadap narator, yang termasuk klasifikasi tersebut dalam pasal 3 huruf C.1, diketahui penindakan berupa pemberantasan tidak dengan hormat.
- (4). terhadap narator, yang termasuk klasifikasi tersebut dalam pasal 3 huruf C.2, diketahui penindakan berupa penindakan keanggotaan dalam diberlakukan tertentu atau retooling, dengan dilakukan indoktrinasi.

#### Pend. 3.

Digitized by srujanika@gmail.com

UNIVERSITATIS SANDVICIANAE  
SARASVATI INSTITUTI  
LIBRARY

卷之三

三才圖會

“तांत्रिक विद्या के अन्तर्गत एक विशेष विद्या है जिसका नाम ब्रह्मविद्या है। इस विद्या का उद्देश्य ब्रह्म का ज्ञान है। इस विद्या का अध्ययन विशेष रूप से विद्युत विद्या के अन्तर्गत है। इस विद्या का अध्ययन विशेष रूप से विद्युत विद्या के अन्तर्गत है।

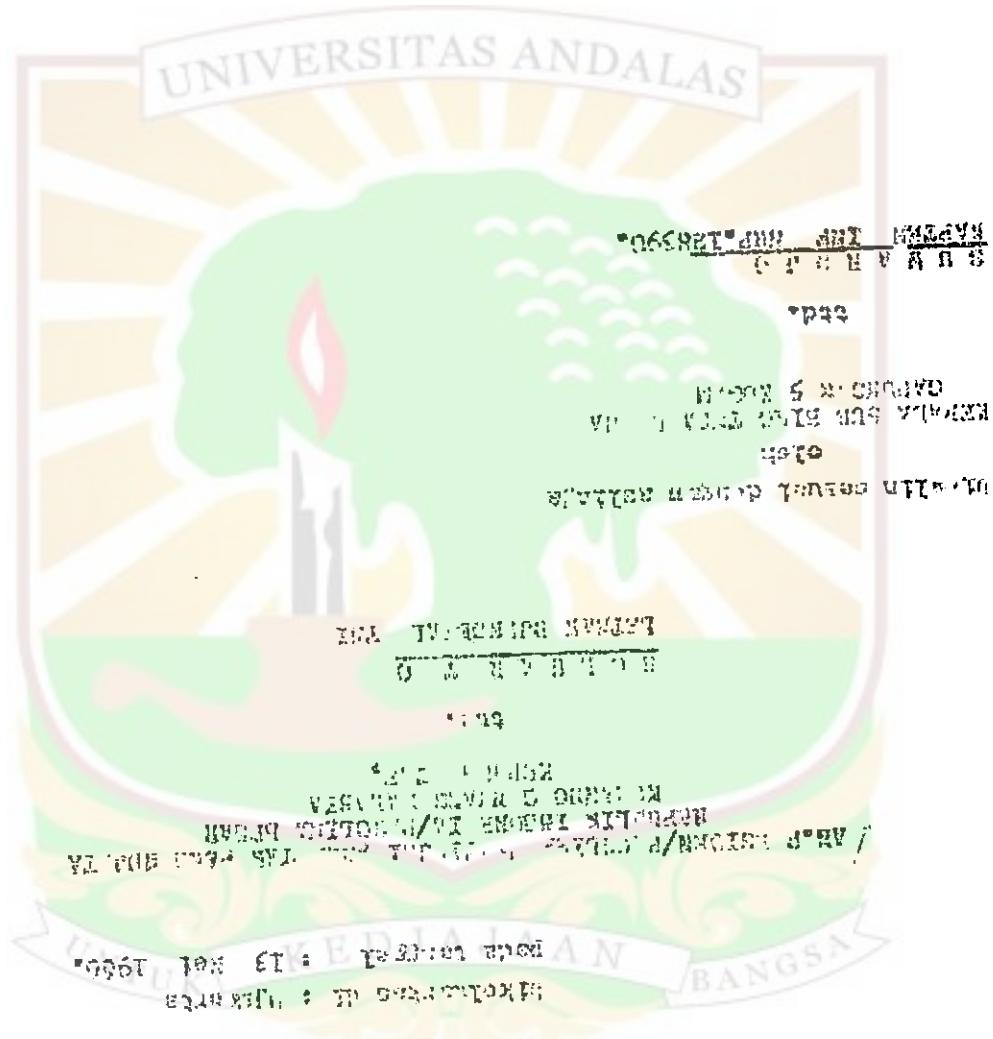
• 100 •

卷之三

ମୁହଁରେ ଏହା କଷ୍ଟକାରୀତିଥିଲା ଏହାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପାଇଲା ଏହାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ପାଇଲା ।

卷之三

1994-1995  
1995-1996  
1996-1997  
1997-1998  
1998-1999  
1999-2000  
2000-2001  
2001-2002  
2002-2003  
2003-2004  
2004-2005  
2005-2006  
2006-2007  
2007-2008  
2008-2009  
2009-2010  
2010-2011  
2011-2012  
2012-2013  
2013-2014  
2014-2015  
2015-2016  
2016-2017  
2017-2018  
2018-2019  
2019-2020  
2020-2021  
2021-2022  
2022-2023  
2023-2024



Universitas Andalas  
Jl. Sriwijaya No. 5  
Bandar Lampung 36121  
Indonesia

PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS ANDALAS  
JL. SRIWIJAYA NO. 5 BANDAR LAMPUNG 36121 INDONESIA

PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS ANDALAS  
JL. SRIWIJAYA NO. 5 BANDAR LAMPUNG 36121 INDONESIA

Angkatan Bersenjata, 4 Maret 1966

## Penumpasan „Gestapu/PKI” adalah ibadah dan wajib

Padang, 26-2 (Antara). Muhammadiyah Sumatera Barat dalam pernyataan yang dikeluarkannya setelah selesai Konferensi Daerahnya di Padang menetaskan bahwa mem batu Pemerintah dan ABRI untuk mentimbas „Gestapu/PKI” adalah ibadah dan wajib.

Kepada presiden konferensi memontri supaya segera membubarkan PKI dan ormas-ormas lain dan memohon puasa agar lem baga negara/instansi bersih dari oknum „Gestapu

PKI” dan oknum jang plintat-plintut.

Konferensi Muhammadiyah Sumatera Barat itu bertekad bhw Rakjat-ABRI dan PBR Bung Karno harus dipertahankan dan tidak bisa dipisahkan. Disamping itu Muhammadiyah tetap siag sedia mensus seskan Dwikora, mendukung terlaksananya KAA ke-2, dan Conefo serta menjokong perjuangan rakjat Afrika dan Asia. Demikian antara lain pernyataan Muhammadiyah tersebut.



Angkatan Bersenjata, 8 Maret 1966

## Hampir seluruh otak "Gestapu"/PKI Kota Padang telah ditangkap

Padang, 5 Febr. (Antara)

Dan Dlm 0312 Padang Letkol Poernomo Sipoer menegaskan bahwa sampai saat ini boleh dikatakan hampir seuruh otak "Gestapu"/PKI juga dalam daerah Kota Padang sudah berada dalam tangan pihak yang berwajib.

Menurut Poernomo Sipoer terhadap mereka yang belum tertangkap akan dilakukan pengejaran sampai kesemuanya dapat ditangkap sehingga tidak menunggu kan mereka mendeklarkan alih.

Lebih lanjut Poernomo Sipoer mengatakan bahwa yang menjadi otak "Gestapu" di

Padang bukan terdiri dari orang PKI saja, tetapi juga pegawai negeri anggota Angkatan Bersenjata dan lain-lain.

Harian "Dwikora" edisi Padang mengabarkan bahwa pada waktu akhir ini banjar pelarian "Gestapu" dari luar kota Padang yang bermakna hendak menjadi perlindungan dan begitu ketahuan mereka terus ditangkap.

Dalam hubungan ini Dan Dlm 0312 Letkol Poernomo Sipoer telah menerukan kepada masjidat subaja terus memberikan info yang positif bilamana diketahui pelarian yang masih bersembunyi.



Angkatan Bersenjata, 16 Mei 1966

Tuliggulah Muntjaha Gestapu ke III  
Kalau Komunisme itu sendiri  
tidak digenjarnya

Djakarta, 16/5 (AB-09)

KALAU kita hanja menganggap  
Gestapu/PKI sebagai komuni-  
sme itu semuanya yang tunggu-  
lah Gestapu ke III akan mun-  
tjul dimasa jang akan datang.  
Kemiskinan ditandaskan oleh  
E.H. A. Sjaichu yang di-  
Siaga Mahasiswa UI, kini  
yang lalu dihadirkan Fakul-  
tas Kedokteran UI yang diada-  
kan dalam rangka kembali ke  
bangku kuliahan.

Diketahui bahwa Komuni-  
sme bertentangan dengan Pantjasila dan kerohanian Edjaran  
Leninisme-Marxisme, tidak bisa  
ditrapsikan di Indonesia. Utusan alim-ul Aidit dalam  
hal ini kalahnya ditunjukkan  
GS yang lalu yang mengetahui  
bahwa Pantjasila itu hanja se-  
sudah alih pemersatu sadja, te-  
lat membuatkan rahasia PKI  
sendiri bahwa komunisme itu  
berkaitan dengan Pantjasila  
dan sebaliknya Aidit menen-  
tang Pantjasila hanja sebagai  
taluk balaka selama ia belum  
berkuasa.

Indonesia mau didjudul  
kepada PKI.

Pengalaman yang dilaku-  
kan oleh PKI sebagai perju-  
gan di bawah perikemanusiaan te-  
lah membangkitkan kemarahan  
an rakyat karena PKI men-  
dusai negara kita kepada RRT  
dengan tindakan mengadakan  
Gestapu, bahkan sekarang me-  
reka melakukan kegiatan ge-  
rilya politik di bawah negeri men-  
dirikan bermartajam badan bo-  
neka seperti EWAA dan lain-lain.  
Hal ini dihubungkan gula oleh  
K.H.A. Sjaichu dengan peleda  
dan bom ke III RRT yang bu-  
kan merupakan suatu kebetulan  
an sadja, tapi sudah direncana-  
nakan yang sifatnya lain tidak  
untuk menakutkan kita.

K.H.A. Sjaichu yang mem-  
berikan sambutan atas nama  
pimpinan cabang DPR-GR  
lebih lanjut menjelaskan  
bahwa PKI adalah ulat yang  
tahan udji dan mereka akan  
segera menjusurn kebutaan untuk  
kemudian bangkit kembali.  
Dalam hubungan ini disampaikan  
perihal harapan agar para  
siswa dianugerah setenzah ber-

pimpinannya hanja tinggi  
di dalam demokrasinya. Lang-  
kah K.H.A. Sjaichu mengumpama-  
kan agar kita yang sudah  
beri CD.45 ini sebagai suatu  
mobil diri pribadi yang  
menelurong dehimenjelaweng  
embawaan. Tetapi sekarang  
kita berangsur DPP-GR  
dan RRI melaksanakan  
UUD 1945.

Kita  
cependedapat,  
tidak dapat me-  
ngelakkan rakyat, lebih  
tidak mungkin sadia dia  
pada mengorbankan uang  
sekali seperti orang ngomong  
diwarung kopitiam.

Saya soktan.  
Menanggapi keadaan ekono-  
mi dawasa ini, disamping hu-  
tang kita kepada Ibu negeri  
sudah mencapai US \$ 24.000  
Jard, menurut K.H.A. Sjaichu  
segala projek-projek presti-  
gi dan soktan harus distop  
kerena yang lebih penting se-  
karang adalah beras, pertani-  
an dan pendidikan. Dijuga-  
ius uang-jang sudah naik  
50% dari semula, inflasi ini  
sedikitnya harus dikurangi.

Sebelumnya telah berbitara  
ber-turut-turut Ketua DMUI Drs.  
Med. JMV Suwarto, Ketua KA  
MI Mr. Drs. Med. Abdul Ga-  
fur dan Prof. Shamsi Iman-  
santoso.

Angkatan Bersenjata, 10 Djuli 1966

Instruksi Menteri Dalam Negeri:  
Teruskan Pembersihan Gestapu  
Dng Penuh Kewaspadaan

Djakarta, 10 Djuli (Antara).

Dgn menunduk lebih lanjut kepada Instruksi Menteri Dalam Negeri no. 3 tahun 1966 tentang penjemputaan Pemerintah Daerah, guna mendjamin suksesnya usaha pemerintah untuk mengkonsolidir potensi jang progressif, revolucioner dalam suasana tinggian revolusi sekarang ini, serta untuk tetap memelihara keibawaan dan ketabilan ciptaan pemerintahan Daerah, Menteri Dalam Negeri Maj. Gen Basuki Rachmat instruksikan kepada semua Gubernur/KDH Propinsi/Bupati/KDH dan Walikota/KDH sebagai berikut:

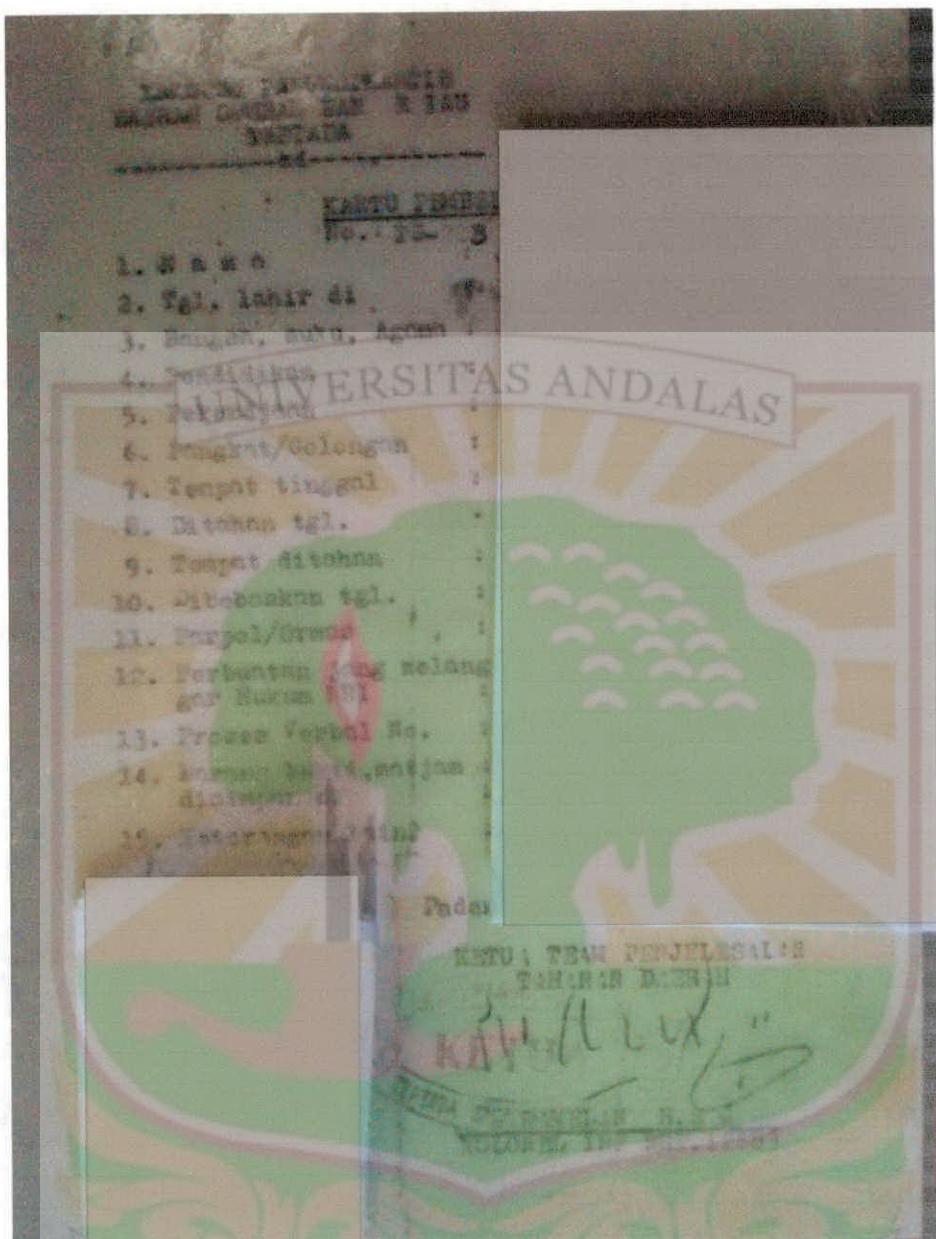
★ 1. Pembersihan alat perlengkapan Daerah dari unsur "Gestapu" supaya terus dilakukan dengan penuh kewaspadaan.

★ 2. Dalam melaksanakan pembersihan itu, hendaknya diikuti dasar kebijaksanaan penertiban/pembersihan terhadap unsur "Gestapu" sebagaimana diatur dalam Instruksi Presiden/Panglima ABRI/Komando Operasi Tertinggi No. 22/Koij/1965 dan Instruksi Presiden Panglima ABRI/Panglima Besar Komando Ganjang Malaysia No. 69/Koijam/5/66, ohususnya mengenai klasifikasi dan perindakan pedjabat jang terlibat dalam "Gestapu".

★ 3. Pedjabat jang masuk klasifikasi tsb tetapi hingga sekarang belum ditindak, harus segera ditindak; sebaliknya pedjabat jang telah dinyatakan dengan menjalahi kriteria dalam klasifikasi, perlu terhadapnya disadakan pengaturan kembali.

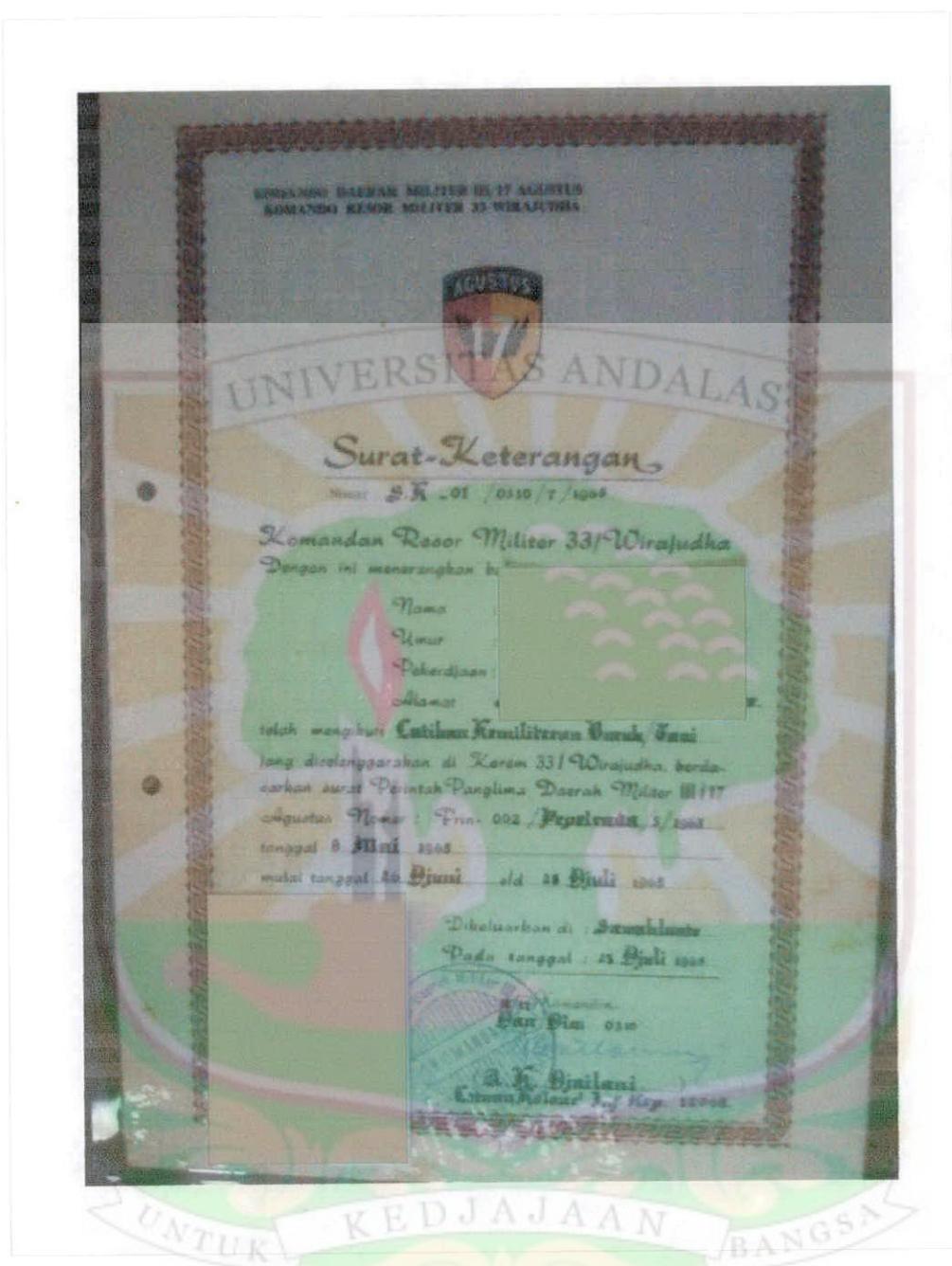


Gambar I : Surat pembebasan sementara untuk anggota PKI.



Sumber : Dokumentasi pribadi. Foto diambil pada 12 Januari 2012.

Gambar II : Surat keterangan latihan militer.



Sumber : Dokumentasi pribadi. Foto diambil pada 12 Januari 2012.

Gambar III : Bangunan bangsal 10 RSUD Sawahlunto yang pernah dijadikan sebagai penjara untuk orang-orang PKI.



Sumber : Dokumentasi pribadi. Foto diambil pada tanggal 5 Januari 2012.

Gambar IV : Bangunan bangsal 10 RSUD Sawahlunto yang pernah dijadikan sebagai penjara untuk orang-orang PKI.



Sumber : Dokumentasi pribadi. Foto diambil pada tanggal 5 Januari 2012.

Gambar V : Di areal ini pernah ada sebuah bangunan yang digunakan untuk penahanan PKI golongan C untuk Kecamatan Sumpur Kudus.



Sumber : Dokumentasi pribadi. Foto diambil pada tanggal 5 Januari 2012.

Gambar VI : Daftar OT dan OTI/1992.



Sumber : Arsip Kecamatan Sumpur. Foto diambil pada 25 November 2010.